

KEPENDUDUKAN INDONESIA

Tren Urbanisasi pada *Secondary Cities* di Indonesia Periode
1990-2010

Luh Kitty Katherina

Kesenjangan Upah Antar Jender di Indonesia: *Glass Ceiling*
atau *Sticky Floor*?

Hennigusnia

Pola Pengeluaran dan Gaya Hidup Penduduk Muda Kelas
Menengah: Studi Empiris Perkotaan di Jabodetabek

*Vanda Ningrum, Intan Adhi Perdana Putri dan
Andini Desita Ekaputri*

Pemenuhan ASI Eksklusif di Kalangan Ibu Bekerja: Peluang dan
Tantangan

Angga Sisca Rahadian

Mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia untuk
Menjawab Tantangan Modernisasi, Demokratisasi, dan Globalisasi

Makmuri Sukarno

Supporting Urban Poor Facing Climate Change: Creating Effective
Adaptation Messages

Syarifah Aini Dalimunthe



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 9	No. 2	73-148	Jakarta, Desember 2014	ISSN 1907-2902
----------------------------------	--------	-------	--------	---------------------------	-------------------

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia merupakan media informasi, komunikasi, dan pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah kependudukan, ketenagakerjaan dan ekologi manusia. Jurnal ini merupakan *peer-reviewed* jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Kependudukan-LIPI) yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Artikel dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi
Dewan Redaksi

Dra. Haning Romdiati, MA (Kepala P2K-LIPI)
 Dra. Titik Handayani, MS
 Dra. Mita Noveria, MA
 Widayatun, SH, MA
 Dra. Ade Latifa, M.Hum
 Zainal Fatoni, MPH
 Vanda Ningrum, MGM
 Syarifah Aini Dalimunthe, M.Sc.
 Andini Desita Ekaputri, MSE
 Intan Adhi Perdana Putri, M.Si
 Puguh Prasetyoputra, M.H.Econ
 Puji Hartana, S.Sos

Mitra Bestari

Prof. Gavin W. Jones, Ph.D., National University of Singapore-Singapore
 Prof. Haruo Kuroyanagi, Sugiyama Jogakuen University-Japan
 Dr. Djoko Hartono, Konsultan World Bank
 Dr. Deny Hidayati, MA., Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 Prof. Terence H. Hull, Ph.D., Australian National University- Australia
 Sukamdi, M.Sc., Ph.D., Universitas Gadjah Mada
 Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si., Universitas Indonesia

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 Widya Graha LIPI, lantai X, Ruang 2127
 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia
 Tromol Pos 250/JKT 1002,
 Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106
 Fax: +62 21 5207205
 E-mail: jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id
 Website: www.kependudukan.lipi.go.id

Penerbit

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 Widya Graha LIPI, lantai X
 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia
 Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106



Tren Urbanisasi pada *Secondary Cities* di Indonesia Periode 1990-2010
Luh Kitty Katherina

Kesenjangan Upah Antar Jender di Indonesia: *Glass Ceiling*
atau *Sticky Floor*?
Hennigusnia

Pola Pengeluaran dan Gaya Hidup Penduduk Muda Kelas Menengah:
Studi Empiris Perkotaan di Jabodetabek
Vanda Ningrum, Intan Adhi Perdana Putri, dan Andini Desita Ekaputri

Pemenuhan ASI Eksklusif di Kalangan Ibu Bekerja: Peluang dan Tantangan
Angga Sisca Rahadian

Mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia untuk Menjawab Tantangan
Modernisasi, Demokratisasi, dan Globalisasi
Makmuri Sukarno

Supporting Urban Poor Facing Climate Change: Creating Effective Adaptation Messages
Syarifah Aini Dalimunthe



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii-viii
ABSTRAK/ABSTRACT	ix-xvi
Tren Urbanisasi pada <i>Secondary Cities</i> di Indonesia Periode 1990-2010 Luh Kitty Katherina	73-82
Kesenjangan Upah Antar Jender di Indonesia: <i>Glass Ceiling</i> atau <i>Sticky Floor</i> ? Hennigusnia	83-96
Pola Pengeluaran dan Gaya Hidup Penduduk Muda Kelas Menengah: Studi Empiris Perkotaan di Jabodetabek Vanda Ningrum, Intan Adhi Perdana Putri dan Andini Desita Ekaputri	97-108
Pemenuhan ASI Eksklusif di Kalangan Ibu Bekerja: Peluang dan Tantangan Angga Sisca Rahadian	109-118
Mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia untuk menjawab tantangan Modernisasi, Demokratisasi, dan Globalisasi Makmuri Sukarno	119-136
Supporting Urban Poor Facing Climate Change: Creating Effective Adaptation Messages Syarifah Aini Dalimunthe	137-148

KATA PENGANTAR

Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) pada Volume 9 No 2 Desember 2014 ini menyajikan enam artikel ilmiah dengan berbagai isu yang diangkat. Dinamika penduduk di perkotaan lapis kedua Indonesia, fenomena penduduk kelas menengah, kesenjangan upah antar gender menjadi bagian dari tiga artikel terawal dari JKI yang menarik untuk dibaca. Sedangkan pada tiga artikel terakhir tiga penulis mengetengahkan diskursus pemenuhan ASI Eksklusif yang menjadi tantangan ibu bekerja, peran lembaga pendidikan dalam demokratisasi, serta strategi untuk mengkomunikasikan dampak perubahan iklim kepada kelompok rentan seperti penduduk miskin kota.

Artikel pertama ditulis oleh Luh Kitty Katherina dengan judul *Tren Urbanisasi pada Secondary Cities di Indonesia Periode Tahun 1990-2010*. Tulisan ini mengambil kasus *secondary cities* (kota-kota lapis kedua) yang mulai memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan menyeimbangkan pembangunan wilayah, yaitu Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar. Kota-kota ini mengalami percepatan pertumbuhan, baik di bidang ekonomi, kependudukan, maupun fisik. Percepatan pertumbuhan ini menyebabkan kebutuhan lahan terbangun kota-kota tersebut tidak mampu lagi terpenuhi sehingga aktivitas perkotaan mulai merambah ke wilayah sekelilingnya. Kawasan perkotaan semakin melebar ke wilayah pinggiran. Hasil Sensus Penduduk 1990-2010 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pada kota-kota kedua lebih rendah dibandingkan dengan wilayah di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan aktivitas perkotaan kota-kota kedua sudah melewati batas administrasi kota, menyatu dengan wilayah sekelilingnya.

Artikel kedua ditulis oleh Hennigusnia dengan judul *Kesenjangan Upah Antar Gender di Indonesia: Glass Ceiling Atau Sticky Floor?* Artikel ini menggunakan data Sakernas 2008-2012 untuk mengestimasi persamaan upah laki-laki dan perempuan menggunakan OLS standar. Metode dekomposisi Oaxaca-Blinder (1973) digunakan untuk menentukan besarnya rata-rata kesenjangan upah menurut jender yang disebabkan oleh faktor karakteristik (*explained effect*) dan faktor diskriminasi (*unexplained effect*). Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan upah menurut jender masih didominasi oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained*) dan diindikasikan sebagai diskriminasi, baik pada tingkat rata-rata maupun di setiap kuantil dalam distribusi upah. Penelitian ini juga menemukan adanya bukti lantai lengket (*sticky floor*) di Indonesia.

Artikel ketiga ditulis oleh Vanda Ningrum, Intan Adhi Perdana Putri, dan Andini Desita Ekaputri berjudul *Pola Pengeluaran dan Gaya Hidup Penduduk Muda Kelas Menengah: Studi Empiris Perkotaan di Jabodetabek*. Tulisan ini menganalisis perilaku penduduk muda yang termasuk dalam kategori kelas menengah berdasarkan atas pola pengeluaran dan gaya hidup. Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap penduduk berusia 18 hingga 35 tahun, tinggal dan bekerja di perkotaan seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hasil survei menunjukkan bahwa terlihat adanya perbedaan pola konsumsi antara penduduk muda kelas menengah yang belum dan sudah menikah. Penduduk yang belum menikah lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk makanan sebagai prioritas pertama, sedangkan penduduk yang sudah menikah untuk membayar cicilan rumah dan kendaraan.

Artikel keempat ditulis oleh Angga Sisca Rahardian dengan judul *Pemenuhan Hak ASI Eksklusif di Kalangan Ibu Bekerja: Peluang dan Tantangan*. Tulisan ini menganalisis hambatan dan tantangan ibu bekerja dalam memenuhi ASI Eksklusif. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam dengan beberapa ibu bekerja dengan kriteria tertentu dan observasi tempat bekerja informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ASI Eksklusif di kalangan ibu bekerja masih jauh dari yang diharapkan. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial kurang mendukung para ibu bekerja untuk memberikan ASI sehingga memberi dampak negatif bagi ibu bekerja itu sendiri maupun anaknya.

Artikel kelima ditulis oleh Makmuri Sukarno dengan judul Mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia untuk Menjawab Tantangan Modernisasi, Demokratisasi, dan Globalisasi. Melalui metode *Rapid Assessment* terhadap sistem penyelenggaraan (*governance*), manajemen, tenaga pendidik, kurikulum, peserta didik serta cara pembelajaran pada dua dari tiga MAN-IC (yaitu di Jakarta dan Jambi), nampaklah ketidakseimbangan sekaligus ketidaksiapan lembaga ini dalam merespon tantangan-tantangan tersebut. Pembaharuan pada hal-hal tersebut di atas yang diajukan dalam tulisan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan responsif MAN-IC dalam menyiapkan generasi mendatang.

Artikel keenam ditulis oleh Syarifah Aini Dalimunthe berjudul *Supporting Urban Poor Facing Climate Change: Creating Effective Adaptation Messages*. Artikel ini memberikan gambaran kebutuhan informasi dari masyarakat miskin kota ketika menghadapi perubahan iklim, terutama media apa yang dipercaya oleh masyarakat miskin perkotaan, pilihan sumber informasi dan bagaimana mereka ingin informasi tersebut disajikan. Sebagai contoh, tulisan ini memberikan model pengemasan pesan adaptasi terhadap perempuan miskin perkotaan. Dengan memahami kebutuhan informasi dan model pengemasan informasi, akan mendukung efektivitas pesan adaptasi perubahan iklim. Data dari riset ini di kumpulkan menggunakan wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan survei terhadap 928 masyarakat miskin kota di Indonesia.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Penulis yang telah berkontribusi pada terbitan terakhir dari Volume 9, Nomor 2, Desember 2014, juga kepada Mitra Bestari yang sudah bekerjasama dengan redaksi untuk menyampaikan saran dan reviewnya. Selamat Membaca!

Salam Hangat,

Redaksi JKI



DDC: 300.303

Luh Kitty Katherina

**TREN URBANISASI PADA SECONDARY CITIES
DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1990-2010**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, Desember 2014, Hlm. 73-82

Urbanisasi seringkali identik dengan kota utama di suatu negara sebagai lokasi terjadinya akumulasi kapital yang menjadi daya tarik tinggi berbagai aktivitas ekonomi. Namun pada kenyataannya, fenomena urbanisasi bahkan mega-urbanisasi telah merambah pada lapis kedua kota-kota di suatu negara. Tulisan ini mengambil kasus *secondary cities* (kota-kota lapis kedua) yang mulai memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan menyeimbangkan pembangunan wilayah, yaitu Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar. Kota-kota ini mengalami percepatan pertumbuhan, baik di bidang ekonomi, kependudukan, maupun fisik. Percepatan pertumbuhan ini menyebabkan kebutuhan lahan terbangun kota-kota tersebut tidak mampu lagi terpenuhi sehingga aktivitas perkotaan mulai merambah ke wilayah sekelilingnya. Kawasan perkotaan semakin melebar ke wilayah pinggiran. Hasil Sensus Penduduk dalam kurun waktu 1990-2010 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pada kota-kota kedua lebih rendah dibandingkan dari wilayah di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan aktivitas perkotaan kota-kota kedua sudah melewati batas administrasi kota, menyatu dengan wilayah sekelilingnya. Tulisan ini akan menggambarkan tren urbanisasi yang terjadi pada kota kedua di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif melalui perbandingan data hasil Sensus Penduduk tahun 1990, 2000, dan 2010. Secara umum tren urbanisasi pada kota-kota kedua di Indonesia menunjukkan sebuah pola dimana laju pertumbuhan

penduduk di kawasan perkotaan berkaitan erat dengan ukuran kota.

Kata Kunci: Tren, Urbanisasi, Kota Kedua, Wilayah Sekeliling Kota, Pertumbuhan Penduduk

DDC: 300.331

Hennigusnia

**KESENJANGAN UPAH ANTAR JENDER DI
INDONESIA: GLASS CEILING ATAU STICKY
FLOOR?**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, Desember 2014, Hlm. 83-96

Tulisan ini melihat kesenjangan upah antar jender di Indonesia tahun 2008-2012. Selain melihat kesenjangan upah pada tingkat rata-rata, penelitian ini juga akan melihat kesenjangan upah di kuantil yang berbeda dari distribusi upah, sehingga dapat diketahui apakah kesenjangan upah melebar di bagian atas distribusi upah (diindikasikan “glass ceiling”) atau melebar di bagian bawah distribusi upah (“sticky floor”). Penelitian ini menggunakan data Sakernas 2008-2012 untuk mengestimasi persamaan upah laki-laki dan perempuan menggunakan OLS standar. Metode dekomposisi Oaxaca-Blinder (1973) digunakan untuk menentukan besarnya rata-rata kesenjangan upah menurut jender yang disebabkan oleh faktor karakteristik (*explained effect*) dan faktor diskriminasi (*unexplained effect*). Sedangkan untuk menentukan kesenjangan upah menurut jender di kuantil yang berbeda dari distribusi upah menggunakan regresi kuantil dan menerapkan dekomposisi Machado-Mata (2005). Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan upah menurut jender masih didominasi oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained*) dan diindikasikan sebagai diskriminasi, baik pada tingkat rata-rata maupun di setiap kuantil dalam distribusi upah. Penelitian ini juga

menemukan adanya bukti lantai lengket (*sticky floor*) di Indonesia.

Kata Kunci: Dekomposisi Upah, Diskriminasi Upah, Regresi Kuantil, *Glass Ceiling*, *Sticky Floor*

DDC: 300.305

Vanda Ningrum, Intan Adhi Perdana Putri, dan Andini Desita Ekaputri.

POLA PENGELUARAN DAN GAYA HIDUP PENDUDUK MUDA KELAS MENENGAH: STUDI EMPIRIS PERKOTAAN DI JABODETABEK

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, Desember 2014, Hlm. 97-108

Penduduk muda menempati porsi yang besar dalam struktur penduduk di kota metropolitan. Sejak proses industrialisasi tahun 1980an berlangsung, tidak sedikit diantara penduduk muda tersebut termasuk dalam kelas menengah. Pola pengeluaran dan gaya hidup mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam perekonomian dan kebijakan tata kota. Tulisan ini menganalisis perilaku penduduk muda yang termasuk dalam kategori kelas menengah berdasarkan atas pola pengeluaran dan gaya hidup. Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap penduduk berusia 18 hingga 35 tahun, tinggal dan bekerja di perkotaan yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hasil survei menunjukkan terlihat adanya perbedaan pola konsumsi antara penduduk muda kelas menengah yang belum dan sudah menikah. Penduduk yang belum menikah lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk makanan sebagai prioritas pertama, sedangkan penduduk yang sudah menikah untuk membayar cicilan rumah dan kendaraan. Meskipun rata-rata penduduk muda kelas menengah memiliki frekuensi pergi ke mal tinggi, tetapi besarnya pengeluaran untuk hiburan tidak menjadi prioritas utama dalam total pengeluaran per bulannya. Alasan utama hiburan mengunjungi mal adalah untuk mendapatkan suasana yang nyaman dibandingkan membelanjakan pendapatan sebagai status sosial. Moratorium mal bisa menjadi implikasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau seperti taman sebagai alternatif kebijakan pemerintah kota menyediakan tempat hiburan.

Kata Kunci : Penduduk Muda, Kelas Menengah, Jabodetabek, Pola Pengeluaran, Gaya Hidup

DDC: 600.643

Angga Sisca Rahadian

PEMENUHAN HAK ASI EKSKLUSIF DI KALANGAN IBU BEKERJA: PELUANG DAN TANTANGAN

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, Desember 2014, Hlm. 109-118

Peran perempuan dalam dunia kerja saat ini tidak dapat diabaikan. Hal ini terlihat dari jumlah angkatan kerja perempuan tiap tahun semakin meningkat dan 66 persen angkatan kerja perempuan tersebut berada dalam usia reproduksi. Tulisan ini menganalisis hambatan dan tantangan ibu bekerja dalam memenuhi ASI eksklusif. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam dengan beberapa ibu bekerja dengan kriteria tertentu dan observasi tempat bekerja informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ASI eksklusif di kalangan ibu bekerja masih jauh dari yang diharapkan. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial kurang mendukung para ibu bekerja untuk memberikan ASI sehingga memberi dampak negatif bagi ibu bekerja itu sendiri maupun anaknya. Mayoritas informan tidak memiliki ruang laktasi untuk tempat memompa ASI di tempat bekerjanya dan mereka memompa di tempat-tempat yang kurang nyaman bahkan harus memompa di toilet. Selain itu, rekan-rekan satu kantor kurang mendukung ibu bekerja untuk memompa dan membuat ibu bekerja merasa tidak mendapat dukungan sehingga memengaruhi jumlah hasil ASI perahan dan tidak mencukupi kebutuhan anaknya. Menurut PP No 33 Pasal 32 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif menyatakan bahwa tempat bekerja harus menyediakan ruang laktasi untuk pegawainya yang menyusui anaknya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah instansi berwenang perlu mendorong tempat bekerja untuk menyediakan ruangan menyusui dan fasilitas pendukung sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, tempat bekerja sebaiknya mensosialisasikan pemberian ASI eksklusif kepada pegawainya dengan membuat brosur atau poster sehingga menumbuhkan kesadaran dan pemahaman para pegawai untuk mendukung ASI eksklusif. Terakhir sanksi tegas perlu diberikan bagi tempat bekerja yang tidak memiliki ruangan menyusui.

Kata Kunci: Ibu Bekerja, ASI Eksklusif, Kesehatan

DDC: 700.707

Makmuri Sukarno

MENGEMBANGKAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA UNTUK MENJAWAB TANTANGAN MODERNISASI, DEMOKRATISASI, DAN GLOBALISASI

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, Desember 2014, Hlm. 119-136

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN-IC), seperti halnya sekolah pada umumnya, terancam disfungsi dalam menyiapkan penduduk yang berkualitas, jika tidak memperbaharui diri sesuai dengan tantangan strategis yang berkembang. MAN-IC, yang didirikan dengan semangat Islam-Modernis, merupakan madrasah percontohan, terutama dalam pembelajaran agama dan sains/teknologi. Sekarang lembaga ini tidak hanya ditantang oleh tantangan lama, yaitu menemukan karakter Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan dan tantangan modernisasi, melainkan juga tantangan baru, yaitu demokratisasi (termasuk otonomi daerah) dan globalisasi. Melalui metode *Rapid Assessment* terhadap sistem penyelenggaraan (*governance*), manajemen, tenaga pendidik, kurikulum, peserta didik serta cara pembelajaran pada dua dari tiga MAN-IC (yaitu di Jakarta dan Jambi), nampaklah ketidakseimbangan sekaligus ketidaksiapan lembaga ini dalam merespon tantangan-tantangan tersebut. Pembaharuan pada hal-hal tersebut di atas yang diajukan dalam tulisan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan responsif MAN-IC dalam menyiapkan generasi mendatang.

Kata Kunci: Pendidikan, Madrasah, *Governance*, Manajemen, Modernisasi, Demokratisasi, Globalisasi

DDC: 300.380

Syarifah Aini Dalimunthe

MENDUKUNG MASYARAKAT MISKIN KOTA MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM: MENYUSUN PESAN ADAPTASI YANG EFEKTIF

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, Desember 2014, Hlm. 137-148

Pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi sipil masyarakat di Indonesia sudah mengkomunikasikan perubahan iklim kepada khalayak luas. Contoh komunikasi yang ada adalah aktivitas ‘hijau’ seperti *bike to work*, *car-free days*, dan bangunan yang berkonsep efisien energi. Namun demikian pertanyaan sederhana yang muncul: apakah tipe komunikasi seperti ini mampu memberi manfaat kepada kelompok yang paling rentan? Tulisan ini memberikan gambaran kebutuhan informasi dari masyarakat miskin kota ketika menghadapi perubahan iklim, terutama media apa yang dipercaya oleh masyarakat miskin perkotaan, pilihan sumber informasi dan bagaimana mereka ingin informasi tersebut disajikan. Sebagai contoh, tulisan ini memberikan model pengemasan pesan adaptasi terhadap perempuan miskin perkotaan. Perempuan miskin perkotaan ternyata masuk dalam kategori *struggling* (41%), mengalami dampak perubahan iklim namun tidak memiliki sumberdaya dan dukungan untuk melakukan aksi adaptasi. Dengan memahami kebutuhan informasi dan model pengemasan informasi, akan mendukung efektivitas pesan adaptasi perubahan iklim. Data dari riset ini dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan survei terhadap 928 masyarakat miskin kota di Indonesia.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Perkotaan, Adaptasi, Media, Komunikasi



DDC: 300.303

Luh Kitty Katherina

**URBANIZATION TREND IN INDONESIA'S
SECONDARY CITIES, 1990-2010**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, December 2014, Page 73-82

Urbanization is identical to the main city in the country as a location of the capital accumulation that is the main attraction of high economic activities. But in fact, the phenomenon of urbanization has penetrated even mega-urbanization in the second tier cities in the country. This paper takes the case of Indonesia's secondary cities that are beginning to have an important role in moving the national economy and balancing regional development. The cities are Surabaya, Bandung, Medan, Semarang and Makassar. These cities are experiencing accelerated growth in demography, economic and physical. These growth spurt cause land requirements in cities are no longer able to be fulfilled so the urban activities began to spread to the surrounding areas. Urban areas is widening to suburban areas. National Population Censuses in the period 1990-2010 shows the rate of population growth in the secondary cities lower than their surrounding areas. This indicates that urban activities of secondary cities had passed the administrative boundaries of the city, merge with the surrounding area. This paper will describe the trends of urbanization that occurred in Indonesia's secondary cities using descriptive analytic approach through comparison of data from National Population Censuses 1990, 2000 and 2010. In general, the trends of urbanization in Indonesia's secondary cities shows a pattern that is the rate of population growth in urban area closely related to the size of the city.

Keywords: Trend, Urbanization, Secondary Cities, Surrounding Area, Population Growth

DDC: 300.331

Hennigusnia

**GENDER WAGE GAP IN INDONESIA: GLASS
CEILING OR STICKY FLOOR?**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, December 2014, Page 83-96

This study looked the gender wage gap in Indonesia from 2008-2012. In addition to looking at the wage gap average level, the study also looked at the wage gap at different quantile of the wage distribution, so it can be known whether the wage gap widened at the top of the wage distribution (indicative of "glass ceiling") or widened at the bottom of the wage distribution ("sticky floor"). This study used data Sakernas 2008-2012 to estimate the wage equation of men and women using OLS standard. Then, the Oaxaca-Blinder decomposition method (1973) is used to determine the magnitude of the gender wage gap based on gender that caused by the characteristic factors (explained effect) and the discrimination factor (unexplained effect). As for determining the gender wage gap in different quantile of the wage distribution using quantile regression and applying decomposition Machado – Mata (2005). This study found that the gender wage gap was still dominated by factors that can not be explained (unexplained) and was indicated as discrimination, both at the average level and in each quantile of the wage distribution. This study also found evidence of sticky floor in Indonesia.

Keywords: Wage Decomposition, Wage Diskrimination, Quantile Regressions, Glass Ceiling, Sticky Floor

DDC: 300.305

Vanda Ningrum, Intan Adhi Perdana Putri, and Andini Desita Ekaputri.

EXPENDITURE PATTERN AND LIFESTYLE OF YOUNG MIDDLE CLASS POPULATION: EMPIRICAL STUDY FROM URBAN CITIES OF GREATER JAKARTA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, December 2014, Page 97-108

Youth occupies a great segment of population in metropolitan cities. Since the era of industrialization in 1980s, many of these youth are categorised as middle class group. Their expenditure patterns and lifestyle have a strong influence to the country economics as well as urban planning regulations. This paper aims to analyse the behaviour of youth who perceived themselves as young middle class population based on their expenditure pattern and lifestyle. The research surveyed those whose age spans from 18 to 35 years old, reside and work in the urban cities, namely Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. Results of the survey showed, there is a different pattern of consumption between young middle class population who are single and married. Single individuals tend to spend their monthly income for food culinary as their first priority. In the other hand, young marriage couple tends to spend their income for paying their house or car loans. Although, in average, young middle class frequently visit shopping malls, their expenditure on entertainment is not their top priority from total expenditure per month. Their main reason visiting malls is to seek for a convenient environment compared to spending their income as a mean to reach a certain social status. Given the imbalance between growing number of malls (supply) and lack of spending (demand), moratorium of malls can be one regulations issued by the government to provide alternative public areas or Open Green Areas (RTH) such as parks.

Keywords: Youth, Middle Class, Greater Jakarta, Expenditure Pattern, Lifestyle

DDC: 600.643

Angga Sisca Rahadian

FULFILLING THE RIGHT FOR EXCLUSIVE BREASTFEEDING AMONG WORKING WOMEN: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, December 2014, Page 109-118

Women participation in the business today cannot be neglected. Demographic data shows that the proportion of women in the total labor force from year to year is exhibiting an upward trend. The data also shows that approximately 66% of the working womens are at their reproductive age. Given on these circumstances, the aim of this paper is to study challenges as well as opportunities of fulfilling the right for exclusive breastfeeding among working women. This study uses data from in-depth interview of working women and direct observation in office environment. The study found that the number of working women able to do exclusive breastfeeding is still far from the expectation. On this founding, the study identified that the lack of support from both physical and social environments is the major reason. Most of respondents have not lactation room in their office and if they want to express the milk, they have to use improper room, even in the toilet. In addition, they did not get support from their colleagues and it can influence the production of milk. Meanwhile, based on PP No. 33 Tahun 2012 about ASI Eksklusif states that workplace have to provide lactation room for their employee who breastfeed. The recommendation of this study are (1) authorized institution have to encourage workplace to provide the lactation room and the support facilities according to their financial ability (2) the workplace should make a campaign about exclusive breastfeeding with posters or brochures so it can increase awareness and knowledge to support ASI Eksklusif program (3) a strict sanction must be applied for the workplace which do not provide lactation room.

Keywords: Working Women, Exclusive Breastfeeding, Health

DDC: 700.707

Makmuri Sukarno

DEVELOPING INSAN CENDEKIA HIGH SCHOOL TO ADDRESS MODERNISATION, DEMOCRACY, AND GLOBALISATION CHALLENGES

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, December 2014, Page 119-136

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN-IC) faces, similar with other schools, disfunctional in preparing people that are more qualified, if the institution does not reform it-self along with the strategic challenges which are developing. MAN-IC, that was build based on Modernist-Islam spirit, is a model madrasah especially with regard to its religious and science & technology teaching practices. Nowadays, this institution is not only challenged with old challenges, that are searching Islamic as well as Indonesian characters and modernization, but also with the new ones, that are democratization including local otonomy and globalization. Rapid Assessment method to see its governance, management, curriculum, and teaching-learning aspects within the two of three existing MAN-ICs (which are located in Jakarta and Jambi) reveals the imbalances and un-readiness of those institution in facing those challenges. Reform on those aspects proposed by this article is assumed to be empowering its responsive ability in preparing future generation.

Keywords: Education, Madrasah, Governance, Management, Modernization, Democratisation, Globalization.

DDC: 300.380

Syarifah Aini Dalimunthe

SUPPORTING URBAN POOR FACING CLIMATE CHANGE: CREATING EFFECTIVE ADAPTATION MESSAGES

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, December 2014, Page 137-148

Government, international agencies, civic society, and media organizations in Indonesia have communicated climate change to people. The examples are communication campaigns focusing on “green” activities, such as bike to work, car-free days, and energy-efficient buildings. One simple question arises in the practice: could these types of communication reach and provide benefits for the most vulnerable group? This paper offers an overview of urban poor audience needs of information, particularly on what media they use, who they talk to and trust, and how they would like Information delivered to them. As an exercise in crafting messages, women in urban poor will be put as the priority audience. This group falls into the struggling segment (41%). They are experiencing the most impact and cannot take much action. The struggling is willing to make changes, but lack of information and support prevents them from taking action. By understanding this sort of information, it will support delivering effective climate change adaptation messages. The methods included in this research are in-depth interviews, focus group discussion, and survey to 928 urban poor in Indonesia.

Keywords: Adaptation, Climate Change, Communications, Media

TREN URBANISASI PADA *SECONDARY CITIES* DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1990-2010¹

(*URBANIZATION TREND IN INDONESIA'S SECONDARY CITY, 1990-2010*)

Luh Kitty Katherina

Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Korespondensi Penulis: *kittykatherina@gmail.com*

Abstract

Urbanization is identical to the main city in the country as a location of the capital accumulation that is the main attraction of high economic activities. But in fact, the phenomenon of urbanization has penetrated even mega-urbanization in the second tier cities in the country. This paper takes the case of Indonesia's secondary cities that are beginning to have an important role in moving the national economy and balancing regional development. The cities are Surabaya, Bandung, Medan, Semarang and Makassar. These cities are experiencing accelerated growth in demography, economic and physical. These growth spurt cause land requirements in cities are no longer able to be fulfilled so the urban activities began to spread to the surrounding areas. Urban areas is widening to suburban areas. National Population Censuses in the period 1990-2010 shows the rate of population growth in the secondary cities lower than their surrounding areas. This indicates that urban activities of secondary cities had passed the administrative boundaries of the city, merge with the surrounding area. This paper will describe the trends of urbanization that occurred in Indonesia's secondary cities using descriptive analytic approach through comparison of data from National Population Censuses 1990, 2000 and 2010. In general, the trends of urbanization in Indonesia's secondary cities shows a pattern that is the rate of population growth in urban area closely related to the size of the city.

Keywords: *Trend, Urbanization, Secondary Cities, Surrounding Area, Population Growth*

Abstrak

Urbanisasi seringkali identik dengan kota utama di suatu negara sebagai lokasi terjadinya akumulasi kapital yang menjadi daya tarik tinggi berbagai aktivitas ekonomi. Namun pada kenyataannya, fenomena urbanisasi bahkan mega-urbanisasi telah merambah pada lapis kedua kota-kota di suatu negara. Tulisan ini mengambil kasus *secondary cities* (kota-kota lapis kedua) yang mulai memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan menyeimbangkan pembangunan wilayah, yaitu Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar. Kota-kota ini mengalami percepatan pertumbuhan, baik di bidang ekonomi, kependudukan, maupun fisik. Percepatan pertumbuhan ini menyebabkan kebutuhan lahan terbangun kota-kota tersebut tidak mampu lagi terpenuhi sehingga aktivitas perkotaan mulai merambah ke wilayah sekelilingnya. Kawasan perkotaan semakin melebar ke wilayah pinggiran. Hasil Sensus Penduduk dalam kurun waktu 1990-2010 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pada kota-kota kedua lebih rendah dibandingkan dari wilayah di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan aktivitas perkotaan kota-kota kedua sudah melewati batas administrasi kota, menyatu dengan wilayah sekelilingnya. Tulisan ini akan menggambarkan tren urbanisasi yang terjadi pada kota kedua di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif melalui perbandingan data hasil Sensus Penduduk tahun 1990, 2000, dan 2010. Secara umum tren urbanisasi pada kota-kota kedua di Indonesia menunjukkan sebuah pola dimana laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan berkaitan erat dengan ukuran kota.

Kata Kunci: *Tren, Urbanisasi, Kota Kedua, Wilayah Sekeliling Kota, Pertumbuhan Penduduk*

¹ Makalah ini sudah dipresentasikan pada Seminar Ilmiah Kependudukan dengan tema Kependudukan untuk Pembangunan Pasca 2015, Bandung 26-28 November 2014

PENDAHULUAN

Beberapa dekade lalu, studi-studi mengenai urbanisasi, khususnya di Negara berkembang, terfokus pada kota-kota utama dari suatu Negara yang mengalami proses pengkotaan sangat cepat, membentuk kawasan perkotaan yang besar atau *megaurban* meninggalkan kota-kota lain di negaranya. Selain sebagai tempat konsentrasi penduduk, kota-kota tersebut memiliki kontribusi ekonomi yang sangat tinggi terhadap perekonomian nasional. Negara dengan kota utama (*primate city*) yang sangat menonjol diantaranya Indonesia (Jakarta), Thailand (Bangkok), Philippines (Manila), Mexico (Mexico City), and Hungary (Budapest). Hal ini membuat kota-kota lapis kedua atau ketiga di negara tersebut tidak menjadi perhatian khusus karena perannya yang dianggap sangat kecil.

Namun saat ini, peta urbanisasi mulai bergeser. Seperti yang disebutkan dalam Laporan United Nation 2014, bahwa aglomerasi perkotaan paling cepat terjadi pada kota menengah dan kota dengan jumlah penduduk kurang dari satu juta jiwa yang berlokasi di Asia dan Afrika. Secara global, saat ini terdapat lebih dari 2400 kota di dunia dengan jumlah penduduk antara 150 ribu hingga 5 juta yang dapat didefinisikan sebagai *secondary cities*, yang selanjutnya disebut kota lapis kedua. Sekitar dua per tiga kota lapis kedua terletak di Afrika dan Asia (Roberts & Hohmann, 2014). Pergeseran ini menunjukkan bahwa saat ini kota lapis kedua memiliki peran penting sebagai katalis dan pusat kedua yang dapat menarik masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal. Kota lapis kedua berperan penting dalam memfasilitasi produksi lokal, transportasi, transfer barang, manusia, informasi dan jasa antar sub-nasional, metropolitan, nasional, regional dan sistem global kota-kota. Seperti yang diungkapkan oleh Satterthwaite & Tacoli (2003), kota kecil dan menengah potensial memiliki peran penting dalam menyeimbangkan wilayah dan pembangunan pedesaan jika direncanakan dan dikelola dengan baik dimana kota-kota tersebut dapat memainkan peran sebagai penghubung antara pembangunan kota dan desa. Untuk itu, studi ini penting dilakukan untuk melihat karakteristik urbanisasi pada kota lapis kedua.

Kota lapis kedua merupakan istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan tingkat atau level kedua dalam hirarki kota-kota dibawah kota utama. Beberapa negara bisa memiliki beberapa tingkat atau level dari kota-kotanya. Istilah kota lapis kedua pertama kali dipopulerkan oleh Rondinelli pada tahun 1970an. Rondinelli mengkarakteristikan kota lapis

kedua sebagai kota permukiman dengan populasi paling sedikit 100 ribu jiwa, tetapi definisi ini tidak mengikutsertakan kota terbesar pada negara tersebut. UN-Habitat mendefinisikan kota lapis kedua sebagai sebuah wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk 100 ribu hingga 500 ribu jiwa. Definisi didasarkan atas klasifikasi kota berkembang pada tahun 1950an. Selanjutnya pada tahun 2014, United Nation mendefinisikan kota lapis kedua memiliki jumlah penduduk antara 1 juta hingga 5 juta jiwa. Robert and Hohmann (2014) mengungkapkan bahwa terdapat tiga kategori dari kota lapis kedua, (1) kota sub-nasional yang merupakan pusat dari pemerintah lokal, industri, pertanian, pariwisata dan pertambangan, (2) Kluster perkotaan yang diasosiasikan dengan perluasan, satelit dan kota baru yang mengelilingi kota metropolitan besar, dan (3) Koridor perdagangan ekonomi yang merupakan pusat pertumbuhan atau kutub yang direncanakan atau daerah terbangun sepanjang koridor transportasi utama.

Mengacu pada definisi-definisi terkait kota lapis kedua dan karakteristik kota-kota di Indonesia, maka definisi kota lapis kedua yang digunakan dalam studi ini adalah kota dengan jumlah penduduk antara 1 juta hingga 5 juta jiwa serta merupakan kluster perkotaan yang diasosiasikan dengan perluasan, satelit dan kota baru yang mengelilingi kota metropolitan besar. Untuk itu, kota-kota yang akan di studi lebih lanjut adalah Kota Surabaya dengan aglomerasi perkotaan Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo and Lamongan serta Kota Mojokerto dan Surabaya), Bandung dengan aglomerasi perkotaan Bandung Metropolitan Region (Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Sumedang), Medan dengan aglomerasi perkotaan Mebidangro (Kota Medan dan Binjai serta Kabupaten Deli Serdang dan Karo), Semarang dengan aglomerasi perkotaan Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Demak, Ungaran (Semarang), Salatiga dan Purwodadi (Grobogan) serta Kota Semarang) dan Makassar dengan aglomerasi perkotaan Mamminasata (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Sungguminasa dan Takalar). Kelima kota kedua tersebut pada tahun 2010 memiliki jumlah penduduk di atas satu juta jiwa dan memiliki aktivitas perkotaan yang sudah melebihi batas administrasi kotanya, teraglomerasi dengan wilayah sekelilingnya.

Studi ini membahas trend urbanisasi terutama aspek demografi pada kota lapis kedua di Indonesia dengan menggunakan data dari Sensus Penduduk Nasional tahun 1990, 2000 dan 2010. Tulisan ini terdiri dari empat bagian, bagian pertama pendahuluan, bagian kedua membahas perspektif teoritis tentang urbanisasi

dalam konteks kota kedua. Bagian ketiga berisi uraian mengenai pola urbanisasi kota lapis kedua di Indonesia dan bagian terakhir kesimpulan dari studi.

URBANISASI DAN *SECONDARY CITIES*

Secara harfiah, definisi urbanisasi adalah proses pengkotaan suatu wilayah. Menurut Ningsih (2002), urbanisasi merupakan suatu gejala atau suatu proses yang sifatnya multisektoral yang dilihat dari sebab maupun akibat yang ditimbulkannya. Sementara itu Firman, et al (2007) mendefinisikan urbanisasi sebagai sebuah transformasi dari pedesaan menjadi hidup dengan cara industri. Mengacu pada definisi ini, urbanisasi dianggap sebagai perubahan sosial ekonomi dunia yang paling fenomenal. Urbanisasi juga merupakan fenomena yang sangat kompleks, meliputi faktor sosial, ekonomi, politik, dan geografi. Namun studi ini akan fokus pada faktor demografi saja utamanya terkait dengan trend pertumbuhan penduduk dan proporsi penduduk perkotaannya.

Terkait dengan konsep urbanisasi, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan yaitu mengenai perbedaan urbanisasi sendiri dengan pertumbuhan perkotaan (*urban growth*). *Urban growth* merupakan salah satu mekanisme untuk melihat urbanisasi melalui pertumbuhan alami penduduk perkotaan. *Urban growth* dapat dilihat melalui perbandingan jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu, sedangkan urbanisasi dilihat melalui perbandingan relatif jumlah penduduk perkotaan dengan jumlah total penduduk dari waktu ke waktu (Morrison, 1980). Terdapat tiga hal yang membentuk urbanisasi yaitu peningkatan jumlah penduduk alami, migrasi desa kota, dan klasifikasi ulang.

Seperti di kebanyakan negara berkembang di Asia,

urbanisasi di Indonesia dipicu oleh pembangunan ekonomi, terutama pada sektor industri dan jasa, yang cenderung berlokasi pada kota-kota besar. Perkembangan ini disebabkan oleh ketersediaan utilitas seperti ketersediaan air, listrik, pelabuhan dan bandar udara serta tempat konsentrasi tenaga kerja terampil dan pasar. Urbanisasi dan pembangunan ekonomi pada sebagian besar wilayah Indonesia didorong oleh investasi baik domestik maupun asing pada kawasan perkotaan besar. Pada tahun 1950, hanya Kota Jakarta yang memiliki jumlah penduduk di atas satu juta jiwa. Tiga puluh tahun kemudian, pada tahun 1980 terdapat tiga kota baru yang memiliki jumlah penduduk di atas satu juta jiwa, yaitu Surabaya, Bandung dan Medan. Selanjutnya pada tahun 1990, Semarang, Palembang dan Ujung Pandang (Makassar) memiliki jumlah penduduk di atas satu juta jiwa. Dan pada tahun 2010, jumlah kota dengan populasi lebih dari satu juta jiwa menjadi sebelas dengan penambahan Kota Bekasi, Tangerang, Depok dan Tangerang Selatan. Kota-kota yang disebut terakhir merupakan kota yang berkembang karena proses mega-urbanisasi dari Kota Jakarta, membentuk *megacities* Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dimana aktivitas perkotaan Jakarta sudah melimpah ke wilayah pinggirannya. Pembangunan fisik perkotaan melebar keluar kota dan batas metropolitan, memencar sepanjang jalan utama serta menyebar secara acak ke segala arah (McGee & Robinson, 1995).

Berdasarkan data-data di atas, proses mega-urbanisasi tidak hanya terjadi pada kota-kota utama dan daerah pinggirannya, tetapi juga terjadi pada kota-kota lapis keduanya. Pada tahun 1980, kota-kota lapis kedua mulai masuk dalam tempo percepatan kegiatan ekonomi di ibukota (Rimmer & Dick, 2009). Secara bertahap, kota lapis kedua masuk ke dalam koneksi



Gambar 1. Kota-kota Kedua di Indonesia

internasional, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Perluasan pembangunan fisik perkotaan juga terjadi pada kota-kota lapis kedua, misalnya Surabaya. Pada tahun 1970an industrialisasi mulai masuk ke Surabaya dan Jawa Timur, pada tahun 2000 jumlah penduduk tercatat Kota Surabaya hanya 2,6 juta tetapi mendekati 8 juta jika dihitung dengan wilayah sekelilingnya. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada kota lapis kedua lainnya.

Para akademisi telah menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan urbanisasi. Cohen (2006) misalnya, mengungkapkan bahwa urbanisasi dan pertumbuhan kota disebabkan oleh alasan beragam terkait dengan migrasi desa kota, peningkatan populasi alami dan penggabungan. Selanjutnya, Erickcek & McKinney (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan kawasan metropolitan bergantung pada struktur ekonominya, sumber daya manusia, faktor kualitas hidup, trend sejarah dan lokasi. Lebih jauh, urbanisasi juga berkaitan integral dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan proteksi lingkungan (United Nation, 2014).

Sementara itu, Webster (2011) menunjukkan bahwa pendorong perubahan di wilayah peri-urban sebagai perluasan pembangunan perkotaan, termasuk pendorong industri dan non-industri. Webster menekankan bahwa dalam mendefinisikan penggerak urbanisasi, dua kekuatan harus dipertimbangkan: kekuatan sentripetal (penggerak dari dalam) dan sentrifugal (penggerak dari luar) dalam sebuah perluasan wilayah perkotaan. Kekuatan sentrifugal pada beberapa negara dengan pendapatan menengah meliputi investasi manufaktur, pembangunan cepat dari *expressways* dan pasar lahan perkotaan, dimana harga lahan perkotaan lebih rendah di wilayah pinggiran. Preferensi budaya juga memainkan peran dalam arti bahwa orang dengan pendapatan tinggi berharap dapat hidup di wilayah pinggiran, seperti yang ditemukan di Amerika Utara dan Australia meskipun terdapat penawaran perumahan dekat dengan kota inti. Sementara kekuatan sentripetal mungkin berhubungan dengan struktur ekonomi yang mendorong urbanisasi. Hal ini dapat meliputi sektor tertentu, seperti jasa yang cenderung terkonsentrasi pada area spesifik. Meskipun demikian, faktor budaya dan keterbatasan pilihan dapat juga memainkan peran dengan cara yang sama sebagai kekuatan sentrifugal. Goldblum & Wong (2000) menemukan bahwa aktivitas spekulatif juga dapat dianggap sebagai faktor dari perubahan kota.

POLA URBANISASI PADA KOTA LAPIS KEDUA DI INDONESIA

Pada dasarnya kota lapis kedua di Indonesia memiliki fungsi menengah yang nyata dalam kebijakan pembangunan antara pusat (Jakarta sebagai pusat pemerintahan) dengan permukiman regional terkait aspek ekonomi, sosial, pemerintahan, dan modernisasi umum (Atmodiriono dan Osborn dalam Rondinelli, 1983). Kota lapis kedua berfungsi sebagai intermediasi dalam aliran kekuatan, inovasi, manusia, dan sumberdaya agar tidak mengumpul hanya pada satu lokasi. Secara relatif, bagaimanapun kota lapis kedua tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan kota dengan kategori lebih besar atau lebih kecil (Rondinelli, 1983).

Pertumbuhan Penduduk Kota Kedua

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun pada kota lapis kedua periode tahun 1990 dan 2000 sangat rendah berkisar antara 0,38% (di Bandung) sampai 1,65% (di Makassar). Kota Surabaya memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun sedikit lebih tinggi dari Bandung (0,49%), Semarang dan Medan berada di atasnya, yaitu 0,78% dan 1,01%. Berdasarkan persentase tersebut, hanya Kota Makassar yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional (1,35%). Dari sisi jumlah penduduk, pada tahun 1990, Kota Makassar merupakan kota kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk paling kecil (944.372 jiwa) sementara kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kota Surabaya (2.473.272 jiwa). Kota Bandung (2.058.122 jiwa) berada di urutan kedua, Medan (1.730.052 jiwa) di urutan ketiga dan Kota Semarang (1.249.230 jiwa) di urutan ke-empat. Sepuluh tahun selanjutnya, pada tahun 2010, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk masing-masing kota seperti yang disebutkan sebelumnya, urutan besaran jumlah penduduk kota kedua tidak berubah.

Tabel 1. Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun *Secondary Cities* di Indonesia

No	Kota Kedua	1990		2000		2010
		Populasi	Rate 1990-2000 (%)	Populasi	Rate 2000-2010 (%)	Populasi
1	Surabaya	2.473.272	0,49	2.595.359	0,66	2.765.908
2	Bandung	2.058.122	0,38	2.136.260	1,21	2.394.873
3	Medan	1.730.052	1,01	1.904.104	1,08	2.109.339
4	Semarang	1.249.230	0,78	1.346.813	1,54	1.553.778
5	Makassar	944.372	1,65	1.100.019	2,18	1.339.374

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000 dan 2010

Untuk periode tahun 2000 hingga 2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun tertinggi masih dimiliki oleh Kota Makassar (2,18%) dan terendah adalah Kota Surabaya (0,66%). Kota Bandung yang pada periode sebelumnya (tahun 1990-2000) memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah, pada periode ini berada di urutan ketiga (1,21%) di bawah Kota Semarang (1,54%). Sementara Kota Medan memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,08%. Pada periode ini juga terdapat dua kota yang memiliki laju di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional 1,49%, yaitu Kota Semarang dan Kota Makassar. Perbedaan pertumbuhan penduduk di kota-kota ini atau proses urbanisasi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi pada kota-kota tersebut. Pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif dengan urbanisasi dimana urbanisasi seringkali diasosiasikan dengan level pembangunan ekonomi suatu negara (Firman, 2014). Wilayah dengan level pembangunan ekonomi tinggi cenderung juga memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi.

Tabel 2. PDRB *Secondary Cities* Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2006-2010 (Miliar Rupiah)

Kota Kedua	2006	2007	2008	2009	2010
Surabaya	68.817	73.160	77.718	82.015	87.829
Bandung	23.043	24.942	26.979	29.228	31.697
Medan	27.234	29.353	31.374	33.430	35.822
Semarang	17.119	18.143	19.157	20.181	21.366
Makassar	11.342	12.261	13.552	14.798	16.252

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2010, BPS.

Kota Makassar dengan jumlah penduduk paling rendah memiliki produk domestik regional bruto

(PDRB) paling rendah diantara kota lapis kedua yang lain. PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa secara umum semakin tinggi jumlah penduduk pada suatu kota semakin tinggi aktivitas perekonomiannya. Namun terjadi anomali pada Kota Bandung dan Medan, dimana Kota Bandung memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan Kota Medan namun PDRBnya lebih rendah. Jika dilihat dari PDRB berdasarkan lapangan usaha (9 sektor) masing-masing kota periode 2006-2010, Kota Bandung memiliki nilai PDRB lebih tinggi pada tiga sektor yaitu industri pengolahan, listrik, gas dan air minum serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara Kota Medan unggul pada enam sektor lainnya. Keberadaan pelabuhan Balawan menyumbang nilai tambah yang sangat besar bagi pendapatan regional Kota Medan, seperti pada tahun 2010, sektor pengangkutan dan telekomunikasi Kota Medan mencapai 7 triliun, sementara sektor yang sama di Kota Bandung hanya menyumbang sekitar 3,5 triliun (Kota Medan dan Kota Bandung Dalam Angka 2007-2011).

Sementara itu, jika pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada kota lapis kedua relatif rendah dibandingkan laju pertumbuhan Nasional. Berbeda halnya dengan wilayah sekelilingnya, rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada sebagian besar wilayah di pinggiran kota lapis kedua lebih tinggi dibandingkan dengan kota inti. Sebagai contoh, pada periode tahun 1990-2000 Kabupaten Gresik yang berbatasan dengan Surabaya memiliki laju pertumbuhan penduduk 1,74% per tahun. Hal yang sama juga terjadi pada kabupaten dan kota lain di sekeliling Kota Surabaya, pertumbuhan penduduk per

tahunnya lebih tinggi, yakni Kabupaten Bangkalan 0,72%, Kota Mojokerto 0,91%, Kabupaten Mojokerto 1,54%, and Kabupaten Sidoarjo 3,39%. Kabupaten Lamongan satu-satunya kabupaten di sekeliling Kota Surabaya yang memiliki pertumbuhan penduduk lebih rendah dari Kota Surabaya (0,34%). Hal ini terjadi mengingat Kabupaten Lamongan terletak paling jauh dari Kota Surabaya dimana kegiatan industri belum berkembang seperti di Kabupaten lainnya. Guna lahan Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh lahan tidak terbangun, baik sawah, hutan atau tegalan.

Begitu juga dengan Kabupaten Bandung (Kabupaten Bandung Barat terbentuk tahun 2007) dan Kabupaten Sumedang, yang berbatasan dengan Kota Bandung, memiliki laju pertumbuhan penduduk 2,97% dan 1,63% pertahun, lebih tinggi dari laju Kota Bandung (0,82%). Hal yang tidak jauh berbeda juga ditemui di Kota Binjai, kota mandiri yang terletak di sekitar Kota Medan memiliki pertumbuhan penduduk 1,76% per tahun lebih tinggi dari Kota Medan (1,10%). Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan Kota Medan memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertumbuhan dua kali lipa laju Kota Medan. Sementara Kabupaten Karo, laju

pertumbuhannya lebih rendah sedikit dari Kota Medan yaitu 1,00%. Tidak jauh berbeda dengan kondisi Kabupaten Lamongan, Kabupaten Karo juga terletak paling jauh dari Kota Medan dimana aktivitas perkotaan masih belum berkembang seperti pada wilayah lainnya di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Selanjutnya, Kota Semarang dan sekitarnya, hanya Kabupaten Demak yang memiliki pertumbuhan penduduk di atas Kota Semarang, sementara kabupaten lainnya laju pertumbuhan penduduknya masih rendah. Mamas et al (2001) dalam Firman (2003) mengungkapkan bahwa, alasan utama dari rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang adalah karena batas administrasi Kota Semarang yang sangat luas, jika dibandingkan luas Kota Semarang dua kali luas Kota Bandung. Kota Semarang sangat luas dibandingkan kota-kota besar di Jawa.

Namun terdapat hal menarik untuk dicermati, berbeda dengan kota lapis kedua lainnya, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, kecuali jika dibandingkan dengan Kabupaten Gowa. Laju pertumbuhan

Tabel 3. Populasi pada *Secondary Cities* di Indonesia

No.	Secondary Cities and Surrounding Area	1990		2000		2010	
		Population	Rate 1990-2000 (%)	Population	Rate 2000-2010 (%)	Population	Rate 1990-2010 (%)
1	<i>Gerbangkertosusila (Surabaya Metropolitan Area)</i>						
	Surabaya City	2,473,272	0.49	2,595,359	0.66	2,765,908	0.59
	Gresik Regency	856,430	1.74	1,005,445	1.71	1,177,201	1.87
	Bangkalan Regency	750,740	0.72	805,048	1.27	907,255	1.04
	Mojokerto City	99,707	0.91	108,814	1.04	120,132	1.02
	Mojokerto Regency	786,943	1.54	908,004	1.27	1,023,526	1.50
	Sidoarjo Regency	1,166,972	3.39	1,563,015	2.45	1,945,252	3.33
	Lamongan Regency	1,143,344	0.34	1,181,660	-0.02	1,179,770	0.16
2	<i>Bandung Metropolitan Area</i>						
	Bandung City	2,058,122	0.38	2,136,260	1.21	2,394,873	0.82
	Cimahi City					541,139	
	Bandung and West Bandung Regency	3,201,332	2.97	4,151,894	1.29	4,688,133	2.32
	Sumedang Regency	831,809	1.63	967,580	1.28	1,091,323	1.56
3	<i>Mebidangro (Medan Metropolitan Area)</i>						
	Medan City	1,730,052	1.01	1,904,104	1.08	2,109,339	1.10
	Binjai City	181,866	1.75	213,725	1.51	246,010	1.76
	Deli Serdang Regency	1,602,149	2.23	1,959,230	-0.87	1,789,243	0.58
	Karo Regency	257,981	1.00	283,713	2.35	350,479	1.79
4	<i>Kedungsepur (Semarang Metropolitan Area)</i>						
	Semarang City	1,249,230	0.78	1,346,813	1.54	1,553,778	1.22
	Kendal Regency	798,976	0.64	849,729	0.60	900,611	0.64
	Demak Regency	822,781	1.83	973,674	0.88	1,058,938	1.44
	Ungaran (Semarang Regency)	785,799	0.60	833,181	1.17	931,041	0.92
	Salatiga City	98,012	5.44	151,326	1.30	171,067	3.73
	Purwodadi (Grobogan Regency)	1,148,174	1.05	1,268,234	0.32	1,308,592	0.70
5	<i>Mamminasata (Makassar Metropolitan Area)</i>						
	Makassar City	944,372	1.65	1,100,019	2.18	1,339,374	2.09
	Maros Regency	239,725	1.35	272,116	1.69	318,238	1.64
	Sungguminasa (Gowa Regency)	429,157	1.95	512,876	2.72	652,329	2.60
	Takalar Regency	206,089	1.15	229,718	1.72	269,171	1.53

Sumber: diolah dari National Population Censuses 1990, 2000 and 2010

penduduk Kabupaten Gowa adalah 1,95% lebih tinggi dari Kota Makassar (1,65%). Kota Makassar merupakan satu-satunya kota lapis kedua pada studi ini dengan jumlah penduduk di bawah dua juta jiwa sehingga besar kemungkinan bahwa Kota Makassar masih berada dalam tahap perkembangan tinggi, lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, dimana aktivitasnya belum melimpah ke luar batas administrasi.

Sedangkan untuk periode tahun 2000-2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun pada kota lapis kedua mengalami sedikit perubahan, dimana kota dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kota Surabaya (0,66%), sementara Bandung yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk terendah pada periode sebelumnya berada pada posisi terendah ketiga. Laju pertumbuhan tertinggi tetap berada di Kota Makassar (2,18%) yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya kecuali Kabupaten Gowa. Seperti yang terjadi pada periode tahun 1990-2000, untuk Kota Surabaya, Bandung dan Medan rata-rata laju pertumbuhan penduduk wilayah (kabupaten/kota) sekitarnya lebih tinggi.

Pada periode ini, hal yang berbeda terjadi di Kawasan Perkotaan Semarang, dimana rata-rata laju pertumbuhannya lebih tinggi dari semua wilayah sekelilingnya. Kabupaten Demak dan Kota Salatiga yang pada periode sebelumnya memiliki laju lebih tinggi, pada periode ini lajunya turun cukup signifikan, yaitu dari 1,83% ke 0,88% dan dari 5,44% ke 1,30%. Beberapa studi menunjukkan terjadi migrasi usia produktif yang cukup besar dari Kabupaten Demak dan wilayah lain di sekitarnya menuju ke kota yang lebih besar. Studi dari (Putra, 2010) mengungkapkan bahwa pertumbuhan total pelajar di Kota Demak semakin menurun tiap tahunnya. Begitu juga dengan data dari Demak Dalam Angka yang menunjukkan migrasi cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya terutama dalam kurun waktu 2006-2010.

Secara ringkas, pola laju pertumbuhan penduduk di kota lapis kedua pada periode 1990-2000 memperlihatkan bahwa masing-masing kota lapis kedua memiliki trend pertumbuhan penduduk yang berbeda-beda. Secara umum, jumlah penduduk pada kota lapis kedua terus meningkat dengan laju yang lebih rendah dibandingkan rata-rata laju nasional dan wilayah sekelilingnya. Pada wilayah pinggiran tumbuh berbagai aktivitas ekonomi yang masih berhubungan erat dengan kota inti, terutama kegiatan industri dan perumahan skala besar. Penghuni perumahan skala besar pada daerah pinggiran merupakan pekerja dari kota inti yang melakukan

penglaju, seperti yang Firman, (1998) sebutkan bahwa salah satu ciri dari kawasan perkotaan besar (*mega urban*) adalah adanya pertumbuhan penglaju (*commuters*) dan peningkatan waktu bagi para penglaju. Tingginya harga lahan di kota inti, membuat kegiatan industri bergeser ke wilayah pinggiran. Jones, et.al, (1999) menyebut proses ini sebagai “metropolitan turnaround”, yaitu penurunan laju pertumbuhan penduduk pada kota inti seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan dalam beberapa hal Kota Semarang dan Makassar.

Tingkat Urbanisasi Pada Kota Kedua Di Indonesia

Tingkat urbanisasi suatu wilayah dilihat dari proporsi penduduk perkotaan (*urban population*) terhadap penduduk keseluruhan. Mengacu kepada Gardiner & Gardiner (2006) dalam konteks Indonesia, terdapat dua definisi tentang kota, yaitu pertama kota administratif dimana suatu wilayah (kota) memiliki status perkotaan resmi (kota otonom) dan kedua, kota secara fungsional, dimana sebuah desa dapat didefinisikan sebagai kota sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang dimaksud yaitu (1) kepadatan penduduk; (2) persentase permukiman terhadap sektor pertanian; (3) fasilitas perkotaan dan aksesibilitas kawasan (BPS, 2011). Badan Pusat Statistik menggunakan teknik *scoring* dalam menentukan klasifikasi *urban* (perkotaan) dan *rural* (perdesaan). Skor yang digunakan berkisar dari 1 sampai 8 untuk kepadatan penduduk dan persentase pertanian terhadap permukiman. Untuk kepadatan penduduk, skor 1 untuk kepadatan penduduk kurang dari 500 orang per kilometer dan 8 untuk kepadatan lebih besar dari 8.500 orang per kilometer. Untuk persentase pertanian terhadap permukiman, skor 1 untuk persentase lebih dari 70% dan 8 untuk persentase di bawah 5%. Sementara skor untuk akses terhadap fasilitas publik adalah 0 atau 1. Contohnya, fasilitas sekolah, skor 1 jika fasilitas sekolah tersedia dengan jarak kurang dari 2,5 kilometer dan sebaliknya, 0 jika tidak tersedia sekolah atau jaraknya lebih dari 2,5 kilometer. Untuk fasilitas pasar dan toko, skor 1 jika fasilitas tersebut tersedia dengan jarak kurang dari 2 kilometer. Sementara untuk fasilitas bioskop dan fasilitas kesehatan, skor 1 untuk ketersediaan fasilitas-fasilitas tersebut dengan jarak kurang dari 5 kilometer.

Secara agregat, jumlah penduduk perkotaan terbesar pada tahun 1990 dan 2000 dimiliki oleh Kawasan Perkotaan Surabaya, sementara pada tahun 2010, jumlah perkotaan terbesar bergeser ke Kawasan Perkotaan Bandung. Namun jika dilihat masing-masing kota lapis kedua, jumlah penduduk tertinggi

masih Kota Surabaya. Hal ini tidak terlepas dari pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kota Cimahi pada tahun 2001 dan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007. Perubahan status administratif Kota Cimahi secara langsung menambah jumlah penduduk perkotaan di Kawasan Perkotaan Bandung, begitu juga dengan pembentukan Kabupaten Bandung Barat yang membuat dibangunnya fasilitas perkotaan sehingga mengubah status beberapa desa atau kecamatan menjadi bagian dari kawasan perkotaan.

Pertumbuhan penduduk perkotaan memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara periode tahun 1990-2000 dan 2000-2010. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang dimaksud disini adalah pertumbuhan di wilayah pinggiran kota lapis kedua (*peripheral area*), karena sebagai kota otonom, kota-kota inti sudah memiliki penduduk perkotaan 100%. Pada periode 1990-2000, wilayah pinggiran mengalami pertumbuhan yang

fantastis, bahkan tidak sedikit yang meningkat di atas 100%. Sementara untuk periode 2000-2010 pertumbuhan yang dialami tidak setinggi periode sebelumnya. Seperti yang terlihat pada Tabel 4, pada periode 1990-2000, kawasan perkotaan yang mengalami kenaikan jumlah penduduk perkotaan tertinggi adalah kawasan perkotaan Bandung (46,93%) disusul Surabaya (40,63%), Semarang (37, 87%), Medan (26,19%) dan Makassar (24,55%). Hal ini mengindikasikan pertumbuhan daerah perkotaan paling pesat di Kawasan Perkotaan Bandung dan Surabaya sebagai dampak dari industrialisasi yang masif. Pertumbuhan investasi cukup tinggi baik dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2000 investasi yang masuk ke Kawasan Perkotaan Surabaya mencapai lebih dari \$200 juta dan satu triliun rupiah. Sementara perkembangan Kota Bandung, tidak lepas dari perkembangan Kota Jakarta, dimana antara Kota Jakarta dan Bandung, seperti yang dikatakan Firman (2009), telah terbangun sabuk perkotaan (*urban belt*)

Tabel 4. Tingkat Urbanisasi *Secondary Cities* di Indonesia

	Secondary Cities and Surrounding Area	1990		Rate 1990-2000 (%)	2000		Rate 2000-2010 (%)	2010	
		Urban Population	Share (%)		Urban Population	Share (%)		Population	Share (%)
1	Gerbangkertosusila (Surabaya Metropolitan Area)								
	Surabaya City	2.473.272	100,00	4,94	2.595.359	100,00	6,57	2.765.908	100,00
	Gresik Regency	221.180	25,83	126,49	500.960	49,82	40,51	703.912	59,80
	Bangkalan Regency	109.546	14,59	58,44	173.566	21,56	23,80	214.875	23,68
	Mojokerto City	99.707	100,00	9,13	108.814	100,00	10,40	120.132	100,00
	Mojokerto Regency	170.483	21,66	122,89	379.984	41,85	30,37	495.402	48,40
	Sidoarjo Regency	586.107	50,22	128,51	1.339.311	85,69	32,31	1.772.043	91,10
	Lamongan Regency	103.435	9,05	88,64	195.122	16,51	25,38	244.642	20,74
	Surabaya Metropolitan Area	3.763.730	51,72	40,63	5.293.116	64,81	19,34	6.316.914	69,27
2	Bandung Metropolitan Area								
	Bandung City	2.058.122	100,00	3,80	2.136.260	100,00	12,11	2.394.873	100,00
	Cimahi City							541.139	100,00
	Bandung and West Bandung Regency	1.291.873	40,35	105,64	2.656.546	63,98	35,98	3.612.277	77,05
	Sumedang Regency	113.321	13,62	161,16	295.953	30,59	56,30	462.560	42,39
	Bandung Metropolitan Area	3.463.316	56,86	46,93	5.088.759	70,13	37,77	7.010.849	80,44
3	Mebidang (Medan Metropolitan Area)								
	Medan City	1.730.052	100,00	10,06	1.904.104	100,00	10,78	2.109.339	100,00
	Binjai City	181.866	100,00	17,52	213.725	100,00	15,11	246.010	100,00
	Deli Serdang Regency	596.933	37,26	74,36	1.040.794	53,12	30,27	1.355.844	75,78
	Karo Regency	46.562	18,05	41,76	66.005	23,26	37,49	90.748	25,89
	Medan Metropolitan Area	2.555.413	67,75	26,19	3.224.628	73,95	17,90	3.801.941	84,58
4	Kedungsepur (Semarang Metropolitan Area)								
	Semarang City	1.249.230	100,00	7,81	1.346.813	100,00	15,37	1.553.778	100,00
	Kendal Regency	165.606	20,73	115,27	356.508	41,96	21,14	431.865	47,95
	Demak Regency	92.227	11,21	189,48	266.976	27,42	48,89	397.498	37,54
	Ungaran (Semarang Regency)	139.997	17,82	94,11	271.755	32,62	36,58	371.157	39,86
	Salatiga City	98.012	100,00	54,40	151.326	100,00	13,05	171.067	100,00
	Purwodadi (Grobogan Regency)	122.805	10,70	48,14	181.925	14,34	17,92	214.529	16,39
	Semarang Metropolitan Area	1.867.877	38,10	37,87	2.575.303	47,49	21,92	3.139.894	53,00
5	Mamminasata (Makassar Metropolitan Area)								
	Makassar City	944.372	100,00	16,48	1.100.019	100,00	21,76	1.339.374	100,00
	Maros Regency	27.451	11,45	87,38	51.438	18,90	96,16	100.900	31,71
	Sungguminasa (Gowa Regency)	64.114	14,94	113,56	136.925	26,70	68,65	230.924	35,40
	Takalar Regency	24.328	11,80	32,10	32.137	13,99	76,85	56.834	21,11
	Makassar Metropolitan Area	1.060.265	58,28	24,55	1.320.519	62,44	30,86	1.728.032	67,00

Sumber: diolah dari National Population Censuses 1990, 2000 and 2010

sepanjang 200 km. Limbangan aktivitas perkotaan Jakarta sudah mencapai Kota Bandung sejak tahun 1980an.

Pada periode berikutnya, tahun 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk perkotaan di kawasan perkotaan kota kedua melambat, kecuali untuk Kota Makassar. Pertumbuhan tertinggi masih berada di Kawasan Perkotaan Bandung dan selanjutnya Kota Makassar. Kota Makassar menjadi menarik karena selain karena satu-satunya kawasan perkotaan dengan pertumbuhan yang meningkat, kawasan perkotaan ini juga merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk perkotaan yang paling kecil dengan kecepatan tumbuh tinggi. Kondisi ini juga terkait dengan proporsi penduduk perkotaan pada masing-masing wilayah (*urban share*), dimana *urban share* wilayah pinggiran Kawasan perkotaan Makassar masih rendah dibandingkan dengan kawasan perkotaan lain (lihat Tabel 4). Kondisi ini tidak terlepas dari struktur ekonomi dari wilayah yang menjadi bagian dari kawasan perkotaan Makassar, dimana proporsi sektor pertanian masih cukup besar. Sejarah pembangunan pada negara berkembang menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi yang lebih tinggi dapat terjadi hanya ketika struktur ekonomi suatu wilayah bergeser dari sektor pertanian (primer) menuju sektor sekunder atau tersier (Lo and Salih, 1987 dalam Firman, 2007).

Jika dilihat trend perkembangan kota lapis kedua di Indonesia sampai saat ini, perkembangannya menyerupai perkembangan kota utama. Namun dibandingkan dengan kota utama, kota lapis kedua memiliki beragam tantangan yang membuatnya sulit untuk mampu mengejar kota utama. Berbagai keunggulan dimiliki oleh kota utama, terutama dari segi kebijakan pembangunan terutama terkait dengan kebijakan tingkat pelayanan fasilitas perkotaan. Kota utama pasti memiliki semua fasilitas utama suatu negara. Selain “bersaing” dengan kota utama, kota lapis kedua juga harus bersaing dengan sesama kota lapis kedua lainnya dalam mendapatkan fasilitas yang umumnya disebar oleh negara. Untuk itu kota lapis kedua membutuhkan spesialisasi dalam perkembangannya sehingga mampu bertahan dan berkembang mengimbangi perkembangan kota utama.

KESIMPULAN

Jumlah penduduk pada kota-kota lapis kedua terus meningkat, namun rata-rata laju pertumbuhan per tahunnya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Nasional serta dengan wilayah (kabupaten/kota) sekitarnya. Wilayah

pinggiran tumbuh lebih cepat sebagai luapan aktivitas ekonomi dari kota utama membentuk kawasan perkotaan yang luas melewati batas administrasi. Jumlah penduduk perkotaan juga terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannya semakin melambat. Pada periode 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan periode 2000-2010, meskipun demikian urbanisasi merupakan suatu proses yang terjadi beriringan dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat sehingga cenderung akan terus terjadi.

Fenomena yang terjadi pada kota lapis kedua ini sudah terjadi terlebih dahulu pada Kota Jakarta sebagai kota utama, seperti yang dijelaskan oleh Firman, dkk. (2007), pertumbuhan cepat pada daerah pinggiran Jakarta mengalami percepatan pertumbuhan sejak tahun 1980. Namun pertumbuhan kota lapis kedua sulit untuk bisa menyamai pertumbuhan dari kota utama karena perbedaan kekuatan politik yang dimiliki. Ibukota negara memiliki keuntungan sebagai satu-satunya kota nasional dalam konteks politik dan administrasi serta dihubungkan dengan tingkatan jasa pelayanan yang lebih tinggi, seperti bandara internasional, bank, dan bursa saham. Kota lapis kedua atau kota lapis ketiga perlu berkompetisi dengan kota lainnya untuk mendapatkan pengakuan dan sumber daya. Kasus kota lapis kedua, dapat menjadi pelajaran bagi kota-kota lain yang saat ini masih belum termasuk ke dalam definisi kota kedua, terutama berkaitan dengan prediksi ke depan menjadi kawasan metropolitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agency, C. S. 2010. *Indonesia's Population by Province and Regency/City. Results of Population Census 2010*. Jakarta: Central Statistic Agency.
- BPS. 1990. *Penduduk Indonesia Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Sensus Penduduk 1990*. Jakarta.
- BPS. 2000. *Penduduk Indonesia Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Sensus Penduduk 2010*. Jakarta.
- Cohen, B. 2006. Urbanization in Developing Countries: current trends, future projections, and key challenges for sustainability. *Technology in Society* , 63-80.
- Erickcek, G., & McKinney, H. 2006. Small cities blues: looking for growth factors in small and medium sized cities. *Economic Development Quarterly* , 232-258.

- Firman, T. 2003. The Spatial Pattern of Population Growth in Java, 1990-2000: Continuity and Change in Extended Metropolitan Region Formation. *International Development Planning Review* 25(1) , 53-66.
- Firman, T. 1998. Urban Restructuring in Jakarta Metropolitan Area: A Phenomenon of Global City in Asia. *Cities* 15(4) , 229-224
- Firman, T., Kombaitan, B., & Pradono. 2007. The Dynamics of Indonesia's Urbanization 1980-2006. *Urban Policy and Research* , 433-454.
- Gardiner, P., & Gardiner, M. 2006. Ecology of Population Dynamic in Indonesian Metropolitan Areas. *Unpublished Paper* .
- Goldblum, C., & Wong, T. 2000. Growth, crisis and spatial change: a study of haphazard urbanization in Jakarta, Indonesia. *Land Use Policy* , 29-37.
- Jones, G., Tsay, C., & Bajracharya, B. 1999. *Demography and Employment Change in Megacities of South East and East Asia*. Canberra: Research School of Social Sciences, Australian National University.
- McGee, T., & Robinson, I. 1995. *The Mega-Urban Region of Southeast Asia*. Vancouver: University of British Columbia Press.
- Morrison, P. 1980. *Population Movements: Their Forms and Function in Urbanization and Development*. Belgium: Liege: IUSSP.
- Ningsih, S. 2002. Urbanisasi dan Kaitannya dengan Hukum dan Kependudukan.
- Putra, D. P. 2010. *Book House di Kota Demak*. Semarang: Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
- Rimmer, P. J., & Dick, H. 2009. *The City in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press, National University of Singapore.
- Roberts, B., & Hohmann, R . P. 2014. *The System of Secondary Cities: The Neglected Drivers of Urbanising Economies*. Uganda: CIVIS.
- Satterthwaite, D., & Tacoli, C. 2003. *The Urban Part of Rural Development: The Role of Small and Intermediate Urban Centers in Regional Development and Poverty Reduction*. Londong: International Institute for Environment and Development (IIED).
- United Nation. 2014. *World Urbanization Prospect: The 2014 Revision*. New York: Uniten Nation.
- Webster, D. 2011. The future of peri-urbanization in developing countries: Colliding transnational and local forces. *Unpublished paper* .

KESENJANGAN UPAH ANTAR JENDER DI INDONESIA: GLASS CEILING ATAU STICKY FLOOR?

(GENDER WAGE GAP IN INDONESIA: GLASS CEILING OR STICKY FLOOR?)

Hennigusnia

Peneliti Pertama Pusat Litbang Ketenagakerjaan Kemenakertrans R.I.
henigusnia@gmail.com

Abstract

This study looked the gender wage gap in Indonesia from 2008-2012. In addition to looking at the wage gap average level, the study also looked at the wage gap at different quantile of the wage distribution, so it can be known whether the wage gap widened at the top of the wage distribution (indicative of “glass ceiling”) or widened at the bottom of the wage distribution (“sticky floor”). This study used data Sakernas 2008-2012 to estimate the wage equation of men and women using OLS standard. Then, the Oaxaca-Blinder decomposition method (1973) is used to determine the magnitude of the gender wage gap based on gender that caused by the characteristic factors (explained effect) and the discrimination factor (unexplained effect). As for determining the gender wage gap in different quantile of the wage distribution using quantile regression and applying decomposition Machado – Mata (2005). This study found that the gender wage gap was still dominated by factors that can not be explained (unexplained) and was indicated as discrimination, both at the average level and in each quantile of the wage distribution. This study also found evidence of sticky floor in Indonesia.

Keywords: Wage Decomposition, Wage Diskriminasi, Quantile Regressions, Glass Ceiling, Sticky Floor

Abstrak

Tulisan ini melihat kesenjangan upah antar jender di Indonesia tahun 2008-2012. Selain melihat kesenjangan upah pada tingkat rata-rata, penelitian ini juga akan melihat kesenjangan upah di kuantil yang berbeda dari distribusi upah, sehingga dapat diketahui apakah kesenjangan upah melebar di bagian atas distribusi upah (diindikasikan “glass ceiling”) atau melebar di bagian bawah distribusi upah (“sticky floor”). Penelitian ini menggunakan data Sakernas 2008-2012 untuk mengestimasi persamaan upah laki-laki dan perempuan menggunakan OLS standar. Metode dekomposisi Oaxaca-Blinder (1973) digunakan untuk menentukan besarnya rata-rata kesenjangan upah menurut jender yang disebabkan oleh faktor karakteristik (*explained effect*) dan faktor diskriminasi (*unexplained effect*). Sedangkan untuk menentukan kesenjangan upah menurut jender di kuantil yang berbeda dari distribusi upah menggunakan regresi kuantil dan menerapkan dekomposisi Machado-Mata (2005). Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan upah menurut jender masih didominasi oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained*) dan diindikasikan sebagai diskriminasi, baik pada tingkat rata-rata maupun di setiap kuantil dalam distribusi upah. Penelitian ini juga menemukan adanya bukti lantai lengket (*sticky floor*) di Indonesia.

Kata Kunci: Dekomposisi Upah, Diskriminasi Upah, Regresi Kuantil, Glass Ceiling, Sticky Floor

PENDAHULUAN

Kesenjangan upah menurut jender masih terjadi hampir di seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kesenjangan upah ini menunjukkan bahwa upah perempuan lebih rendah dari laki-laki. Anker (1998) dengan menggunakan data ILO tahun 1990 menjelaskan bahwa upah perempuan yang lebih rendah dari laki-laki terjadi hampir di seluruh negara di dunia, dan perbedaan upah tersebut terjadi pada

semua pola upah, baik harian, mingguan, maupun bulanan, dan terjadi di seluruh sektor non pertanian maupun sektor manufaktur secara terpisah. Hasil temuan International Labor Organization (2013) menyebutkan bahwa masih ada kesenjangan upah antar gender di Indonesia dengan selisih hingga 19% pada tahun 2012. Kesenjangan upah antar gender tertinggi terjadi di Azerbaijan yaitu sebesar 46%, dan terendah adalah Paraguay dengan 4%. Sedangkan rata-rata jumlah kesenjangan antar gender di dunia

masih mencapai angka 18%. Kesenjangan upah antar jender secara tidak langsung menyatakan polarisasi dalam distribusi upah laki-laki dan perempuan.

Perkembangan rata-rata upah antar jender di Indonesia menunjukkan dengan jelas adanya ketidaksetaraan upah antar jender. Pirmana (2006) menunjukkan dengan jelas adanya ketidaksetaraan jender yang signifikan dalam upah di Indonesia. Menggunakan data dari Sakernas tahun 1996, 1999, 2002, dan 2004 serta metode dekomposisi Oaxaca-Blinder, hasil dari dekomposisi kesenjangan pendapatan ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kesenjangan pendapatan antara jender adalah sekitar 41,6% disebabkan oleh perbedaan karakteristik dan sekitar 58,4% disebabkan oleh faktor tidak teramati dan tidak dapat dijelaskan (*unexplained*). Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar kesenjangan upah di Indonesia disebabkan oleh faktor yang tidak teramati dan tidak dapat dijelaskan (*unexplained*) yang diindikasikan sebagai diskriminasi.

Banyak faktor karakteristik yang diduga sebagai penyebab adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Rendahnya upah perempuan dibandingkan laki-laki dikarenakan investasi perempuan pada modal manusia seperti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja yang memang lebih rendah dibandingkan laki-laki (Jacobsen, 1994). Preferensi perempuan dalam memilih jenis pekerjaan juga menjadi salah satu penyebab perbedaan upah, dimana perempuan lebih memilih pekerjaan yang nyaman dan tidak beresiko seperti perawat dan guru. Jumlah jam kerja juga dapat menyebabkan perbedaan pendapatan, dimana norma yang berlaku di sebagian besar negara perempuan adalah penanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak. Kondisi tersebut wajar apabila jam kerja perempuan di pasar kerja lebih sedikit dibandingkan laki-laki karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mengurus keluarga. Hal ini mengakibatkan pendapatan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Becker, 1985).

Penelitian empirik mengenai kesenjangan upah antar jender telah banyak dilakukan, hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa diskriminasi upah menurut jender masih terjadi di berbagai negara. Hasil penelitian diskriminasi upah merupakan salah satu informasi terpenting dari proses dan praktik pasar tenaga kerja yang diskriminatif. Di pasar tenaga kerja, diskriminasi terjadi disebabkan oleh perbedaan upah yang terjadi ketika suatu kelompok pekerja dibayar lebih rendah dibandingkan kelompok lain pada pekerjaan yang sama dan perbedaan upah tersebut

tidak ditentukan oleh perbedaan produktivitas. Diskriminasi ini dikenal dengan diskriminasi upah (*wages discrimination*) (Jacobsen, 1994). Goldin dan Polachek (1987) mendefinisikan diskriminasi upah sebagai bagian dari kesenjangan upah yang tidak dapat dijelaskan oleh karakteristik individu. Dengan demikian, diskriminasi upah antar jender adalah kesenjangan upah perempuan dan laki-laki setelah semua faktor dikendalikan, misalnya tingkat pendidikan dan ketrampilan.

Selama dekade terakhir, fokus penelitian tentang kesenjangan upah antar jender telah bergeser dari rata-rata menjadi pola di sepanjang distribusi upah. Menghitung dan mendekomposisi kesenjangan upah antar jender pada tingkat rata-rata merupakan titik awal dalam menilai kesenjangan upah antar jender. Keuntungan utama dari hal ini adalah bahwa teknik tersebut menawarkan sebuah metode sederhana untuk menghitung ketidaksetaraan upah antar jender. Namun demikian, terdapat kelemahan dari penggunaan metode dekomposisi kesenjangan upah antar jender pada tingkat rata-rata. Pertama, orang yang berbeda mungkin menerima *return* atau balas jasa yang berbeda terhadap karakteristik mereka berdasarkan posisi mereka pada distribusi upah. Kedua, adanya perbedaan tingkat diskriminasi yang disebabkan oleh posisi mereka pada distribusi upah. Kedua alasan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan upah jender pada rata-rata tidak dapat diasumsikan berlaku untuk seluruh distribusi upah.

Beberapa penelitian tentang kesenjangan upah antar jender yang fokus dalam menentukan nilai kesenjangan upah antar jender di seluruh distribusi upah antara lain, Albrecht, dkk. (2004), de la Rica, dkk. (2005), Arulampalam, dkk. (2006), Chi dan Li (2007), Gunewardena (2008), dan Khanna (2012). Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ada efek langit-langit kaca (*glass ceiling effect*) atau efek lantai lengket (*sticky floor effect*). Langit-langit kaca adalah kondisi di mana kesenjangan upah antar jender melebar di bagian atas distribusi upah, fenomena ini merupakan hambatan yang membatasi kelanjutan karir wanita mencapai posisi yang lebih tinggi (Arulampalam et al., 2006). Meskipun dalam penelitian sebelumnya tidak eksplisit mengatakan pekerja wanita tidak dimungkinkan untuk meraih posisi puncak, namun realita yang ada menunjukkan hal yang sebaliknya. Sementara itu, lantai lengket (*sticky floor*) dipandang sebagai skenario kebalikan dari *glass ceiling*. Booth, Francesconi, dan Frank (2003) dalam Arulampalam et al. (2007) mendefinisikan *Sticky Floor* sebagai kesenjangan upah menurut jender yang melebar di

bagian bawah distribusi upah. Fenomena lantai lengket (*sticky floor*) dapat terjadi karena distribusi upah mencerminkan segmentasi pasar tenaga kerja, dengan pekerjaan informal menempati ujung bawah distribusi (Pianto, Pianto dan Arias (2004) dalam Gunewardena (2008)). Lantai lengket (*sticky floor*) mencerminkan adanya hambatan terhadap akses ke pekerjaan yang baik untuk kelompok yang kurang beruntung.

Di Indonesia, penelitian yang mengukur kesenjangan upah antar jender di berbagai titik distribusi upah masih sulit ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, baik dikarenakan oleh perbedaan karakteristik yang diamati maupun perbedaan yang disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan (diskriminasi). Selain melihat kesenjangan upah pada tingkat rata-rata, penelitian ini juga akan melihat kesenjangan upah pada titik-titik distribusi upah, sehingga dapat diketahui apakah kesenjangan upah lebih tinggi pada titik distribusi upah bagian atas “*glass ceiling*” atau titik distribusi upah bagian bawah “*sticky floor*”. Secara spesifik kesenjangan upah jender pada tingkat rata-rata diukur menggunakan metode dekomposisi Oaxaca – Blinder (1973), dan kesenjangan upah jender pada titik titik distribusi upah dengan menggunakan metode dekomposisi yang diperkenalkan oleh Machado Mata (2005).

Metode Dekomposisi Blinder-Oaxaca

Untuk mendapatkan kesenjangan upah berdasarkan jender, terlebih dahulu harus dilakukan estimasi terhadap fungsi upah. Model persamaan upah mengacu pada *basic* model persamaan Oaxaca (1973). Bentuk persamaan upah laki-laki dan upah perempuan adalah sebagai berikut:

$$\ln W_{im} = \beta_m X_{im} + \mu_{im} \dots \dots \dots (1.1)$$

$$\ln W_{if} = \beta_f X_{if} + \mu_{if} \dots \dots \dots (1.2)$$

dimana $\ln W_i$ merupakan natural logaritma dari upah yang diterima oleh pekerja laki-laki (m) dan perempuan (f), β dan μ merupakan koefisien regresi upah dan *error* laki-laki (m) dan perempuan (f). Prosedur yang digunakan untuk mengestimasi persamaandi atas adalah menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Dengan menggunakan OLS, persamaan (1.1) dan (1.2) menghasilkan estimasi sebagai berikut:

$$\ln \bar{W}_m = \hat{\beta}_m \bar{X}_m \dots \dots \dots (1.3)$$

$$\ln \bar{W}_f = \hat{\beta}_f \bar{X}_f \dots \dots \dots (1.4)$$

Kesenjangan rata-rata upah antara laki-laki dan perempuan dapat ditentukan dengan mengurangi persamaan (1.3) dan (1.4), sehingga dihasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\Delta \bar{W} = \ln \bar{W}_m - \ln \bar{W}_f = \hat{\beta}_m \bar{X}_m - \hat{\beta}_f \bar{X}_f \dots \dots \dots (1.5)$$

Untuk mendekomposisi total perbedaan upah, persamaan (3.5) ditambah dan dikurangi dengan rata-rata upah kontrafaktual. Seperti yang dijelaskan oleh Khanna (2012), bahwa titik awal dari dekomposisi Oaxaca-Blinder ini adalah penciptaan sebuah *counterfactual*. Rata-rata upah *counterfactual* dengan struktur upah non-diskriminatif yang berlaku di pasar dihadapi oleh laki-laki, yaitu jika perempuan harus dibayar sesuai dengan struktur upah laki-laki, maka rata-rata upah bagi seorang perempuan akan diwakili oleh:

$$CF_1 = \bar{X}_f \hat{\beta}_m$$

menambahkan dan mengurangi CF_1 ke persamaan (3.5), maka diperoleh:

$$\Delta \bar{W} = \ln \bar{W}_m - \ln \bar{W}_f = \underbrace{(\hat{\beta}_m - \hat{\beta}_f) \bar{X}_f}_{\text{"D" Unexplained}} + \underbrace{(\bar{X}_m - \bar{X}_f) \hat{\beta}_m}_{\text{"E" Explained}} \dots \dots \dots (1.6)$$

Bagian pertama $((\hat{\beta}_m - \hat{\beta}_f) \bar{X}_f)$ dari dekomposisi upah adalah jumlah perbedaan yang timbul dari *return* atau balas jasa yang berbeda dari laki-laki dan perempuan terhadap karakteristik pasar tenaga kerja yang mereka miliki. Perbedaan koefisien mewakili kesenjangan upah riil menurut jender yang tidak dapat dijelaskan “*unexplained*” dan ini diindikasikan sebagai komponen diskriminasi (D). Bagian kedua $(\bar{X}_m - \bar{X}_f) \hat{\beta}_m$ merupakan selisih rata-rata logaritma upah yang disebabkan perbedaan tingkat rata-rata dari kovariat laki-laki dan perempuan. Ini adalah komponen dijelaskan (*Explained*) dari rata-rata log kesenjangan upah menurut jenis kelamin.

Dekomposisi juga dapat dilakukan menggunakan upah *counterfactual* alternatif, yaitu struktur upah non-diskriminatif yang berlaku di pasar dihadapi oleh perempuan. Jika laki-laki harus dibayar sesuai dengan struktur upah perempuan, maka rata-rata upah bagi seorang laki-laki akan diwakili oleh:

$$CF_2 = \bar{X}_m \hat{\beta}_f$$

menambahkan dan mengurangi CF_2 ke persamaan (3.5), maka diperoleh:

$$\Delta \bar{W} = \ln \bar{W}_m - \ln \bar{W}_f = \underbrace{(\hat{\beta}_m - \hat{\beta}_f) \bar{X}_m}_{\text{"D" Unexplained}} + \underbrace{(\bar{X}_m - \bar{X}_f) \hat{\beta}_f}_{\text{"E" Explained}} \dots \dots \dots (1.7)$$

Upah *counterfactual* yang ketiga yaitu dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari dua set koefisien. Cotton (1988) menggunakan proporsi sampel masing-masing kelompok sebagai bobot, yaitu $\hat{\beta}_c = \rho_m \hat{\beta}_m + \rho_f \hat{\beta}_f$, di mana ρ_m dan ρ_f adalah proporsi sampel laki-laki dan wanita.

Dekomposisi dari metode ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Delta \bar{W} &= \ln \bar{W}_m - \ln \bar{W}_f = (\beta_m \bar{X}_m) - (\beta_f \bar{X}_f) - (\bar{X}_m - \bar{X}_f) \beta_c + (\bar{X}_m - \bar{X}_f) \beta_c \\ \bar{W} &= \ln \bar{W}_m - \ln \bar{W}_f = \underbrace{(\beta_m - \beta_c) \bar{X}_m}_{\text{Male treatment Advantage}} + \underbrace{(\beta_c - \beta_f) \bar{X}_f}_{\text{Female treatment Advantage}} + \underbrace{(\bar{X}_m - \bar{X}_f) \beta_c}_{\text{"E" Explained}} \dots \dots \dots (1.8) \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{"D" Unexplained}} \end{aligned}$$

Metode Dekomposisi Machado Mata

Penelitian ini juga menggunakan regresi kuantil. Regresi kuantil diperkenalkan oleh Koenker dan Bassett (1978) untuk mempelajari efek marginal dari kovariat pada variabel dependen pada berbagai titik dalam distribusi, bukan hanya pada rata-rata. Regresi kuantil lebih menawarkan fleksibilitas daripada OLS. Hal tersebut memungkinkan efek kovariat pada variabel dependen berubah pada titik yang berbeda (kuantil) dari distribusi. Asumsinya adalah bahwa kuantil dari variabel dependen W linear pada kovariat. Oleh karena itu, distribusi kuantil θ^{th} ditentukan oleh:

$$Q_{\theta}(W_i|X_i) = X_i \beta_{\theta}, \quad \theta \in (0,1) \dots \dots \dots (1.9)$$

di mana koefisien β_{θ} adalah kemiringan garis kuantil yang memberikan pengaruh perubahan X_i pada kuantil bersyarat θ^{th} dari W_i .

Seperti yang ditunjukkan oleh Koenker dan Bassett (1978), estimator regresi kuantil dari β_{θ} memecahkan masalah minimisasi berikut:

$$\beta_{\theta} = \min_{\beta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \rho_{\theta}(W_i - X_i \beta_{\theta}) \dots \dots \dots (1.10)$$

di mana,

$$\rho_{\theta}(u) = \begin{cases} \theta * u, & u \geq 0 \\ (\theta - 1) * u, & u < 0 \end{cases}$$

$\rho_{\theta}(u)$ disebut juga sebagai *Check Function* dan error dugaan dari W adalah $e_i = W_i - X_i \beta_{\theta}$. Menurut Buchinsky (1998), keuntungan dari metode ini untuk memberikan perkiraan yang kuat dari vektor koefisien, yang membuat mereka tidak sensitif terhadap outlier dalam variabel independen. Selain itu, suatu perkiraan yang lebih efisien dari model OLS ketika *error* tidak terdistribusi normal sehingga memperjelas efek variabel independen terhadap variabel dependen seluruh distribusinya. Mengikuti metode Buchinsky (1998), maka setiap kuantil akan diperkirakan matriks varians-kovarians koefisien dengan metode bootstrap (metode resampling untuk

menghitung selang kepercayaan bagi β), di mana perkiraan dari kuantil dilakukan secara bersamaan.

Seperti dekomposisi Oaxaca-Blinder yang mengandalkan pada konstruksi rata-rata log upah *counterfactual*, dekomposisi Machado dan Mata dalam rangka mendekomposisi perbedaan antara dua distribusi upah juga membangun upah *counterfactual* di seluruh distribusi upah. Pada dasarnya, dekomposisi Machado dan Mata adalah generalisasi dari dekomposisi rata-rata Oaxaca-Blinder untuk dekomposisi kuantil. Kesenjangan upah gender di masing-masing kuantil, merupakan perbedaan antara distribusi log upah laki-laki dan log upah perempuan di kuantil tersebut, yang kemudian dapat didekomposisi menggunakan distribusi upah kontrafaktual. Prosedur dekomposisi menggunakan simulasi sebagai berikut:

1. Menghasilkan *random sample* berukuran n dari distribusi seragam $U[0,1]: u_1 u_2 \dots, u_n$.
2. Mengestimasi koefisien regresi kuantil pada setiap $u_1 u_2 \dots, u_n$ secara terpisah untuk pekerja laki-laki dan perempuan: $\{\hat{\beta}_{mu_j}\}_{j=1}^n$, dan $\{\hat{\beta}_{fu_j}\}_{j=1}^n$
3. Mengambil *random sample* dengan *replacement* untuk ukuran $n = 1000$ dari distribusi kovariat laki-laki dan perempuan secara terpisah. *Random sample* dinotasikan dengan: $\{\tilde{X}_{mj}\}_{j=1}^n$, dan $\{\tilde{X}_{fj}\}_{j=1}^n$
4. Distribusi *counterfactual* sebagai berikut $\{Y_j^{\text{cf}} = \tilde{X}_{mj} \hat{\beta}_{fu_j}\}$ atau $\{Y_j^{\text{cf}} = \tilde{X}_{fj} \hat{\beta}_{mu_j}\}$ untuk $j = 1, 2, \dots, n$.

Distribusi upah *counterfactual* pertama merupakan distribusi log upah laki-laki yang dibayar sesuai dengan struktur upah perempuan, karena menggunakan kovariat laki-laki dan *returns of women*. Distribusi upah *counterfactual* kedua merupakan kasus di mana perempuan mempertahankan karakteristik mereka dan mendapatkan upah seperti laki-laki.

Pada kuantil θ^{th} , perbedaan antara estimasi kuantil bersyarat log upah untuk pria, $\hat{Q}_m(\theta)$, dan estimasi kuantil bersyarat dari log upah perempuan, $\hat{Q}_f(\theta)$, bisa di dekomposisi sebagai berikut:

$$\hat{Q}_m(\theta) - \hat{Q}_f(\theta) = \underbrace{[\hat{Q}_m(\theta) - \hat{Q}_{cf}(\theta)]}_{\text{"D" Unexplained}} + \underbrace{[\hat{Q}_{cf}(\theta) - \hat{Q}_f(\theta)]}_{\text{"E" Explained}} \dots (1.11)$$

di mana $\hat{Q}_{cf}(\theta)$ adalah estimasi kuantil tak bersyarat log upah kontrafakta dengan acuan karakteristik perempuan dan struktur upah laki-laki. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2008 sampai dengan 2012 dengan unit analisis anggota rumah tangga usia 15 sampai dengan 65 tahun dan masuk dalam kelompok angkatan kerja, baik perempuan maupun laki-laki. Variabel dependen untuk analisis kesenjangan upah pekerja menurut jender akan diestimasi dengan menggunakan upah riil per jam. Upah per jam lebih tepat digunakan dibandingkan dengan upah per bulan dalam mengestimasi upah pekerja karena jumlah jam kerja wanita cenderung lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, upah riil dapat lebih mencerminkan tingkat upah buruh dengan lebih realistis. Sementara itu, variabel Independen yang akan digunakan antara lain umur, masa kerja, pendidikan, status tempat tinggal, lapangan pekerjaan, wilayah jenis pekerjaan, dan status perkawinan.

HASIL PERHITUNGAN DEKOMPOSISI OAXACA-BLINDER DAN MACHADO MATA

Hasil Dekomposisi Oaxaca-Blinder

Tabel 1. dan tabel 2. di Lampiran menyajikan hasil dekomposisi Oaxaca-Blinder. Kolom pertama mengacu pada kasus yang mengasumsikan bahwa struktur upah non-diskriminatif pada laki-laki (persamaan 1.6), kolom kedua mengacu pada kasus di mana koefisien perempuan yang digunakan (persamaan 1.7), dan kolom ketiga adalah struktur upah koefisien laki-laki dan perempuan (*pooled*) (persamaan 1.8). Sementara itu, baris pertama dan kedua dari tabel menyajikan rata-rata log kesenjangan upah riil menurut jenis kelamin, baris ketiga dan keempat menjelaskan komponen *explained* ("E") dari kesenjangan upah, serta baris kelima dan keenam menjelaskan komponen diskriminasi ("D"). Baris berikutnya menguraikan koefisien dari karakteristik pekerja pada *explained* dan *unexplained*.

Hasil dekomposisi Oaxaca-Blinder menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan log upah riil menurut jender pada tahun 2008 sampai dengan 2012 sebesar 0.208 - 0.261, artinya laki-laki menerima tingkat upah riil 20.8% - 26.1% lebih tinggi dari perempuan. Kesenjangan upah riil antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan faktor-faktor karakteristik (*explained*) seperti umur, pendidikan, pelatihan, masa kerja, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, serta dapat disebabkan oleh

perbedaan yang muncul karena pengaruh faktor-faktor yang tidak teramati atau tidak dapat dijelaskan (*unexplained*) terhadap perbedaan upah yang diindikasikan sebagai diskriminasi. Dalam rentang waktu 5 tahun tersebut tidak menunjukkan penurunan, bahkan rata-rata kesenjangan upah riil menurut jender terendah yang tercatat pada tahun 2008 sebesar 20.8% meningkat menjadi 26.1% pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010 hingga 2012, rata-rata kesenjangan upah riil menurut jender berkisar 22%. Komponen diskriminasi (*unexplained*) hampir sepenuhnya bertanggung jawab atas keseluruhan kesenjangan upah riil antara laki-laki dan perempuan, terutama pada tahun 2010 hingga 2012. Lebih lanjut, persentase komponen diskriminasi (*unexplained*) dari kesenjangan upah riil menurut jender lebih dari seratus persen. Artinya, jika tanpa adanya diskriminasi maka perempuan akan memperoleh upah yang lebih tinggi dari pada laki-laki. Dengan demikian, karakteristik individu dari perempuan tidak seluruhnya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, tetapi itu adalah *return* pada karakteristik pekerja (pengaruh koefisien) yang menyebabkan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan terbuka lebar.

Secara rinci, rata-rata kesenjangan upah riil menurut jender pada Tabel 1. dan 2. memperlihatkan bahwa hampir separuh variabel dari umur, daerah tempat tinggal, pendidikan, pelatihan, masa kerja, jenis pekerjaan/jabatan, dan kelompok dummy lapangan pekerjaan utama menunjukkan tanda negatif pada koefisien karakteristik (*explained*). Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pekerja perempuan hampir sama dengan laki-laki, bahkan beberapa karakteristik perempuan cenderung lebih tinggi dari laki-laki. Misalnya kategori pendidikan pada koefisien karakteristik (*explained*) menunjukkan nilai negatif pada SMA tahun 2008 – 2010 dan perguruan tinggi pada tahun 2011 - 2012, kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja perempuan yang tamat SMA pada tahun 2008 – 2010 dan tamat perguruan tinggi pada tahun 2011 – 2012 lebih tinggi dari pada pekerja laki-laki, hal ini memberi gambaran bahwa perempuan berhasil menikmati dunia pendidikan terutama pendidikan tinggi. Meluasnya kesempatan mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi ini, memungkinkan penyempitan jurang kesenjangan upah antar jender. Tabel 1. dan 2. menunjukkan bahwa pada tahun 2008 – 2012 kategori pekerja profesional dan pekerja juru tulis memiliki koefisien karakteristik (*explained*) negatif, kondisi ini menyiratkan bahwa pekerja perempuan lebih diterima dan mampu bersaing bahkan mendominasi jenis pekerjaan/jabatan ini dibandingkan pekerja laki-laki, sehingga kondisi ini jugalah yang dapat menyempitkan kesenjangan upah

antar jender. Keadaan seperti ini menjelaskan bahwa perempuan telah memiliki karakteristik yang sama dengan laki-laki bahkan dalam beberapa hal memiliki karakteristik yang lebih baik daripada laki-laki, sehingga tanpa adanya diskriminasi, perempuan akan memperoleh upah hampir sama bahkan lebih tinggi dari laki-laki karena keunggulan karakteristik mereka. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Feridhanusetyawan et al. (2001) dan Pirmana (2006) yang menunjukkan bahwa karakteristik pekerja perempuan kurang dari laki-laki, sehingga upah perempuan lebih rendah dari laki-laki. Penelitian lebih lanjut yang mencakup tahun yang digunakan oleh Pirmana dan penelitian ini dapat menunjukkan profil perempuan yang lebih komprehensif atas kesenjangan upah antar jender.

Tanda dan besaran untuk efek *unexplained* (diindikasikan sebagai diskriminasi) dari kesenjangan upah antar jender pada tahun 2008 sampai dengan 2012 lebih bervariasi seperti yang terdapat pada Tabel 1. dan 2. di Lampiran. Efek negatif *unexplained* pada variabel tertentu menunjukkan bahwa variabel terkait memberi kontribusi untuk menyetarakan. Dalam hal menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, Tabel 1. dan 2. di Lampiran menunjukkan bahwa *return* ke pendidikan lebih tinggi bagi perempuan daripada laki-laki. Pengurangan diskriminasi karena pendidikan sangat kuat pada tahun 2009, terutama untuk tingkat SMA. Daerah tempat tinggal di kota juga berkontribusi terhadap efek diskriminasi yang lebih kecil. Demikian pula untuk umur kuadrat (*age square*) dan masa kerja sebagai proksi dari pengalaman, memberikan banyak kontribusi dalam mengurangi kesenjangan upah riil antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk kelompok dummy jenis pekerjaan/jabatan dan lapangan pekerjaan utama, tanda dan besaran efek *explained* berbeda antara tahun 2008 sampai dengan 2012. Misalnya pada tahun 2008 semua kelompok dummy jenis pekerjaan/jabatan efek *explained* bertanda negatif, sedangkan pada tahun 2008 dan 2012 sebaliknya. Efek *explained* bertanda positif mengartikan bahwa variabel terkait memberikan kontribusi terhadap diskriminasi upah di Indonesia. Variabel dummy daerah tempat tinggal (kota) dan mengikuti pelatihan pada tahun 2008 sampai dengan 2012 berkontribusi terhadap diskriminasi pada kesenjangan upah menurut jender di Indonesia.

Hasil Dekomposisi Machado Mata

Tabel 3. di Lampiran menunjukkan hasil dekomposisi Machado Mata pada Tahun 2008 sampai dengan 2012. Hasil yang ditunjukkan adalah kesenjangan

upah riil menurut jender untuk kuantil 10th, 25th, 50th (median), 75th dan 90th dengan mengacu pada kasus yang mengasumsikan bahwa struktur upah non-diskriminatif pada laki-laki. Kesenjangan upah riil menurut jender pada kuantil 10th sampai dengan 90th menunjukkan penurunan yang mengindikasikan bahwa adanya efek lantai lengket (*Sticky Floor Effect*). Meskipun pada tahun 2008 kesenjangan upah riil menurut jender pada kuantil 10th lebih rendah daripada kuantil 25th. Menurut Arulampalam et al. (2006), *Sticky Floor* didefinisikan ada jika kesenjangan upah kuantil 10th lebih tinggi daripada kuantil 25th sebesar 2% point. Tetapi jika kriteria diatas tidak terpenuhi, maka sebagai gantinya dengan membandingkan kesenjangan upah pada kuantil 10th dan persentil 50th. Tabel 4.8. di Lampiran menunjukkan bahwa kesenjangan upah riil menurut jender di kuantil 10th lebih tinggi daripada kuantil 25th dan 50th lebih dari 2% point. Hal ini menjelaskan bahwa adanya efek lantai lengket (*Sticky Floor Effect*) di Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan 2012.

Gambar 2.6. di Lampiran memperjelas adanya Efek lantai lengket (*Sticky Floor Effect*) pada kesenjangan upah riil menurut jender di Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Seperti pada tahun 2012, Kesenjangan upah riil menurut jender pada kuantil 10th pada tahun 2012 adalah sebesar 0,392. Artinya, perempuan menerima upah 0.392 kurang dari laki-laki. Atau, perempuan mendapatkan upah 0,608 dari jumlah yang diterima laki-laki. Kesenjangan upah riil menurut jender ini terus menyempit ke kuantil 90th. Efek lantai lengket (*Sticky Floor Effect*) yang ditemukan dalam penelitian ini, kontras dengan penelitian di negara-negara maju, di mana kesenjangan upah terus melebar dari ujung bawah menuju atas distribusi upah yang dikenal sebagai efek langit-langit kaca (*glass ceiling effect*). Albrect et al. (2003) merupakan salah satu jurnal yang mengidentifikasi fenomena *glass ceiling effect* di Swedia. Arumpalam et al. (2007) meneliti 11 negara Eropa, dalam penelitian mereka ditemukan bahwa hanya di Italia dan Spanyol yang menunjukkan *Sticky Floor Effect*, sedangkan di negara lainnya kesenjangan upah menunjukkan *glass ceiling effect*. Kee (2005) menemukan bahwa ada *glass ceiling effect* yang kuat di pasar kerja sektor swasta Australia. Penelitian di India (Khanna, 2012), China (Chi dan Li, 2007), Sri Lanka (gunewardena, 2008) dan Thailand (Adireksombat et al., 2010) menemukan *Sticky Floor Effect* untuk semua negara ini. Penelitian ini memberikan satu bukti lagi bahwa ditemukannya *Sticky Floor Effect* di negara yang ekonominya sedang berkembang. Khanna (2012) di hasil penelitiannya menyatakan bahwa tren yang

berkembang menemukan adanya *Sticky Floor Effect* di negara yang ekonominya sedang berkembang dan *glass ceiling effect* di negara-negara maju.

Kesenjangan upah riil menurut jender terutama didorong oleh efek *unexplained* (yang diindikasikan karena adanya diskriminasi) yang dominan pada bagian bawah distribusi upah. Tabel 3. dan Gambar 2.8 di Lampiran menunjukkan bahwa kesenjangan upah yang disebabkan efek *unexplained* (diskriminasi) jauh lebih tinggi untuk pekerja yang menerima upah rendah daripada penerima upah tinggi. Gambar 2.8 di Lampiran memperlihatkan bahwa perkembangan kesenjangan upah antar jender yang disebabkan oleh efek *unexplained* (diskriminasi) di bagian bawah distribusi upah antara tahun 2008 sampai dengan 2012 semakin melebar. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja perempuan yang berada di bagian bawah distribusi upah, cenderung lebih mudah memperoleh perlakuan diskriminasi dibandingkan pekerja perempuan yang berada di bagian atas distribusi upah. Dengan demikian, *Sticky Floor Effect* muncul mungkinkarenadiskriminasi lebih besar di bagian bawah distribusi upah.

Distribusi karakteristik (*explained*) kurang menguntungkan bagi perempuan. Tabel 3. dan Gambar 2.7 di Lampiran menunjukkan bahwa di bagian atas distribusi upah perempuan sebenarnya memiliki karakteristik yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Bahkan untuk tahun 2011 dan 2012 karakteristik perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di setiap kuantil dalam distribusi upah. Hal ini ditunjukkan dengan tanda negatif pada nilai *explained*. Artinya, lebih dari 100 persen dari kesenjangan upah menurut jender dikarenakan adanya diskriminasi, dan tanpa adanya diskriminasi perempuan akan mendapatkan upah lebih dari laki-laki. Hasil penelitian ini mirip dengan Arulampalam et al. (2006) hasil untuk Belgia, Finlandia, Perancis, Italia dan Spanyol; Montenegro (2003) hasil untuk Chile; Chi dan Li (2007) hasil untuk China; Gunewardena (2008) hasil untuk Sri Lanka; Adireksombat et al. (2010) hasil untuk Thailand; dan Khanna (2012) hasil untuk India. Jika dilihat tren dari perbedaan karakteristik (*explained*) dari tahun 2008 sampai dengan 2012, karakteristik perempuan meningkat lebih cepat daripada karakteristik laki-laki di seluruh distribusi upah. Meskipun karakteristik individu hampir sama bahkan lebih dari laki-laki di seluruh titik distribusi upah, tetapi diskriminasi hampir sepenuhnya bertanggung jawab atas *Sticky Floor Effect*.

FENOMENA STICKY FLOOR

Satu penjelasan untuk temuan *Sticky Floor Effect* yang sering dikutip dalam literatur terkait dengan diskriminasi statistik dengan pemberi kerja yaitu karena rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Jayaweera et. al. (2000) dalam Gunewardena (2008) mengatakan bahwa pekerja perempuan di bagian bawah distribusi upah adalah pekerja perempuan yang rentan, karena mereka mayoritas pekerja di sektor informal. Anggota kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan, seperti perempuan, bekerja dalam jumlah yang sangat besar di pekerjaan sektor informal, yang memberikan akuntabilitas, stabilitas dan manfaat lebih rendah dari pada pekerjaan di sektor formal. Seringkali kegiatan sektor informal mencerminkan kegiatan sektor formal. Sektor informal berperan menunjang produksi di sektor formal dalam hal bahwa banyak pekerja informal, khususnya pekerja yang bekerja di bidang manufaktur atau tekstil, melaksanakan banyak tugas yang sama seperti pekerja yang bekerja secara formal. Karena sektor informal memiliki tuntutan lebih sedikit dalam hal kompensasi dan perlindungan pekerja, maka barang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, yang memungkinkan perusahaan memperoleh bahan masukan lebih murah. Oleh karena itu, Pembagian antara sektor formal dan informal bisa berperan sebagai jenis diskriminasi kerja terhadap perempuan. Informalitas dapat menjadi sumber diskriminasi upah juga. Diskriminasi upah berbasis pasar tenaga kerja berakar pada argumen bahwa, meskipun perempuan kerap melaksanakan tugas-tugas dalam pekerjaan informal yang mirip dengan atau diperlukan untuk produksi di sektor formal, mereka tidak menerima upah yang kompetitif karena mereka tidak memiliki akses ke perlindungan regulatif, manfaat dan keberlanjutan kerja di sektor formal (International Labour Organization, 2013).

Dalam kasus Indonesia, norma-norma patriarki merupakan salah satu hambatan paling signifikan yang dihadapi oleh perempuan saat transisi dari pasar informal ke pasar formal, karena pekerja perempuan menghadapi kendala fisik yang cukup besar karena tanggung jawab rumah tangga mereka, dan terbatas pada pekerjaan yang sesuai untuk perempuan. Di Indonesia, sikap patriarki tampak menentukan banyak hambatan mendasar pada partisipasi angkatan kerja. International Labour Organization (2012) menyatakan bahwa peran dan tanggung jawab kerumahtanggaan perempuan, status subordinat perempuan dalam relasi jender, dan sikap patriarki terhadap partisipasi perempuan dalam kehidupan

ekonomi dan masyarakat, semua berperan sebagai hambatan sangat besar bagi kemampuan perempuan untuk transisi dari pasar tenaga kerja informal ke pasar tenaga kerja formal, terutama di sektor non-tradisional. Memiliki komitmen utama pada tugas-tugas rumah tangga menyiratkan bahwa pekerjaan di luar rumah bagi perempuan hanyalah tambahan, oleh karena itu, seorang perempuan yang ingin mendapatkan pekerjaan di sektor formal harus menerima kenyataan bahwa dia akan memiliki beban tanggung jawab ganda jika ini adalah jalan yang dia pilih. Komitmen implisit pada tanggung jawab kerumahtanggaan berarti bahwa perempuan tidak punya waktu banyak untuk memberikan dedikasi pada suatu pekerjaan di sektor formal sebagaimana halnya laki-laki, sehingga cenderung membuat mereka kurang produktif dan oleh karena itu kurang menarik bagi pemberi kerja. Bukti semacam itu mendukung anggapan bahwa patriarki memainkan peran penting di masyarakat Indonesia, menentukan keputusan yang dibuat baik di lingkup publik maupun pribadi. Peran ganda perempuan dapat membuatnya kurang menarik bagi pemberi kerja karena komitmen tambahannya terhadap rumah. Tingkat produktivitas lebih rendah yang dirasakan ini dapat bertindak sebagai hambatan untuk pasar tenaga kerja formal (International Labour Organization, 2013).

Efek *sticky floor* menunjukkan semakin bergerak ke atas distribusi upah, kesenjangan upah antar laki-laki dan perempuan oleh faktor-faktor yang tidak teramati (*un-observed*) terhadap perbedaan upah yang diindikasikan sebagai diskriminasi semakin berkurang. Khanna (2012) menyatakan bahwa pekerja perempuan di bagian atas distribusi upah dianggap memiliki komitmen yang tinggi dalam pekerjaan dan merupakan pekerja yang stabil. Hal ini dapat dikarenakan pekerja perempuan pada bagian atas distribusi upah mempunyai investasi modal manusia di masa lalu, misalnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga mereka memiliki keahlian khusus yang dihargai oleh pemberi kerja. Selain itu, dengan investasi modal manusia yang mereka miliki, perempuan akan mempunyai posisi tawar yang tinggi dan mampu bersaing dengan laki-laki di pasar tenaga kerja formal. Pekerja perempuan yang mempunyai investasi modal manusia yang tinggi cenderung bekerja menjadi elit terdidik di perkotaan dan di posisi manajerial, profesional atau lainnya. Namun, dalam kasus di mana norma-norma patriarki tidak sepenuhnya membatasi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi di pasar tenaga kerja formal, norma-norma tersebut membatasi perempuan mengakses bidang pekerjaan tertentu di sektor formal dan mendapatkan tingkat upah yang sama dengan laki-laki

(International Labour Organization (2013)). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pekerja perempuan sudah mampu bersaing dengan pekerja laki-laki di sektor formal, tetapi masih terjadi kesenjangan upah antar jender oleh faktor-faktor yang tidak teramati atau diindikasikan sebagai diskriminasi, walaupun tidak setinggi di bagian bawah distribusi upah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahun 2008 sampai dengan 2012, untuk menghitung kesenjangan upah pekerja menurut jender di Indonesia. Fokus dari penelitian ini tidak hanya pada tingkat rata-rata, tetapi juga untuk melihat kesenjangan upah antar jender di berbagai titik distribusi upah.

Hasil dekomposisi Oaxaca-blinder menunjukkan bahwa diskriminasi (*unexplained*) mendominasi rata-rata kesenjangan upah antar jender. Dengan spesifikasi yang berbeda, efek *unexplained* (diskriminasi) menyumbang lebih dari 90% dari rata-rata kesenjangan upah antar jender pada setiap periode penelitian (Tahun 2008 sampai dengan 2012). Bahkan pada tahun 2010-2012, persentase rata-rata kesenjangan upah antar jender adalah lebih dari seratus persen. Artinya, jika tanpa adanya diskriminasi maka perempuan akan memperoleh upah yang lebih tinggi dari pada laki-laki.

Penelitian ini juga menerapkan dekomposisi Machado Mata untuk menguraikan kesenjangan upah menurut jender di masing-masing kuantil. Dekomposisi Machado Mata jauh lebih informatif daripada dekomposisi Oaxaca-Blinder dan sangat penting untuk penelitian kesenjangan upah menurut jender di seluruh distribusi upah. Hasil dekomposisi Machado Mata menunjukkan bahwa kesenjangan upah riil menurut jender pada kuantil 10th sampai dengan 90th menunjukkan penurunan yang mengindikasikan bahwa adanya efek lantai lengket (*Sticky Floor Effect*) di Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Kesenjangan upah riil menurut jender terutama didorong oleh komponen *unexplained* (yang diindikasikan karena adanya diskriminasi), yang jauh lebih tinggi untuk pekerja yang menerima upah rendah daripada penerima upah tinggi. Sedangkan komponen *explained* (yaitu kesenjangan upah riil menurut jender karena perbedaan karakteristik) cukup rendah di setiap kuantil dalam distribusi upah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi merupakan bagian utama dari kesenjangan upah riil menurut jender di semua titik distribusi upah,

terutama pada bagian bawah distribusi upah. Fakta ini sangat menyarankan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan upah yang sama dan kesempatan kerja yang sama, namun masih ditemukan kurangnya penghargaan terhadap keterampilan perempuan di pasar kerja. Sehingga untuk mencapai kesetaraan jender perlu adanya penegakan hukum yang kuat. Selain itu, para pembuat kebijakan harus merancang strategi untuk mengendalikan pelebaran kesenjangan upah, terutama kesenjangan upah di bagian bawah distribusi upah. Kebijakan yang dirancang sebaiknya bukan hanya kebijakan standar untuk meningkatkan karakteristik produktif perempuan saja, tetapi juga kebijakan yang mempromosikan ekuitas (keadilan) jender dalam perekrutan, dan ditempat kerja (seperti: penitipan anak, cuti hamil, cuti haid dan lain-lain) yang pada akhirnya akan mengurangi waktu yang dihabiskan dari angkatan kerja perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adireksombat, K., Fang, Z., & Sakellariou, C. 2010. The Evolution of Gender Wage Differentials and Discrimination in Thailand: 1991-2007{An Application of Unconditional Quantile Regression}. *MPRA Paper No. 27516*.
- Albrecht, J., A. van Vuuren and S. Vroman. 2004. Decomposing the Gender Wage Gap in the Netherlands with Sample Selection Adjustments. *Tinbergen Institute Discussion Paper*.
- Arulampalam, W., Booth, A. L., & Bryan, M. L. 2006. Is There a Glass Ceiling over Europe? Exploring the Gender Wage Gap Across the Wages Distribution. *Industrial and Labor Relations Review*, Vol.60(2), 161-186.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Pedoman Umum Pelaksanaan Survei Khusus Angkatan Kerja Tahun 2012*. Jakarta.
- Becker, Gary S. 1985. Human Capital, Effort, and The Sexual Division of Labor. *Journal of Labor: Trends in Women's Work, Education, and Family Building Economics*, Vol. 3, Issue I Part 2 (January, 1985). The University of Chicago Press.
- Blinder, A. 1973. Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates. *Journal of Human Resources*, Vol. 8(4), 436-455.
- Buchinsky, Moshe. 1998. Recent Advances in Quantile Regression Models. *Journal of Human Resources*, Vol. 33(1), 88-126.
- Chi, Wei & Li, Bo. 2007. Glass Ceiling or Sticky Floor? Examining the Gender Pay Gap across the Wage Distribution in Urban China, 1987-2004. *Journal of Comparative Economics*, Vol. 36, 243-263.
- Christofides, L. N., Polycarpou, A., & Vrachimis, K. 2010. The Gender Wage Gaps, 'Sticky Floors' and 'Glass Ceilings' of the European Union. *IZA Discussion Papers*, No. 5044.
- Cotton, J. 1988. On the Decomposition of Wage Differentials. *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 70, 236-243.
- de la Rica, S., Dolado, J. J., & Llorens, V. 2005. Ceiling and Floors: Gender Wage Gaps by Education in Spain. *IZADiscussion Paper*, No. 1483. Institute for the Study of Labor (IZA)
- DiNardo, J., Fortin N. M., & Lemieux T. 1996. Labor Market Institutions and the Distribution of Wages, 1973-1992: A Semiparametric Approach. *Econometrica* Vol. 64(5), 1001-1044.
- Feridhanusetyawan et al. 2001. The male-female wage differentials in Indonesia. Centre for Strategic International Studies Working Paper Series. 14 Juli, 2013.
<http://aldinosuprema.blog.uns.ac.id/files/2010/06/the-male-female-wage-differentials-in-indonesia.pdf>.
- Firpo S., Fortin N. M., and Lemieux T. 2007. *Decomposing Wage Distributions using Recentered Influence Functions Regressions*. Mimeo, University of British Columbia.
- Goldin, C., & Polachek, S. 1987. Residual differences by sex: Perspectives on the gender gap in earnings. *In American Economic Review*, Vol. 77(2), 143-151.
- Gunewardena, D., Abeyrathna, D., Ellagala, A., Rajakaruna, K., & Rajendran S. March 2008. Glass Ceilings, Sticky Floors or Sticky Doors? A Quantile Regression Approach to Exploring Gender Wage Gaps in Sri Lanka. *PMMA Working Paper*, No. 2008-04 Available at SSRN.
<http://ssrn.com/abstract=1124158> or
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1124158>
- International Labour Organization. 2013. *Perempuan dan Kepemimpinan*. Jakarta, Indonesia.
- International Labour Organization. 2012. *Labour and social trends in Indonesia 2011: Promoting job-rich growth in provinces*. Jakarta, Indonesia.
- Jacobsen, Joyce P. 1994. *The Economic of Gender*. Massachusetts, Blackwell.
- Jann, B. 2008. A STATA implementation of the Blinder-Oaxaca decomposition. *ETH Zurich Sociology Working paper No.5*.
http://repec.ethz.ch/rsc/ets/wpaper/jann_oaxaca.pdf
- Kee, H. J. 2005. Glass Ceiling or Sticky Floor? Exploring the Australian Gender Pay Gap Using Quantile Regression and Counterfactual Decomposition Methods. *Discussion Paper*, No. 487.

- Khanna, S. 2012. Gender wage discrimination in India: Glass ceiling or sticky floor?. *Working Paper of Delhi School of Economics*, No. 214.
- Koenker, R. and G. Bassett. 1978. Regression Quantiles. *Econometrica*, Vol.46(1), 33-50.
- Machado, J., & Mata J. 2005. Counterfactual Decomposition of Changes in Wage Distributions Using Quantile Regression Models. *Journal of Applied Econometrics*, No. 20, 445-465.
- Neumark, D. 1988. Employers' Discriminatory Behavior and the Estimation of Wage Discrimination. *The Journal of Human Resources*, Vol. 23, pp. 279-295. <http://pta.trunojoyo.ac.id/uploads/journals/090231100073/090231100073.pdf>
- Oaxaca, R.L. 1973. Male-female wage differentials in urban labor markets. In *International Economic Review*, Vol. 13(3), 693-709.
- Oaxaca, R. L., & M. R. Ransom. 1994. On discrimination and the decomposition of wage differentials. *Journal of Econometrics*, Vol. 61, 5-21.
- Oaxaca, R. L., & M. Ransom. 1998. Calculation of approximate variances for wage decomposition differentials. *Journal of Economic and Social Measurement*, Vol. 24, 55-61.
- Pirmana, Viktor. 2006. Earnings Differential Between Male-Female In Indonesia: Evidence From Sakernas Data. *Working Paper in Economics and Development Studies*, No.200608.
- Reimers, C. W. 1983. Labor Market Discrimination Against Hispanic and Black Men. *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 65, 570-579.

LAMPIRAN

Tabel 1. Hasil Model Dekomposisi Oaxaca-Blinder dengan menggunakan struktur upah (SU) Laki-laki (L); Perempuan (P); serta laki-laki dan perempuan (*Pooled*) Tahun 2008 dan 2009

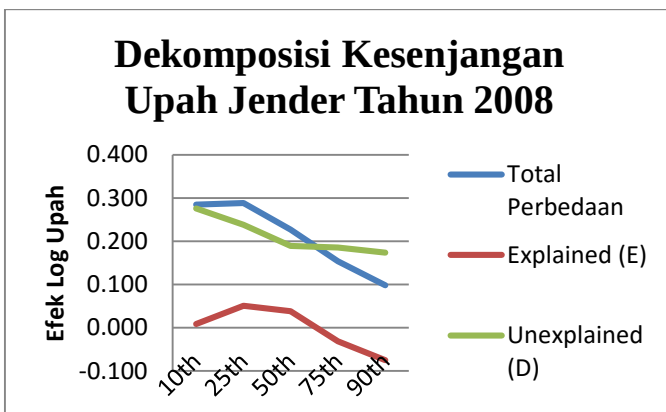
Dekomposisi	Tahun 2008			Tahun 2009		
	L (SU)	P (SU)	<i>Pooled</i> (SU)	L (SU)	P (SU)	<i>Pooled</i> (SU)
Total Kesenjangan Upah	0.208	0.208	0.208	0.261	0.261	0.261
Persentase Total Kesenjangan Upah (%)	100	100	100	100	100	100
<i>Explained</i> (E)	0.022	0.011	0.018	0.012	0.017	0.013
Persentase <i>Explained</i> (%)	10.663	5.043	8.732	5.552	6.558	4.796
<i>Unexplained</i> (D)	0.186	0.198	0.190	0.249	0.244	0.248
Persentase <i>Unexplained</i> (%)	89.337	94.957	91.268	95.448	93.442	95.204
<i>explained</i>						
age	0.120	0.087	0.108	0.106	0.077	0.098
age2	-0.087	-0.069	-0.079	-0.079	-0.061	-0.075
kota	-0.004	-0.014	-0.007	-0.009	-0.013	-0.010
sd	0.009	0.009	0.010	0.006	0.008	0.007
smp	0.044	0.048	0.046	0.051	0.067	0.059
sma	-0.097	-0.098	-0.099	-0.096	-0.122	-0.109
pt	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
kawin	0.012	0.002	0.008	0.010	0.003	0.007
pelatihan	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
mskerja	0.026	0.042	0.031	0.027	0.044	0.033
p_prof	-0.029	-0.007	-0.025	-0.027	-0.029	-0.026
p_manajer	0.006	0.005	0.006	0.012	0.015	0.012
p_irtulis	-0.008	-0.002	-0.008	-0.009	-0.016	-0.012
p_pjualan	-0.002	0.006	-0.001	0.002	-0.002	0.001
p_jasa	-0.005	0.016	-0.002	0.000	0.001	0.000
p_prod	0.012	-0.031	0.007	-0.004	0.000	-0.003
industri	-0.001	0.010	0.000	0.007	0.003	0.006
jasa	0.014	-0.003	0.013	0.003	0.027	0.011
jawa	0.008	0.006	0.007	0.010	0.008	0.009
<i>unexplained</i>						
age	0.349	0.382	0.361	0.301	0.329	0.309
age2	-0.101	-0.119	-0.109	-0.103	-0.121	-0.107
kota	-0.095	-0.085	-0.092	-0.042	-0.038	-0.041
sd	0.007	0.008	0.007	-0.027	-0.028	-0.028
smp	-0.020	-0.024	-0.022	-0.061	-0.078	-0.070
sma	-0.002	-0.001	0.000	-0.066	-0.040	-0.053
pt	-0.001	-0.001	-0.001	-0.003	-0.004	-0.004
kawin	0.067	0.077	0.071	0.052	0.059	0.055
pelatihan	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
mskerja	-0.064	-0.079	-0.069	-0.068	-0.085	-0.074
p_prof	0.062	0.041	0.058	-0.008	-0.005	-0.008
p_manajer	0.001	0.001	0.000	-0.002	-0.006	-0.003
p_irtulis	0.029	0.023	0.028	-0.025	-0.018	-0.023
p_pjualan	0.037	0.028	0.035	-0.015	-0.010	-0.013
p_jasa	0.041	0.020	0.038	-0.006	-0.007	-0.006
p_prod	0.070	0.113	0.075	-0.020	-0.025	-0.021
industri	-0.043	-0.055	-0.044	0.015	0.019	0.016
jasa	-0.097	-0.080	-0.096	0.145	0.120	0.137
jawa	-0.019	-0.017	-0.018	-0.020	-0.018	-0.019
_cons	-0.036	-0.036	-0.036	0.199	0.199	0.199

Tabel 2. Hasil Model Dekomposisi Oaxaca-Blinder dengan menggunakan struktur upah (SU) Laki-laki (L); Perempuan (P); serta laki-laki dan perempuan (*Pooled*) Tahun 2010 - 2012

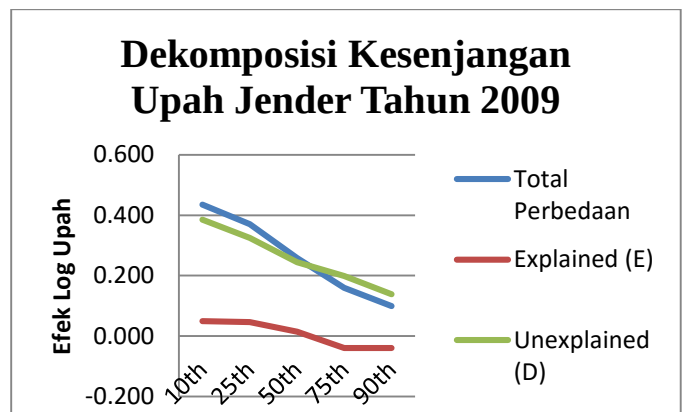
Dekomposisi	Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012		
	L (SU)	P (SU)	Pooled (SU)	L (SU)	P (SU)	Pooled (SU)	L (SU)	P (SU)	Pooled (SU)
Total Kesenjangan Upah	0.220	0.220	0.220	0.219	0.219	0.219	0.221	0.221	0.221
Persentase Total Kesenjangan Upah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Explained</i> (E)	-0.016	-0.010	-0.015	-0.073	-0.062	-0.069	-0.042	-0.047	-0.042
Persentase <i>Explained</i> (%)	-7.349	-4.27	-6.884	-33.600	-28.355	-31.629	-19.136	-21.189	-19.079
<i>Unexplained</i> (D)	0.236	0.230	0.235	0.292	0.281	0.288	0.263	0.268	0.263
Persentase <i>Unexplained</i> (%)	107.349	104.727	106.884	133.600	128.355	131.629	119.136	121.189	119.079
<i>explained</i>									
age	0.097	0.065	0.086	0.014	0.014	0.014	0.020	0.016	0.018
age2	-0.072	-0.050	-0.065	-0.006	-0.005	-0.005	-0.012	-0.009	-0.011
kota	-0.008	-0.012	-0.009	-0.002	-0.008	-0.004	-0.002	-0.007	-0.004
sd	0.011	0.012	0.012	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
smp	0.039	0.046	0.044	0.014	0.015	0.014	0.009	0.011	0.009
sma	-0.092	-0.105	-0.100	0.023	0.024	0.023	0.018	0.020	0.018
pt	0.004	0.004	0.004	-0.078	-0.078	-0.077	-0.070	-0.078	-0.073
kawin	0.008	0.000	0.005	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
pelatihan	-0.002	-0.001	-0.002	-0.004	-0.004	-0.004	-0.002	-0.002	-0.002
mskerja	0.024	0.040	0.029	-0.005	0.003	-0.003	0.006	0.008	0.006
p_prof	-0.045	-0.044	-0.043	-0.034	-0.019	-0.030	-0.027	-0.009	-0.022
p_manajer	0.012	0.017	0.013	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
p_jrtulis	-0.012	-0.017	-0.014	-0.012	-0.011	-0.013	-0.009	-0.007	-0.010
p_pjualan	0.000	-0.003	-0.001	-0.013	0.003	-0.011	-0.018	0.001	-0.015
p_jasa	0.000	0.002	0.001	-0.002	0.013	0.002	-0.005	0.007	-0.002
p_prod	0.001	-0.007	-0.001	-0.002	-0.027	-0.006	0.012	-0.030	0.005
industri	0.005	0.001	0.004	0.006	0.007	0.004	0.006	0.006	0.004
jasa	0.009	0.038	0.018	0.013	0.001	0.014	0.019	0.017	0.021
jawa	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005
<i>unexplained</i>									
age	0.358	0.389	0.368	0.042	0.043	0.042	0.252	0.256	0.254
age2	-0.135	-0.157	-0.142	-0.062	-0.063	-0.062	-0.136	-0.139	-0.137
kota	-0.050	-0.046	-0.049	-0.060	-0.054	-0.058	-0.055	-0.050	-0.054
sd	-0.007	-0.008	-0.008	0.030	0.032	0.031	0.011	0.012	0.011
smp	-0.027	-0.034	-0.032	-0.005	-0.006	-0.005	-0.008	-0.010	-0.009
sma	-0.031	-0.017	-0.022	-0.005	-0.005	-0.004	-0.018	-0.020	-0.018
pt	-0.001	-0.002	-0.002	-0.001	0.000	-0.001	-0.019	-0.011	-0.016
kawin	0.069	0.077	0.072	0.072	0.072	0.072	0.074	0.074	0.074
pelatihan	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
mskerja	-0.068	-0.084	-0.073	-0.024	-0.031	-0.026	-0.029	-0.031	-0.029
p_prof	0.004	0.003	0.002	0.030	0.016	0.027	0.037	0.020	0.033
p_manajer	-0.005	-0.010	-0.006	0.000	-0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
p_jrtulis	-0.023	-0.018	-0.021	0.002	0.002	0.003	0.007	0.005	0.008
p_pjualan	-0.011	-0.008	-0.010	0.034	0.018	0.031	0.042	0.022	0.038
p_jasa	-0.004	-0.005	-0.004	0.032	0.017	0.027	0.025	0.014	0.022
p_prod	0.026	0.034	0.028	0.027	0.052	0.031	0.050	0.092	0.057
industri	0.012	0.015	0.013	-0.003	-0.004	-0.001	0.000	0.000	0.002
jasa	0.154	0.126	0.145	-0.049	-0.037	-0.050	-0.007	-0.005	-0.009
jawa	-0.006	-0.005	-0.006	-0.026	-0.025	-0.026	-0.041	-0.039	-0.040
_cons	-0.025	-0.025	-0.025	0.258	0.258	0.258	0.078	0.078	0.078

Tabel 3. Hasil Dekomposisi Machado-Mata (MM) Tahun 2008-2012

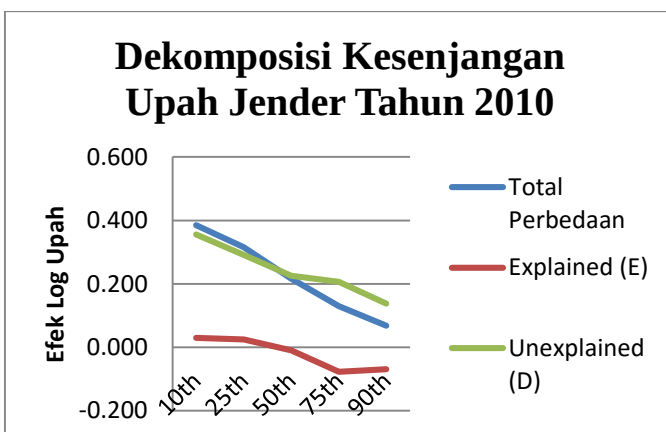
Dekomposisi	2008		2009		2010		2011		2012	
	Absolut	(%)	Absolut	(%)	Absolut	(%)	Absolut	(%)	Absolut	(%)
10th										
Total Kesenjangan Upah	0.285	100	0.435	100	0.385	100	0.398	100	0.392	100
Explained (E)	0.009	3.037	0.050	11.402	0.029	7.609	-0.016	-4.108	-0.007	-1.898
Unexplained (D)	0.276	96.963	0.385	88.598	0.355	92.391	0.414	104.108	0.400	101.898
25th										
Total Kesenjangan Upah	0.289	100	0.371	100	0.316	100	0.325	100	0.325	100
Explained (E)	0.051	17.599	0.046	12.480	0.025	7.912	-0.010	-3.211	-0.003	-0.788
Unexplained (D)	0.238	82.401	0.325	87.520	0.291	92.088	0.335	103.211	0.328	100.788
50th										
Total Kesenjangan Upah	0.227	100	0.259	100	0.216	100	0.209	100	0.216	100
Explained (E)	0.038	16.697	0.014	5.567	-0.010	-4.429	-0.035	-17.002	-0.025	-11.683
Unexplained (D)	0.189	83.303	0.244	94.433	0.225	104.429	0.244	117.002	0.241	111.684
75th										
Total Kesenjangan Upah	0.153	100	0.159	100	0.129	100	0.107	100	0.114	100
Explained (E)	-0.032	-20.686	-0.040	-25.115	-0.078	-60.096	-0.108	-100.840	-0.080	-70.184
Unexplained (D)	0.185	120.686	0.199	125.115	0.207	160.096	0.214	200.840	0.194	170.184
90th										
Total Kesenjangan Upah	0.098	100	0.099	100	0.068	100	0.057	100	0.058	100
Explained (E)	-0.076	-77.018	-0.039	-39.665	-0.069	-100.958	-0.164	-288.783	-0.133	-229.359
Unexplained (D)	0.174	177.019	0.139	139.665	0.137	200.958	0.221	388.781	0.190	329.357



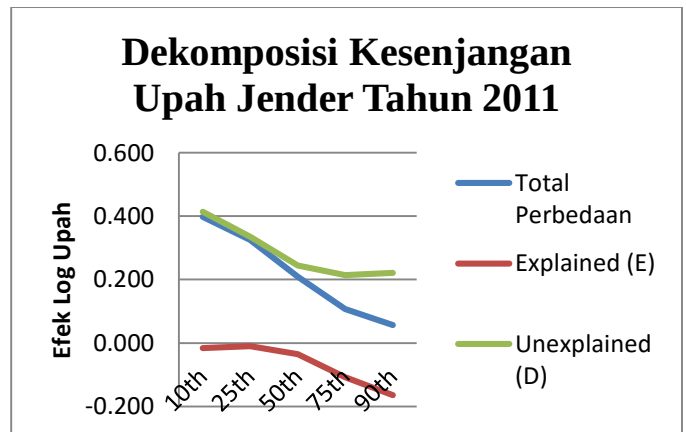
Gambar 2.1. Dekomposisi Kesenjangan Upah Menurut Jender



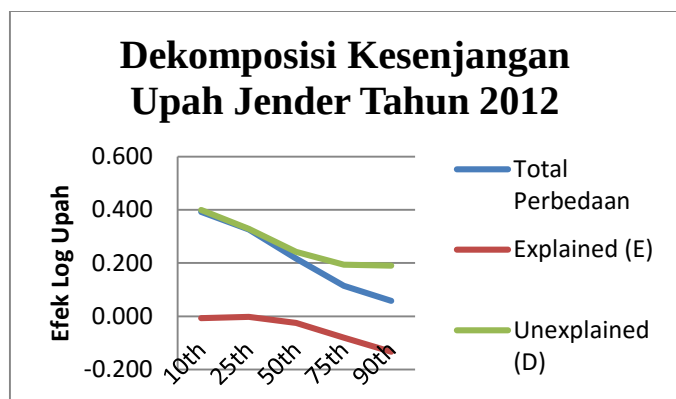
Gambar 2.2. Dekomposisi Kesenjangan Upah Menurut Jender Tahun 2009



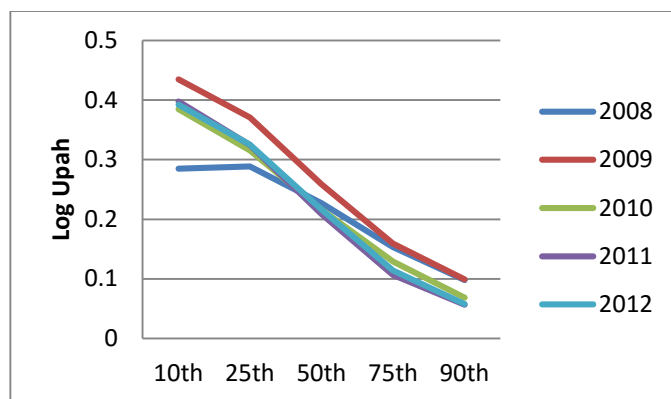
Gambar 2.3. Dekomposisi Kesenjangan Upah Menurut Jender Tahun 2010



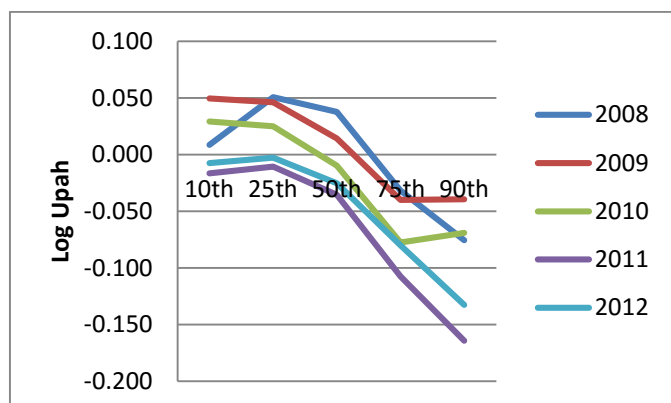
Gambar 2.4. Dekomposisi Kesenjangan Upah Menurut Jender Tahun 2011



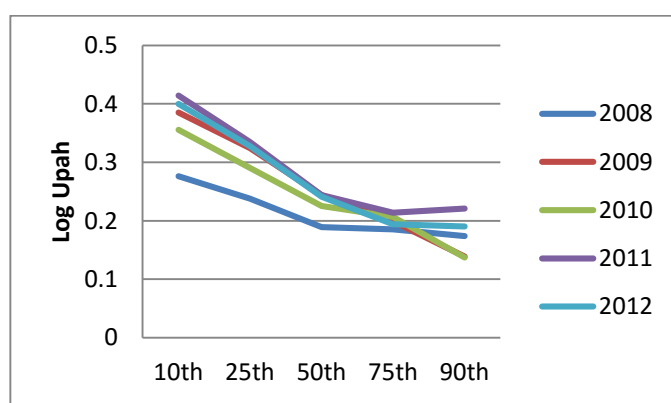
Gambar 2.5. Dekomposisi Kesenjangan Upah Menurut Jender Tahun 2012



Gambar 2.6. Kesenjangan Upah Menurut Jender Tahun 2008-2012



Gambar 2.7. Efek Explained (Karakteristik) Tahun 2008-2012



Gambar 2.8. Efek Unexplained (Diskriminasi) Tahun 2008-2012

KEPENDUDUKAN INDONESIA

Tren Urbanisasi pada *Secondary Cities* di Indonesia Periode
1990-2010

Luh Kitty Katherina

Kesenjangan Upah Antar Jender di Indonesia: *Glass Ceiling*
atau *Sticky Floor*?

Hennigusnia

Pola Pengeluaran dan Gaya Hidup Penduduk Muda Kelas
Menengah: Studi Empiris Perkotaan di Jabodetabek

*Vanda Ningrum, Intan Adhi Perdana Putri dan
Andini Desita Ekaputri*

Pemenuhan ASI Eksklusif di Kalangan Ibu Bekerja: Peluang dan
Tantangan

Angga Sisca Rahadian

Mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia untuk
Menjawab Tantangan Modernisasi, Demokratisasi, dan Globalisasi

Makmuri Sukarno

Supporting Urban Poor Facing Climate Change: Creating Effective
Adaptation Messages

Syarifah Aini Dalimunthe



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 9	No. 2	73-148	Jakarta, Desember 2014	ISSN 1907-2902
----------------------------------	--------	-------	--------	---------------------------	-------------------

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia merupakan media informasi, komunikasi, dan pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah kependudukan, ketenagakerjaan dan ekologi manusia. Jurnal ini merupakan *peer-reviewed* jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Kependudukan-LIPI) yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Artikel dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi
Dewan Redaksi

Dra. Haning Romdiati, MA (Kepala P2K-LIPI)
 Dra. Titik Handayani, MS
 Dra. Mita Noveria, MA
 Widayatun, SH, MA
 Dra. Ade Latifa, M.Hum
 Zainal Fatoni, MPH
 Vanda Ningrum, MGM
 Syarifah Aini Dalimunthe, M.Sc.
 Andini Desita Ekaputri, MSE
 Intan Adhi Perdana Putri, M.Si
 Puguh Prasetyoputra, M.H.Econ
 Puji Hartana, S.Sos

Mitra Bestari

Prof. Gavin W. Jones, Ph.D., National University of Singapore-Singapore
 Prof. Haruo Kuroyanagi, Sugiyama Jogakuen University-Japan
 Dr. Djoko Hartono, Konsultan World Bank
 Dr. Deny Hidayati, MA., Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 Prof. Terence H. Hull, Ph.D., Australian National University- Australia
 Sukamdi, M.Sc., Ph.D., Universitas Gadjah Mada
 Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si., Universitas Indonesia

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 Widya Graha LIPI, lantai X, Ruang 2127
 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia
 Tromol Pos 250/JKT 1002,
 Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106
 Fax: +62 21 5207205
 E-mail: jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id
 Website: www.kependudukan.lipi.go.id

Penerbit

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 Widya Graha LIPI, lantai X
 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia
 Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106



Tren Urbanisasi pada *Secondary Cities* di Indonesia Periode 1990-2010

Luh Kitty Katherina

Kesenjangan Upah Antar Jender di Indonesia: *Glass Ceiling*
atau *Sticky Floor*?

Hennigusnia

Pola Pengeluaran dan Gaya Hidup Penduduk Muda Kelas Menengah:
Studi Empiris Perkotaan di Jabodetabek

Vanda Ningrum, Intan Adhi Perdana Putri, dan Andini Desita Ekaputri

Pemenuhan ASI Eksklusif di Kalangan Ibu Bekerja: Peluang dan Tantangan

Angga Sisca Rahadian

Mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia untuk Menjawab Tantangan
Modernisasi, Demokratisasi, dan Globalisasi

Makmuri Sukarno

Supporting Urban Poor Facing Climate Change: Creating Effective Adaptation Messages

Syarifah Aini Dalimunthe



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii-viii
ABSTRAK/ABSTRACT	ix-xvi
Tren Urbanisasi pada <i>Secondary Cities</i> di Indonesia Periode 1990-2010 Luh Kitty Katherina	73-82
Kesenjangan Upah Antar Jender di Indonesia: <i>Glass Ceiling</i> atau <i>Sticky Floor</i> ? Hennigusnia	83-96
Pola Pengeluaran dan Gaya Hidup Penduduk Muda Kelas Menengah: Studi Empiris Perkotaan di Jabodetabek Vanda Ningrum, Intan Adhi Perdana Putri dan Andini Desita Ekaputri	97-108
Pemenuhan ASI Eksklusif di Kalangan Ibu Bekerja: Peluang dan Tantangan Angga Sisca Rahadian	109-118
Mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia untuk menjawab tantangan Modernisasi, Demokratisasi, dan Globalisasi Makmuri Sukarno	119-136
Supporting Urban Poor Facing Climate Change: Creating Effective Adaptation Messages Syarifah Aini Dalimunthe	137-148

KATA PENGANTAR

Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) pada Volume 9 No 2 Desember 2014 ini menyajikan enam artikel ilmiah dengan berbagai isu yang diangkat. Dinamika penduduk di perkotaan lapis kedua Indonesia, fenomena penduduk kelas menengah, kesenjangan upah antar gender menjadi bagian dari tiga artikel terawal dari JKI yang menarik untuk dibaca. Sedangkan pada tiga artikel terakhir tiga penulis mengetengahkan diskursus pemenuhan ASI Eksklusif yang menjadi tantangan ibu bekerja, peran lembaga pendidikan dalam demokratisasi, serta strategi untuk mengkomunikasikan dampak perubahan iklim kepada kelompok rentan seperti penduduk miskin kota.

Artikel pertama ditulis oleh Luh Kitty Katherina dengan judul *Tren Urbanisasi pada Secondary Cities di Indonesia Periode Tahun 1990-2010*. Tulisan ini mengambil kasus *secondary cities* (kota-kota lapis kedua) yang mulai memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan menyeimbangkan pembangunan wilayah, yaitu Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar. Kota-kota ini mengalami percepatan pertumbuhan, baik di bidang ekonomi, kependudukan, maupun fisik. Percepatan pertumbuhan ini menyebabkan kebutuhan lahan terbangun kota-kota tersebut tidak mampu lagi terpenuhi sehingga aktivitas perkotaan mulai merambah ke wilayah sekelilingnya. Kawasan perkotaan semakin melebar ke wilayah pinggiran. Hasil Sensus Penduduk 1990-2010 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pada kota-kota kedua lebih rendah dibandingkan dengan wilayah di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan aktivitas perkotaan kota-kota kedua sudah melewati batas administrasi kota, menyatu dengan wilayah sekelilingnya.

Artikel kedua ditulis oleh Hennigusnia dengan judul *Kesenjangan Upah Antar Gender di Indonesia: Glass Ceiling Atau Sticky Floor?* Artikel ini menggunakan data Sakernas 2008-2012 untuk mengestimasi persamaan upah laki-laki dan perempuan menggunakan OLS standar. Metode dekomposisi Oaxaca-Blinder (1973) digunakan untuk menentukan besarnya rata-rata kesenjangan upah menurut jender yang disebabkan oleh faktor karakteristik (*explained effect*) dan faktor diskriminasi (*unexplained effect*). Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan upah menurut jender masih didominasi oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained*) dan diindikasikan sebagai diskriminasi, baik pada tingkat rata-rata maupun di setiap kuantil dalam distribusi upah. Penelitian ini juga menemukan adanya bukti lantai lengket (*sticky floor*) di Indonesia.

Artikel ketiga ditulis oleh Vanda Ningrum, Intan Adhi Perdana Putri, dan Andini Desita Ekaputri berjudul *Pola Pengeluaran dan Gaya Hidup Penduduk Muda Kelas Menengah: Studi Empiris Perkotaan di Jabodetabek*. Tulisan ini menganalisis perilaku penduduk muda yang termasuk dalam kategori kelas menengah berdasarkan atas pola pengeluaran dan gaya hidup. Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap penduduk berusia 18 hingga 35 tahun, tinggal dan bekerja di perkotaan seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hasil survei menunjukkan bahwa terlihat adanya perbedaan pola konsumsi antara penduduk muda kelas menengah yang belum dan sudah menikah. Penduduk yang belum menikah lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk makanan sebagai prioritas pertama, sedangkan penduduk yang sudah menikah untuk membayar cicilan rumah dan kendaraan.

Artikel keempat ditulis oleh Angga Sisca Rahardian dengan judul *Pemenuhan Hak ASI Eksklusif di Kalangan Ibu Bekerja: Peluang dan Tantangan*. Tulisan ini menganalisis hambatan dan tantangan ibu bekerja dalam memenuhi ASI Eksklusif. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam dengan beberapa ibu bekerja dengan kriteria tertentu dan observasi tempat bekerja informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ASI Eksklusif di kalangan ibu bekerja masih jauh dari yang diharapkan. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial kurang mendukung para ibu bekerja untuk memberikan ASI sehingga memberi dampak negatif bagi ibu bekerja itu sendiri maupun anaknya.

Artikel kelima ditulis oleh Makmuri Sukarno dengan judul Mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia untuk Menjawab Tantangan Modernisasi, Demokratisasi, dan Globalisasi. Melalui metode *Rapid Assessment* terhadap sistem penyelenggaraan (*governance*), manajemen, tenaga pendidik, kurikulum, peserta didik serta cara pembelajaran pada dua dari tiga MAN-IC (yaitu di Jakarta dan Jambi), nampaklah ketidakseimbangan sekaligus ketidaksiapan lembaga ini dalam merespon tantangan-tantangan tersebut. Pembaharuan pada hal-hal tersebut di atas yang diajukan dalam tulisan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan responsif MAN-IC dalam menyiapkan generasi mendatang.

Artikel keenam ditulis oleh Syarifah Aini Dalimunthe berjudul *Supporting Urban Poor Facing Climate Change: Creating Effective Adaptation Messages*. Artikel ini memberikan gambaran kebutuhan informasi dari masyarakat miskin kota ketika menghadapi perubahan iklim, terutama media apa yang dipercaya oleh masyarakat miskin perkotaan, pilihan sumber informasi dan bagaimana mereka ingin informasi tersebut disajikan. Sebagai contoh, tulisan ini memberikan model pengemasan pesan adaptasi terhadap perempuan miskin perkotaan. Dengan memahami kebutuhan informasi dan model pengemasan informasi, akan mendukung efektivitas pesan adaptasi perubahan iklim. Data dari riset ini di kumpulkan menggunakan wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan survei terhadap 928 masyarakat miskin kota di Indonesia.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Penulis yang telah berkontribusi pada terbitan terakhir dari Volume 9, Nomor 2, Desember 2014, juga kepada Mitra Bestari yang sudah bekerjasama dengan redaksi untuk menyampaikan saran dan reviewnya. Selamat Membaca!

Salam Hangat,

Redaksi JKI



DDC: 300.303

Luh Kitty Katherina

**TREN URBANISASI PADA SECONDARY CITIES
DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1990-2010**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, Desember 2014, Hlm. 73-82

Urbanisasi seringkali identik dengan kota utama di suatu negara sebagai lokasi terjadinya akumulasi kapital yang menjadi daya tarik tinggi berbagai aktivitas ekonomi. Namun pada kenyataannya, fenomena urbanisasi bahkan mega-urbanisasi telah merambah pada lapis kedua kota-kota di suatu negara. Tulisan ini mengambil kasus *secondary cities* (kota-kota lapis kedua) yang mulai memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan menyeimbangkan pembangunan wilayah, yaitu Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar. Kota-kota ini mengalami percepatan pertumbuhan, baik di bidang ekonomi, kependudukan, maupun fisik. Percepatan pertumbuhan ini menyebabkan kebutuhan lahan terbangun kota-kota tersebut tidak mampu lagi terpenuhi sehingga aktivitas perkotaan mulai merambah ke wilayah sekelilingnya. Kawasan perkotaan semakin melebar ke wilayah pinggiran. Hasil Sensus Penduduk dalam kurun waktu 1990-2010 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pada kota-kota kedua lebih rendah dibandingkan dari wilayah di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan aktivitas perkotaan kota-kota kedua sudah melewati batas administrasi kota, menyatu dengan wilayah sekelilingnya. Tulisan ini akan menggambarkan tren urbanisasi yang terjadi pada kota kedua di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif melalui perbandingan data hasil Sensus Penduduk tahun 1990, 2000, dan 2010. Secara umum tren urbanisasi pada kota-kota kedua di Indonesia menunjukkan sebuah pola dimana laju pertumbuhan

penduduk di kawasan perkotaan berkaitan erat dengan ukuran kota.

Kata Kunci: Tren, Urbanisasi, Kota Kedua, Wilayah Sekeliling Kota, Pertumbuhan Penduduk

DDC: 300.331

Hennigusnia

**KESENJANGAN UPAH ANTAR JENDER DI
INDONESIA: GLASS CEILING ATAU STICKY
FLOOR?**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, Desember 2014, Hlm. 83-96

Tulisan ini melihat kesenjangan upah antar jender di Indonesia tahun 2008-2012. Selain melihat kesenjangan upah pada tingkat rata-rata, penelitian ini juga akan melihat kesenjangan upah di kuantil yang berbeda dari distribusi upah, sehingga dapat diketahui apakah kesenjangan upah melebar di bagian atas distribusi upah (diindikasikan “glass ceiling”) atau melebar di bagian bawah distribusi upah (“sticky floor”). Penelitian ini menggunakan data Sakernas 2008-2012 untuk mengestimasi persamaan upah laki-laki dan perempuan menggunakan OLS standar. Metode dekomposisi Oaxaca-Blinder (1973) digunakan untuk menentukan besarnya rata-rata kesenjangan upah menurut jender yang disebabkan oleh faktor karakteristik (*explained effect*) dan faktor diskriminasi (*unexplained effect*). Sedangkan untuk menentukan kesenjangan upah menurut jender di kuantil yang berbeda dari distribusi upah menggunakan regresi kuantil dan menerapkan dekomposisi Machado-Mata (2005). Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan upah menurut jender masih didominasi oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained*) dan diindikasikan sebagai diskriminasi, baik pada tingkat rata-rata maupun di setiap kuantil dalam distribusi upah. Penelitian ini juga

menemukan adanya bukti lantai lengket (*sticky floor*) di Indonesia.

Kata Kunci: Dekomposisi Upah, Diskriminasi Upah, Regresi Kuantil, *Glass Ceiling*, *Sticky Floor*

DDC: 300.305

Vanda Ningrum, Intan Adhi Perdana Putri, dan Andini Desita Ekaputri.

POLA PENGELUARAN DAN GAYA HIDUP PENDUDUK MUDA KELAS MENENGAH: STUDI EMPIRIS PERKOTAAN DI JABODETABEK

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, Desember 2014, Hlm. 97-108

Penduduk muda menempati porsi yang besar dalam struktur penduduk di kota metropolitan. Sejak proses industrialisasi tahun 1980an berlangsung, tidak sedikit diantara penduduk muda tersebut termasuk dalam kelas menengah. Pola pengeluaran dan gaya hidup mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam perekonomian dan kebijakan tata kota. Tulisan ini menganalisis perilaku penduduk muda yang termasuk dalam kategori kelas menengah berdasarkan atas pola pengeluaran dan gaya hidup. Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap penduduk berusia 18 hingga 35 tahun, tinggal dan bekerja di perkotaan yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hasil survei menunjukkan terlihat adanya perbedaan pola konsumsi antara penduduk muda kelas menengah yang belum dan sudah menikah. Penduduk yang belum menikah lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk makanan sebagai prioritas pertama, sedangkan penduduk yang sudah menikah untuk membayar cicilan rumah dan kendaraan. Meskipun rata-rata penduduk muda kelas menengah memiliki frekuensi pergi ke mal tinggi, tetapi besarnya pengeluaran untuk hiburan tidak menjadi prioritas utama dalam total pengeluaran per bulannya. Alasan utama hiburan mengunjungi mal adalah untuk mendapatkan suasana yang nyaman dibandingkan membelanjakan pendapatan sebagai status sosial. Moratorium mal bisa menjadi implikasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau seperti taman sebagai alternatif kebijakan pemerintah kota menyediakan tempat hiburan.

Kata Kunci : Penduduk Muda, Kelas Menengah, Jabodetabek, Pola Pengeluaran, Gaya Hidup

DDC: 600.643

Angga Sisca Rahadian

PEMENUHAN HAK ASI EKSKLUSIF DI KALANGAN IBU BEKERJA: PELUANG DAN TANTANGAN

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, Desember 2014, Hlm. 109-118

Peran perempuan dalam dunia kerja saat ini tidak dapat diabaikan. Hal ini terlihat dari jumlah angkatan kerja perempuan tiap tahun semakin meningkat dan 66 persen angkatan kerja perempuan tersebut berada dalam usia reproduksi. Tulisan ini menganalisis hambatan dan tantangan ibu bekerja dalam memenuhi ASI eksklusif. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam dengan beberapa ibu bekerja dengan kriteria tertentu dan observasi tempat bekerja informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ASI eksklusif di kalangan ibu bekerja masih jauh dari yang diharapkan. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial kurang mendukung para ibu bekerja untuk memberikan ASI sehingga memberi dampak negatif bagi ibu bekerja itu sendiri maupun anaknya. Mayoritas informan tidak memiliki ruang laktasi untuk tempat memompa ASI di tempat bekerjanya dan mereka memompa di tempat-tempat yang kurang nyaman bahkan harus memompa di toilet. Selain itu, rekan-rekan satu kantor kurang mendukung ibu bekerja untuk memompa dan membuat ibu bekerja merasa tidak mendapat dukungan sehingga memengaruhi jumlah hasil ASI perahan dan tidak mencukupi kebutuhan anaknya. Menurut PP No 33 Pasal 32 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif menyatakan bahwa tempat bekerja harus menyediakan ruang laktasi untuk pegawainya yang menyusui anaknya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah instansi berwenang perlu mendorong tempat bekerja untuk menyediakan ruangan menyusui dan fasilitas pendukung sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, tempat bekerja sebaiknya mensosialisasikan pemberian ASI eksklusif kepada pegawainya dengan membuat brosur atau poster sehingga menumbuhkan kesadaran dan pemahaman para pegawai untuk mendukung ASI eksklusif. Terakhir sanksi tegas perlu diberikan bagi tempat bekerja yang tidak memiliki ruangan menyusui.

Kata Kunci: Ibu Bekerja, ASI Eksklusif, Kesehatan

DDC: 700.707

Makmuri Sukarno

MENGEMBANGKAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA UNTUK MENJAWAB TANTANGAN MODERNISASI, DEMOKRATISASI, DAN GLOBALISASI

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, Desember 2014, Hlm. 119-136

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN-IC), seperti halnya sekolah pada umumnya, terancam disfungsi dalam menyiapkan penduduk yang berkualitas, jika tidak memperbaharui diri sesuai dengan tantangan strategis yang berkembang. MAN-IC, yang didirikan dengan semangat Islam-Modernis, merupakan madrasah percontohan, terutama dalam pembelajaran agama dan sains/teknologi. Sekarang lembaga ini tidak hanya ditantang oleh tantangan lama, yaitu menemukan karakter Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan dan tantangan modernisasi, melainkan juga tantangan baru, yaitu demokratisasi (termasuk otonomi daerah) dan globalisasi. Melalui metode *Rapid Assessment* terhadap sistem penyelenggaraan (*governance*), manajemen, tenaga pendidik, kurikulum, peserta didik serta cara pembelajaran pada dua dari tiga MAN-IC (yaitu di Jakarta dan Jambi), nampaklah ketidakseimbangan sekaligus ketidaksiapan lembaga ini dalam merespon tantangan-tantangan tersebut. Pembaharuan pada hal-hal tersebut di atas yang diajukan dalam tulisan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan responsif MAN-IC dalam menyiapkan generasi mendatang.

Kata Kunci: Pendidikan, Madrasah, *Governance*, Manajemen, Modernisasi, Demokratisasi, Globalisasi

DDC: 300.380

Syarifah Aini Dalimunthe

MENDUKUNG MASYARAKAT MISKIN KOTA MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM: MENYUSUN PESAN ADAPTASI YANG EFEKTIF

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, Desember 2014, Hlm. 137-148

Pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi sipil masyarakat di Indonesia sudah mengkomunikasikan perubahan iklim kepada khalayak luas. Contoh komunikasi yang ada adalah aktivitas ‘hijau’ seperti *bike to work*, *car-free days*, dan bangunan yang berkonsep efisien energi. Namun demikian pertanyaan sederhana yang muncul: apakah tipe komunikasi seperti ini mampu memberi manfaat kepada kelompok yang paling rentan? Tulisan ini memberikan gambaran kebutuhan informasi dari masyarakat miskin kota ketika menghadapi perubahan iklim, terutama media apa yang dipercaya oleh masyarakat miskin perkotaan, pilihan sumber informasi dan bagaimana mereka ingin informasi tersebut disajikan. Sebagai contoh, tulisan ini memberikan model pengemasan pesan adaptasi terhadap perempuan miskin perkotaan. Perempuan miskin perkotaan ternyata masuk dalam kategori *struggling* (41%), mengalami dampak perubahan iklim namun tidak memiliki sumberdaya dan dukungan untuk melakukan aksi adaptasi. Dengan memahami kebutuhan informasi dan model pengemasan informasi, akan mendukung efektivitas pesan adaptasi perubahan iklim. Data dari riset ini dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan survei terhadap 928 masyarakat miskin kota di Indonesia.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Perkotaan, Adaptasi, Media, Komunikasi



DDC: 300.303

Luh Kitty Katherina

**URBANIZATION TREND IN INDONESIA'S
SECONDARY CITIES, 1990-2010**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, December 2014, Page 73-82

Urbanization is identical to the main city in the country as a location of the capital accumulation that is the main attraction of high economic activities. But in fact, the phenomenon of urbanization has penetrated even mega-urbanization in the second tier cities in the country. This paper takes the case of Indonesia's secondary cities that are beginning to have an important role in moving the national economy and balancing regional development. The cities are Surabaya, Bandung, Medan, Semarang and Makassar. These cities are experiencing accelerated growth in demography, economic and physical. These growth spurt cause land requirements in cities are no longer able to be fulfilled so the urban activities began to spread to the surrounding areas. Urban areas is widening to suburban areas. National Population Censuses in the period 1990-2010 shows the rate of population growth in the secondary cities lower than their surrounding areas. This indicates that urban activities of secondary cities had passed the administrative boundaries of the city, merge with the surrounding area. This paper will describe the trends of urbanization that occurred in Indonesia's secondary cities using descriptive analytic approach through comparison of data from National Population Censuses 1990, 2000 and 2010. In general, the trends of urbanization in Indonesia's secondary cities shows a pattern that is the rate of population growth in urban area closely related to the size of the city.

Keywords: Trend, Urbanization, Secondary Cities, Surrounding Area, Population Growth

DDC: 300.331

Hennigusnia

**GENDER WAGE GAP IN INDONESIA: GLASS
CEILING OR STICKY FLOOR?**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, December 2014, Page 83-96

This study looked the gender wage gap in Indonesia from 2008-2012. In addition to looking at the wage gap average level, the study also looked at the wage gap at different quantile of the wage distribution, so it can be known whether the wage gap widened at the top of the wage distribution (indicative of "glass ceiling") or widened at the bottom of the wage distribution ("sticky floor"). This study used data Sakernas 2008-2012 to estimate the wage equation of men and women using OLS standard. Then, the Oaxaca-Blinder decomposition method (1973) is used to determine the magnitude of the gender wage gap based on gender that caused by the characteristic factors (explained effect) and the discrimination factor (unexplained effect). As for determining the gender wage gap in different quantile of the wage distribution using quantile regression and applying decomposition Machado – Mata (2005). This study found that the gender wage gap was still dominated by factors that can not be explained (unexplained) and was indicated as discrimination, both at the average level and in each quantile of the wage distribution. This study also found evidence of sticky floor in Indonesia.

Keywords: Wage Decomposition, Wage Diskrimination, Quantile Regressions, Glass Ceiling, Sticky Floor

DDC: 300.305

Vanda Ningrum, Intan Adhi Perdana Putri, and Andini Desita Ekaputri.

EXPENDITURE PATTERN AND LIFESTYLE OF YOUNG MIDDLE CLASS POPULATION: EMPIRICAL STUDY FROM URBAN CITIES OF GREATER JAKARTA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, December 2014, Page 97-108

Youth occupies a great segment of population in metropolitan cities. Since the era of industrialization in 1980s, many of these youth are categorised as middle class group. Their expenditure patterns and lifestyle have a strong influence to the country economics as well as urban planning regulations. This paper aims to analyse the behaviour of youth who perceived themselves as young middle class population based on their expenditure pattern and lifestyle. The research surveyed those whose age spans from 18 to 35 years old, reside and work in the urban cities, namely Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. Results of the survey showed, there is a different pattern of consumption between young middle class population who are single and married. Single individuals tend to spend their monthly income for food culinary as their first priority. In the other hand, young marriage couple tends to spend their income for paying their house or car loans. Although, in average, young middle class frequently visit shopping malls, their expenditure on entertainment is not their top priority from total expenditure per month. Their main reason visiting malls is to seek for a convenient environment compared to spending their income as a mean to reach a certain social status. Given the imbalance between growing number of malls (supply) and lack of spending (demand), moratorium of malls can be one regulations issued by the government to provide alternative public areas or Open Green Areas (RTH) such as parks.

Keywords: Youth, Middle Class, Greater Jakarta, Expenditure Pattern, Lifestyle

DDC: 600.643

Angga Sisca Rahadian

FULFILLING THE RIGHT FOR EXCLUSIVE BREASTFEEDING AMONG WORKING WOMEN: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, December 2014, Page 109-118

Women participation in the business today cannot be neglected. Demographic data shows that the proportion of women in the total labor force from year to year is exhibiting an upward trend. The data also shows that approximately 66% of the working womens are at their reproductive age. Given on these circumstances, the aim of this paper is to study challenges as well as opportunities of fulfilling the right for exclusive breastfeeding among working women. This study uses data from in-depth interview of working women and direct observation in office environment. The study found that the number of working women able to do exclusive breastfeeding is still far from the expectation. On this founding, the study identified that the lack of support from both physical and social environments is the major reason. Most of respondents have not lactation room in their office and if they want to express the milk, they have to use improper room, even in the toilet. In addition, they did not get support from their colleagues and it can influence the production of milk. Meanwhile, based on PP No. 33 Tahun 2012 about ASI Eksklusif states that workplace have to provide lactation room for their employee who breastfeed. The recommendation of this study are (1) authorized institution have to encourage workplace to provide the lactation room and the support facilities according to their financial ability (2) the workplace should make a campaign about exclusive breastfeeding with posters or brochures so it can increase awareness and knowledge to support ASI Eksklusif program (3) a strict sanction must be applied for the workplace which do not provide lactation room.

Keywords: Working Women, Exclusive Breastfeeding, Health

DDC: 700.707

Makmuri Sukarno

DEVELOPING INSAN CENDEKIA HIGH SCHOOL TO ADDRESS MODERNISATION, DEMOCRACY, AND GLOBALISATION CHALLENGES

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, December 2014, Page 119-136

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN-IC) faces, similar with other schools, disfunctional in preparing people that are more qualified, if the institution does not reform it-self along with the strategic challenges which are developing. MAN-IC, that was build based on Modernist-Islam spirit, is a model madrasah especially with regard to its religious and science & technology teaching practices. Nowadays, this institution is not only challenged with old challenges, that are searching Islamic as well as Indonesian characters and modernization, but also with the new ones, that are democratization including local otonomy and globalization. Rapid Assessment method to see its governance, management, curriculum, and teaching-learning aspects within the two of three existing MAN-ICs (which are located in Jakarta and Jambi) reveals the imbalances and un-readiness of those institution in facing those challenges. Reform on those aspects proposed by this article is assumed to be empowering its responsive ability in preparing future generation.

Keywords: Education, Madrasah, Governance, Management, Modernization, Democratisation, Globalization.

DDC: 300.380

Syarifah Aini Dalimunthe

SUPPORTING URBAN POOR FACING CLIMATE CHANGE: CREATING EFFECTIVE ADAPTATION MESSAGES

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 9, No. 2, December 2014, Page 137-148

Government, international agencies, civic society, and media organizations in Indonesia have communicated climate change to people. The examples are communication campaigns focusing on “green” activities, such as bike to work, car-free days, and energy-efficient buildings. One simple question arises in the practice: could these types of communication reach and provide benefits for the most vulnerable group? This paper offers an overview of urban poor audience needs of information, particularly on what media they use, who they talk to and trust, and how they would like Information delivered to them. As an exercise in crafting messages, women in urban poor will be put as the priority audience. This group falls into the struggling segment (41%). They are experiencing the most impact and cannot take much action. The struggling is willing to make changes, but lack of information and support prevents them from taking action. By understanding this sort of information, it will support delivering effective climate change adaptation messages. The methods included in this research are in-depth interviews, focus group discussion, and survey to 928 urban poor in Indonesia.

Keywords: Adaptation, Climate Change, Communications, Media

POLA PENGELUARAN DAN GAYA HIDUP PENDUDUK MUDA KELAS MENENGAH: STUDI EMPIRIS PERKOTAAN DI JABODETABEK¹

(EXPENDITURE PATTERN AND LIFESTYLE OF YOUNG MIDDLE CLASS POPULATION: EMPIRICAL STUDY FROM URBAN CITIES OF GREATER JAKARTA)

Vanda Ningrum*, Intan Adhi Perdana Putri, dan Andini Desita Ekaputri***.**

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Korespondensi Penulis: *) vanda.ningrum@gmail.com, **) intanadhi@gmail.com, ***) adesita@gmail.com

Abstract

Youth occupies a great segment of population in metropolitan cities. Since the era of industrialization in 1980s, many of these youth are categorised as middle class group. Their expenditure patterns and lifestyle have a strong influence to the country economics as well as urban planning regulations. This paper aims to analyse the behaviour of youth who perceived themselves as young middle class population based on their expenditure pattern and lifestyle. The research surveyed those whose age spans from 18 to 35 years old, reside and work in the urban cities, namely Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. Results of the survey showed, there is a different pattern of consumption between young middle class population who are single and married. Single individuals tend to spend their monthly income for food culinary as their first priority. In the other hand, young marriage couple tends to spend their income for paying their house or car loans. Although, in average, young middle class frequently visit shopping malls, their expenditure on entertainment is not their top priority from total expenditure per month. Their main reason visiting malls is to seek for a convenient environment compared to spending their income as a mean to reach a certain social status. Given the imbalance between growing number of malls (supply) and lack of spending (demand), moratorium of malls can be one regulations issued by the government to provide alternative public areas or Open Green Areas (RTH) such as parks.

Keywords: Youth, Middle Class, Greater Jakarta, Expenditure Pattern, Lifestyle

Abstrak

Penduduk muda menempati porsi yang besar dalam struktur penduduk di kota metropolitan. Sejak proses industrialisasi tahun 1980an berlangsung, tidak sedikit diantara penduduk muda tersebut termasuk dalam kelas menengah. Pola pengeluaran dan gaya hidup mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam perekonomian dan kebijakan tata kota. Tulisan ini menganalisis perilaku penduduk muda yang termasuk dalam kategori kelas menengah berdasarkan atas pola pengeluaran dan gaya hidup. Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap penduduk berusia 18 hingga 35 tahun, tinggal dan bekerja di perkotaan yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hasil survei menunjukkan terlihat adanya perbedaan pola konsumsi antara penduduk muda kelas menengah yang belum dan sudah menikah. Penduduk yang belum menikah lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk makanan sebagai prioritas pertama, sedangkan penduduk yang sudah menikah untuk membayar cicilan rumah dan kendaraan. Meskipun rata-rata penduduk muda kelas menengah memiliki frekuensi pergi ke mal tinggi, tetapi besarnya pengeluaran untuk hiburan tidak menjadi prioritas utama dalam total pengeluaran per bulannya. Alasan utama hiburan mengunjungi mal adalah untuk mendapatkan suasana yang nyaman dibandingkan membelanjakan pendapatan sebagai status sosial. Moratorium mal bisa menjadi implikasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau seperti taman sebagai alternatif kebijakan pemerintah kota menyediakan tempat hiburan.

Kata Kunci: Penduduk Muda, Kelas Menengah, Jabodetabek, Pola Pengeluaran, Gaya Hidup

¹ Sebagian tema dari tulisan ini telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional “Pertemuan Ilmiah Nasional Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan”. Diselenggarakan oleh Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia, pada tanggal 26-28 November 2014 di Bandung.

PENDAHULUAN

Lebih dari separuh penduduk dunia atau 50,5 persen adalah penduduk usia muda² (The World's Youngest Populations, Euromonitor International, 2012). Mayoritas penduduk muda tersebut hidup di negara-negara berkembang. Pada tahun 2020, diprediksi jumlah penduduk muda di negara berkembang mencapai 89 persen³ dari total penduduk muda di dunia. Di Indonesia, penduduk usia muda dengan rentang usia 15 hingga 34 tahun pada tahun 2012 sebesar 34,16 persen atau sebesar 245 juta⁴ jiwa. Besarnya angka penduduk usia muda ini tidak terlepas dari penurunan angka kelahiran maupun tingkat kesuburan serta peningkatan penduduk usia kerja. Di sisi lain, total populasi Indonesia tumbuh dengan lamban. Dari perspektif demografis, besarnya penduduk usia muda dapat berfungsi sebagai mesin penggerak perekonomian. Usia muda, khususnya pada usia produktif, dianggap secara fisik dan mental seharusnya mampu melakukan kegiatan ekonomi yang menggerakkan perekonomian bangsa. Sebagian besar penduduk muda di Indonesia tinggal di perkotaan, hal ini terefleksikan dari persentase penduduk perkotaan mencapai 54 persen⁵ pada tahun 2012 dan diprediksi naik menjadi 67 persen⁶ di tahun 2050.

Penduduk perkotaan juga memiliki peran yang besar dalam menyumbang kelas menengah. Liberalisasi dan industrialisasi yang terjadi di Indonesia sejak pemerintahan rezim orde baru di tahun 1980, memunculkan jenis pekerjaan baru seperti bisnis eksekutif, manajer, analis saham, insinyur, bankir, pengacara, akuntan, pekerja kerah putih, dan profesional lainnya. Jenis pekerjaan baru tersebut menstimulasi tumbuhnya kelas menengah baru khususnya di perkotaan⁷. Selain itu, melalui liberalisasi perdagangan, akses informasi terbuka dengan cepat, termasuk masuknya budaya konsumerisasi global. Terintegrasinya pasar global ke Indonesia mempengaruhi pola konsumsi dan gaya hidup melalui iklan komersial, majalah mode, majalah gaya hidup, hiburan, dan klub-klub sosial yang menciptakan kelas

menengah di Indonesia (Ansori, 2009, dan Prawiro, 1998).

The Boston Consulting Group/ BCG (2013) melaporkan bahwa kelompok konsumen kelas menengah di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 74 juta jiwa dan pada tahun 2020 diprediksi akan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 141 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah konsumen kelas menengah di dunia, Indonesia menyumbang 4,34 persen. Jumlah ini terlihat kecil, namun persentasenya lebih besar dibandingkan dengan gabungan dari negara-negara Afrika Sub-Sahara yang hanya menyumbang 2 persen. Bahkan pembagian jumlah konsumen kelas menengah Indonesia tidak akan berbeda jauh dengan gabungan negara-negara Timur Tengah dan Amerika Utara yang menyumbang 5 persen dari total konsumen kelas menengah di Dunia. Daerah di Indonesia yang akan mengalami kenaikan jumlah konsumen kelas menengah adalah Jawa dengan penambahan jumlah sebesar 23 juta jiwa pada tahun 2020, disusul oleh Pulau Sumatera yang pada tahun 2020 sebesar 17 juta jiwa, dan ketiga adalah Jabodetabek (*Greater Jakarta*) sebesar 12 juta jiwa. Meskipun Jabodetabek secara geografis tidak terlalu luas seperti kota lainnya di Indonesia, tetapi pertumbuhan industrialisasi yang pesat di wilayah ini, menjadi pusat kajian pertumbuhan penduduk usia muda perkotaan di Indonesia bahkan Asia Tenggara yang menarik untuk dikaji.

Tulisan ini bertujuan menganalisis perilaku penduduk muda yang termasuk dalam kategori kelas menengah berdasarkan atas pola pengeluaran dan gaya hidup. Penduduk muda adalah penduduk dengan rentan usia 18 hingga 35 tahun, tinggal dan bekerja di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sistematika penulisan terbagi dalam empat bagian; bagian pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan tren penduduk muda dan pandangan tentang kelompok masyarakat kelas menengah. Bagian kedua menyajikan karakteristik demografi penduduk kelas menengah. Bagian ketiga menganalisis pola pengeluaran dan gaya hidup penduduk muda kelas menengah di Jabodetabek.

² Definisi usia muda yang digunakan oleh Euromonitor International adalah penduduk berusia kurang dari 30 tahun.

³ Berdasarkan analisis ILO dalam makalah "Menciptakan Peluang Bagi Kaum Muda" dengan sumber data dari United Nation World Population Prospect, 1998.

⁴ Berdasarkan data proyeksi penduduk yang dikeluarkan oleh BAPPENAS, BPS, dan UNFPA tahun 2013

⁵

<http://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/21232065/Hampir.54.Persen.Penduduk.Indonesia.Tinggal.di.Kota>

⁶ Berdasarkan Prediksi PBB dalam makalah "Menciptakan Peluang Bagi Kaum Muda" dengan sumber data dari United Nation World Population Prospect, 1998.

⁷ Diambil dari tulisan Ansori 2009 yang mengutip dari tulisan Liddle "New Middle Class in Indonesia" dalam buku bunga rampai R. dan Young dengan judul "The Politics of Middle Class in Indonesia". Liddle menyatakan bahwa Pertumbuhan industrialisasi adalah tujuan utama dari Rezim Orde Baru. Produk utama yang dihasilkan dari kebijakan tersebut adalah peningkatan jumlah kelas menengah secara signifikan.

Bagian terakhir memberikan gambaran tentang implikasi kebijakan dari karakteristik pengeluaran kelas menengah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data survey dengan menggunakan kuesioner terstruktur daring/online melalui *google form*. Tautan kuesioner kemudian dikirim dan disebar melalui *e-mail* atau media sosial (*facebook*, *twitter* dan *path*). Rentang waktu penyebaran kuesioner daring adalah 11 Juli 2014 sampai dengan 8 Agustus 2014. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik kombinasi sampling (*mixed method*) yaitu campuran teknik QUAN (kuantitatif) dan QUAL (kualitatif) (Teddlie dan Yu, 2007). Teknik QUAN dilakukan untuk validitas data berdasarkan jumlah sampel yang diperoleh. Respon yang diperoleh dalam kurun waktu penyebaran kuesioner adalah 227 responden. Setelah melalui *editing*, *coding* dan pembersihan data, diperoleh jumlah sampel yang dapat dianalisis sebesar 201 responden. *Margin of error* berdasarkan hasil perhitungan adalah 6,9 persen dengan selang kepercayaan 95 persen. Sedangkan pemilihan responden didekati dengan teknik QUAL yaitu *purposive sampling* secara *snowball*. Menurut Tashakkori dan Teddlie (2003) dalam Teddlie dan Yu (2007), teknik *purposive sampling* meliputi pemilihan unit atau kasus dengan memperhatikan tujuan khusus ketimbang secara random. Berdasarkan tujuan penelitian, maka responden yang dipilih memperhatikan pertimbangan berikut, responden tinggal dan bekerja di daerah Jabodetabek, penduduk dengan rentan usia 18 sampai dengan 35 tahun, dan responden bersedia untuk mengisi kuesioner daring. Sementara itu, teknik *snowball* dilakukan karena responden dalam penelitian ini spesifik sehingga responden relatif sulit untuk diketahui keberadaannya (Fielding et al, 2008). Kuesioner dikirim melalui surat elektronik (*email*) kepada beberapa responden yang dipilih kemudian responden tersebut diminta informasi (*email* dan akun sosial media) mengenai keberadaan responden yang sesuai dengan penelitian. Selanjutnya, responden diminta kesediaanya untuk meneruskan kuesioner daring melalui email ataupun media sosial kepada responden lainnya dengan syarat seperti sudah disebutkan sebelumnya. Meskipun teknik ini akan menghasilkan responden yang hegemoni, tetapi tujuan penelitian yang melihat penduduk muda kelas menengah dengan karakteristik spesifik dapat tercapai.

Analisis penelitian penduduk kelas menengah muda ini menggunakan analisis statistika deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan data survey dalam bentuk Tabel dan grafik sebagaimana adanya tanpa mengeneralisir kesimpulan akhir (Sugiyono, 2004).

KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PENDUDUK KELAS MENENGAH

Pandangan klasik tentang stratifikasi kelas di masyarakat telah dimulai sejak abad ke-19 melalui teori Thorstein Veblen (1899) dan Karl Marx (1977)⁸. Veblen dalam teori "*leisure class*" membagi masyarakat dalam dua kelas yaitu kelas pekerja yang berjuang mempertahankan hidup dan kelas yang banyak mempunyai waktu luang karena kekayaannya. Sementara Marx membedakan kelas masyarakat berdasarkan atas kontrol produksi yaitu kelas *bourgeoisie*, *petty bourgeoisie*, dan *proletarian*. Konsep kelompok kelas di masyarakat kemudian berkembang di berbagai negara. Kharas dan Gertz (2010) mendefinisikan kelas menengah adalah penduduk dengan pengeluaran harian antara \$10 hingga \$100 per orang dalam *purchasing power parity terms*. Selanjutnya Benerjee dan Duflo (2007) mengukur kelas menengah bawah dengan pengeluaran perhari antara \$2 hingga \$4 per orang dan kelas menengah atas antara \$6 hingga \$10 per orang di negara berkembang. Sementara itu, Boumphrey dan Bevis (2013) dengan menggunakan data pendapatan, mendefinisikan kelas menengah dalam beberapa definisi antara lain rumah tangga dengan penghasilan 50 persen hingga 100 persen dari rata-rata pendapatan kotor agregat, rumah tangga dengan pendapatan untuk konsumsi minimal \$10.000 pertahun (untuk negara maju), atau *discretionary income*⁹ lebih dari 30 persen. Pendekatan pengeluaran juga digunakan oleh World Bank (2014) dalam menentukan kelas menengah di Indonesia, Penduduk dengan pengeluaran perkapita lebih dari Rp. 950.000 masuk dalam kelas konsumen menengah, meskipun rentan untuk jatuh miskin.

Selain pendekatan pengeluaran dan pendapatan pada penjelasan sebelumnya, pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian kelas menengah semakin berkembang. Chua (1997) dalam studinya di Singapura, membagi kelas menengah berdasarkan atas jenis pekerjaan yaitu *middle management* (manajer tingkat menengah) dan *independent operator* di sektor swasta. Begitu juga dengan Goldthorpe dan McKnight (2004) yang membagi kelas masyarakat berdasarkan

⁸ Dapat dilihat juga pada tulisan King, Victor, T. 2008. The Middle Class In Southeast Asia: Diversities, Identities, Comparisons And The Vietnamese Case. *IJAPS* Vol. 4, No. 2 (November) 2008.

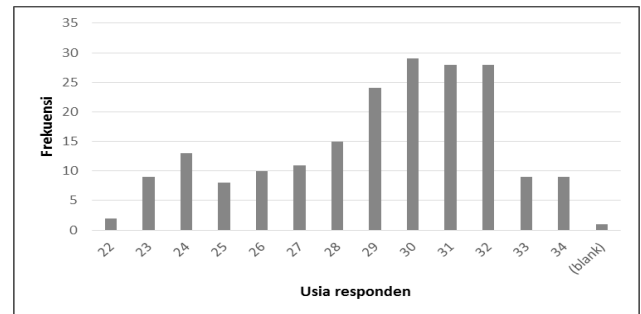
⁹ Discretionary Income adalah pendapatan yang telah dikurangi pajak, hutang, dan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.

jenis pekerjaan di London, Goldthorpe mengklasifikasikan kelas menengah adalah penduduk dengan jenis pekerjaan profesional, teknisi, administrasi, baik pada level yang tinggi hingga ke rendah. Pandangan berbeda dikemukakan oleh Gunn (1993 dan 1997) yang menyatakan karakteristik kelas menengah tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi tetapi juga pada karakteristik politik dan demokrasi. Gunn menyimpulkan bahwa Brunei Darussalam termasuk dalam *underdeveloped civil society* karena dicirikan dengan rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Pandangan ini mengindikasikan bahwa walaupun secara ekonomi penduduk Brunei termasuk sejahtera tetapi tidak digolongkan dalam kelas menengah. Di Filipina, Batutista (2006) mengelompokkan kelas menengah adalah masyarakat terdidik yang memiliki keterampilan bekerja. Kelompok kelas tersebut banyak bekerja di luar negeri karena sempitnya kesempatan kerja di Filipina.

Di Jakarta dan sekitarnya, berkembangnya industrialisasi menciptakan berbagai bentuk pekerjaan yang spesifik khususnya pekerjaan dalam kategori formal, munculnya berbagai tipe pekerjaan tersebut menciptakan kelas menengah di perkotaan (Dhakidae, 2001). Mengikuti Dhakidea (2001) dan Goldthorpe (2004), Studi ini melihat kelas menengah sangat ditentukan oleh tipe pekerjaan yang jalankan. Selain itu, Jenis pekerjaan juga sangat berpengaruh pada besarnya pendapatan yang diperoleh, kontrak kerja yang terjamin, dan keamanan keuangan keluarga (Goldthorpe dan McKnight, 2004). Pada akhirnya, karakteristik pekerjaan dan pendapatan juga mempengaruhi pola pengeluaran dan gaya hidup kelas masyarakat.

Berdasarkan hasil survey dalam studi ini, memperlihatkan bahwa rata-rata responden berusia 29 tahun. Usia ini dapat dikatakan masih termasuk dalam golongan pemuda namun sudah memiliki pengalaman bekerja selama beberapa tahun. Dari sisi pendidikan, mayoritas responden berlatar belakang pendidikan strata 1 sebesar 65 persen dan strata 2 sebesar 27 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk muda kelas menengah sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Responden yang berlatar belakang S1 lebih banyak laki-laki (70 persen) dibandingkan perempuan (62 persen), sedangkan untuk S2 lebih banyak perempuan (31 persen) dibandingkan laki-laki (23 persen). Survey ini pun menanyakan latar belakang pendidikan formal orangtua responden. Untuk bapak, pendidikan terakhir yang paling sering dijawab oleh responden adalah S1 (37 persen) dan SMA. Sedangkan ibu mempunyai

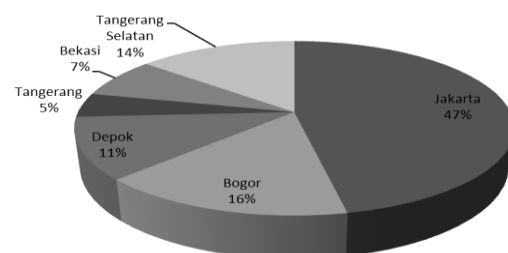
pendidikan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jawaban terbanyak yang muncul adalah SMA atau sederajat (39%) dan S1 (25%).



Gambar 1. Sebaran usia responden penduduk muda kelas menengah

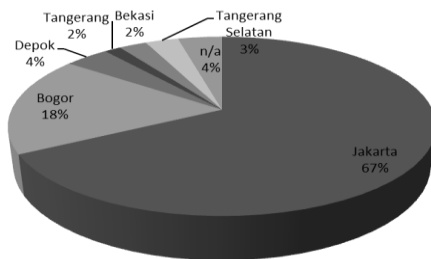
Selanjutnya, dilihat dari status pernikahan, 107 dari 196 responden mengatakan dirinya sudah menikah dan hanya 89 responden yang belum menikah. Hal yang menarik untuk dilihat adalah proporsi responden perempuan yang belum menikah lebih banyak dibandingkan proporsi laki-laki yang belum menikah. Hal ini berbeda dengan kondisi di tahun 1980-an dimana perempuan rata-rata sudah menikah di awal umur 20an. Salah satu kemungkinan hal ini terjadi adalah perubahan persepsi terhadap perempuan dan karena mulai terbukanya isu kesetaraan gender sehingga perempuan lebih memilih untuk bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri dibandingkan membentuk keluarga terlebih dulu. Namun, 38 persen dari total responden yang sudah menikah belum memiliki anak. Bagi yang sudah memiliki anak, kebanyakan penduduk muda ini baru memiliki satu anak saja (38%). Walaupun begitu, jumlah anak yang diinginkan atau direncanakan oleh sebagian besar responden adalah sebanyak dua atau tiga anak.

Dari total 201 responden penelitian (Gambar 2), sebagian besar tinggal di ibukota Jakarta (47 persen). Sisanya menyebar di kota-kota sekitar Jakarta yaitu Bogor (16 persen), Tangerang Selatan (14 persen), Depok (11 persen) dan sebagian kecil di Bekasi dan Tangerang.



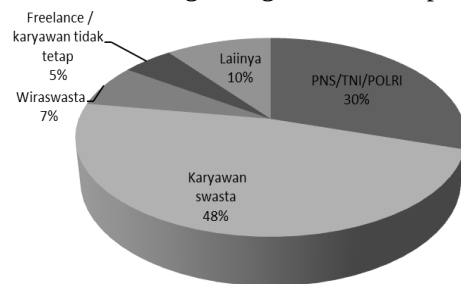
Gambar 2. Persebaran Tempat Tinggal Responden

Jakarta sebagai kota inti yang menyumbang peningkatan kelas menengah muda, menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan sekitarnya. Hal ini terlihat dari sebagian besar responden bekerja di Jakarta meskipun berbeda dengan lokasi tempat tinggal. Data menunjukkan 68 persen bekerja di Jakarta, diikuti 18 persen bekerja di Bogor dan sisanya bekerja di kota lainnya. Sebagian besar dari responden tersebut memiliki lokasi tempat tinggal yang sama dengan lokasi bekerja. Sebagai contoh, sekitar 60 persen responden yang tinggal di Jakarta dan Bogor juga bekerja di lokasi yang sama dengan tempat tinggal.



Gambar 3. Persebaran Tempat Bekerja Responden

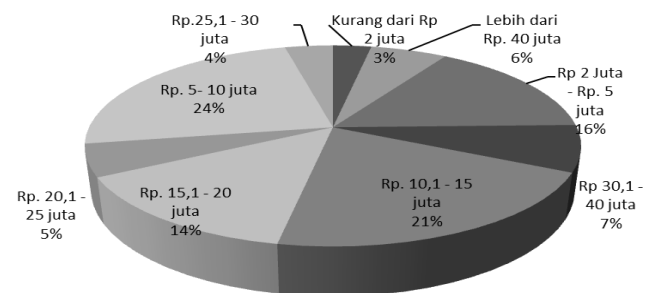
Lapangan pekerjaan yang umumnya digeluti oleh responden adalah sebagai karyawan swasta (48 persen) dan kemudian pegawai negeri dan sejenisnya (30 persen). Meningkatnya lapangan pekerjaan penduduk muda sebagai PNS tidak terlepas dari peran pemerintah membuka lowongan pekerjaan¹⁰ bagi penduduk berusia 18 hingga 35 tahun. Sementara itu, Pekerjaan yang bersifat mandiri atau swadaya seperti wiraswasta dan freelancer belum begitu digeluti oleh responden.



Gambar 4. Jenis Pekerjaan Responden

Dari segi pendapatan, rata-rata pendapatan kelas menengah muda dalam penelitian per bulannya berkisar di dua segmen yaitu 5-10 juta rupiah (24

persen) dan Rp 10,1-15 juta rupiah (21 persen). Walaupun belum ada standar formal bagi negara-negara berkembang di Asia untuk besaran pendapatan yang dapat dikatakan sebagai kelas menengah di Indonesia, tetapi kedua segmen ini bisa dikatakan sudah jauh di atas Upah Minimum Regional (UMR). UMR wilayah Jakarta dan sekitarnya rata-rata berkisar di antara Rp 2-3 juta rupiah. Kondisi ini memperjelas posisi penduduk muda ini di dalam strata ekonomi masyarakat perkotaan sebagai kelas menengah muda. Menurut Thurow (1987) kelas menengah berdasarkan pendekatan relatif di Amerika Serikat adalah masyarakat yang memiliki pendapatan antara 75 persen dan 125 persen dari titik tengah (median) pendapatan perkapita. Namun sampai saat ini belum ada studi yang secara khusus meneliti standar pendapatan per kapita kelas menengah di Asia, atau di negara-negara berkembang, bahkan lebih khusus ke penduduk muda kelas menengah.



Gambar 5. Pendapatan Perbulan Responden

Hubungan antara pendapatan dan usia terlihat pada Tabel 1. Penduduk muda kelas menengah yang belum mencapai usia 30 tahun rata-rata berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah. Salah satu alasannya adalah karena “jam terbang” atau pengalaman kerja yang belum banyak. Sedangkan pada penduduk muda kelas menengah yang berusia “late 20s” atau masuk ke usia 30 tahun ke atas, penghasilan rata-rata mereka per bulan lebih besar. Tiga puluh delapan responden bahkan memiliki penghasilan per bulan dengan nominal delapan digit. Mereka yang berpenghasilan tinggi ini umumnya bekerja sebagai karyawan swasta yang sudah memiliki posisi manajerial dan wiraswasta.

¹⁰ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mencatat sebanyak 2.246.886 pelamar

mendaftar dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 hingga Selasa (23/9/2014).

Tabel 1. Kisaran Pendapatan Per Bulan Responden Berdasarkan Faktor Usia.

Pendapatan \ Umur	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	n.a	Total
Kurang dari Rp. 2 juta		1	1		1					2					5
Rp. 2 - 4 juta	1	6	5	2	7	3	4	5	3	9	8	1	1		55
Rp. 4,1 - 6 juta	1	2	5	5		3	7	9	8	10	3	2	1		56
Rp. 6,1 - 8 juta					1	1	1	7	8	1	7	4	2		32
Rp. 8,1 - 10 juta			2	1	1	2	2		1					1	10
Rp.10,1 - 15 juta						1	1	2	6	3	4	1			18
Rp 15,1 - 20 juta						1		1	1	1	4		2		10
Lebih dari Rp. 20 juta									2	2	2	1	3		10
Total	2	9	13	8	10	11	15	24	29	28	28	9	9	1	196

POLA PENGELUARAN DAN GAYA HIDUP PENDUDUK MUDA KELAS MENENGAH DI JABODETABEK

Studi pola pengeluaran keuangan dalam masyarakat sangat penting untuk memahami perbedaan perilaku individu atau keluarga dalam menganalisis pengelolaan keuangan (Gudmunson dan Danes, 2011). Pengelolaan keuangan tersebut meliputi pengetahuan seseorang dalam mengelola pendapatan individu atau keluarga untuk mencapai manfaat yang maksimal, dengan tetap menjamin kelangsungan ekonomi dan sosial individu atau keluarga. Pola pengeluaran tidak terlepas dari keputusan seseorang dalam rumah tangga dalam membelanjakan pendapatannya. Keputusan pembelanjaan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor ekonomi, sosial, maupun demografi. Yusuf dan Duasa (2010) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa jender sangat berpengaruh kepada keputusan besarnya membelanjakan kebutuhan. Selain itu, Sekhampu dan Niyimbanira (2013) juga menambahkan bahwa karakteristik demografi dan sosial seseorang berpengaruh pada pola pengeluaran seseorang.

Analisis pola pengeluaran penduduk muda kelas menengah juga dapat menggambarkan gaya hidup kelas sosial tersebut. Di era globalisasi, Ansori (2009) mengemukakan bahwa budaya ke mal dan kafe tenda di Jakarta adalah salah satu ilustrasi yang sangat cocok digunakan dalam menjelaskan bagaimana kelas menengah di perkotaan diproduksi ataupun reproduksi

melalui budaya konsumsi. Sementara Zhang (2009) memperlihatkan peningkatan kelas menengah di Cina menyebabkan permintaan akan produk mewah seperti bermain Golf menjadi besar. Dua temuan dari studi tersebut ternyata belum memperlihatkan gaya hidup kelas menengah di Jabodetabek seperti dalam tulisan ini.

Bagian ini akan menganalisis pola pengeluaran penduduk muda kelas menengah yang telah menikah dan belum menikah (lajang) di perkotaan yang memiliki status pekerjaan formal dan pendapatan berkisar Rp. 5 hingga 10 juta rupiah perbulan. Pola pengeluaran dilihat dari persentase pengeluaran individu atau keluarga terhadap total pendapatan berdasarkan kebutuhan (Tabel 2 dan 3). Pada kelompok penduduk muda kelas menengah yang belum menikah, terlihat bahwa pengeluaran untuk makanan adalah urutan pengeluaran dengan urutan pertama terbesar, diikuti oleh transportasi, selanjutnya tabungan dan hiburan. Pengeluaran untuk makanan sangat rentan dengan meningkatnya harga bahan pangan dan frekuensi makan di luar rumah seperti restoran atau kafe. Sementara itu pengeluaran transportasi sangat tergantung dengan jarak antara rumah dan tempat tinggal serta moda transportasi yang digunakan untuk bekerja. Bagi penduduk muda yang belum menikah ada bagian dari pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan dan sisanya digunakan untuk hiburan sesuai dengan gaya hidup.

Tabel 2. Urutan Pengeluaran Bulanan Responden Yang Belum Menikah.

JENIS PENGELUARAN	Ranking pengeluaran*									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	n/a	
Makanan	36	14	17	8	6	5	2		1	89
Cicilan	14	8	11	1	2	4	9	30	10	89
Tabungan	10	11	24	11	14	6	7	3	3	89
Transportasi	9	31	9	12	10	5	5	4	4	89
Pendidikan	9	5	7	6	6	15	14	18	9	89
Kesehatan	8	7	11	8	14	11	20	7	3	89
Listrik, air, telepon dan kabel	7	8	15	11	10	11	9	16	2	89
Hiburan	6	9	23	20	11	10	2	3	5	89

keterangan:

- a) termasuk makanan yang dimasak di rumah atau beli di luar rumah
b) cicilan adalah pembayaran hutang bulanan baik untuk rumah atau kendaraan
1 adalah pengeluaran dengan urutan paling besar dalam rata-rata pengeluaran perbulan
8 adalah pengeluaran dengan urutan terkecil dalam rata-rata pengeluaran perbulan

Pada kelompok penduduk yang sudah menikah (Tabel 3), terlihat bahwa urutan pengeluaran terbesar adalah untuk membayar cicilan perbulan yang meliputi hutang pembelian rumah ataupun kendaraan. Selanjutnya, urutan pengeluaran kedua digunakan untuk kebutuhan makanan dan transportasi. Sementara itu, pengeluaran untuk pendidikan relatif kecil, karena responden pada usia muda tersebut, rata-rata anak yang dimiliki satu

dan sebagian besar belum masuk dalam usia anak sekolah. Di lain sisi, kondisi makro ekonomi Negara seperti fluktuasi tingkat suku bunga, sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran yang tercermin dari besarnya pengeluaran untuk membayar hutang terhadap pendapatan yang diperoleh.

Tabel 3. Urutan Pengeluaran Bulanan Responden Yang Sudah Menikah.

JENIS PENGELUARAN	Ranking pengeluaran*									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	n/a	
Cicilan ^{a)}	50	18	7	2	3	2	6	18	1	107
Makanan ^{b)}	35	30	14	11	4	6	6	1		107
Transportasi	13	21	24	14	18	8	7	1	1	107
Tabungan	13	21	13	19	12	12	12	4	1	107
Pendidikan	9	13	13	13	11	12	13	18	5	107
Hiburan	7	6	22	23	14	15	9	9	2	107
Kesehatan	5	9	14	15	16	14	20	12	2	107
Listrik, air, telepon dan kabel	4	14	16	16	14	12	13	16	2	107

keterangan:

- a) cicilan adalah pembayaran hutang bulanan baik untuk rumah atau kendaraan
b) termasuk makanan yang dimasak di rumah atau beli di luar rumah
1 adalah pengeluaran dengan urutan paling besar dalam rata-rata pengeluaran perbulan
8 adalah pengeluaran dengan urutan terendah dalam rata-rata pengeluaran perbulan

Bagi responden yang memiliki cicilan rumah, biaya yang dikeluarkan untuk membayar cicilan rata-rata sebesar 30 hingga 50 persen dari pendapatan mereka yang telah menikah (Tabel 4). Sementara bagi penduduk yang belum menikah, mereka mengalokasikan untuk membayar cicilan rata-rata sebesar 25 persen dari penghasilan, meskipun ada sebagian kecil yang juga mengalokasikan hingga 50 persen dari pendapatan.

Tabel 4. Persentase Pembayaran Cicilan Hutang terhadap Pendapatan Responden Individu dan Keluarga

Persentase Pembayaran Cicilan Terhadap Pendapatan	Belum Menikah	Menikah
<= 10 persen	23.91%	16.05%
> 10 - 30 persen	52.17%	51.85%
> 30 - 50 persen	17.39%	24.69%
> 50 persen	6.52%	7.41%

Tabel selanjutnya (Tabel 5, 6, dan 7), memperlihatkan rata-rata jumlah pengeluaran untuk makanan, transportasi, dan telepon seluler dari penduduk muda kelas menengah. Pengeluaran responden rata-rata per hari untuk makanan bagi yang belum menikah berkisar dari Rp. 30.000 hingga Rp. 50.000. Sedangkan bagi yang telah menikah rata-rata pengeluaran perhari untuk makanan dua kali lebih besar yaitu antara Rp. 50.000 – Rp. 100.000.

Tabel 5. Rata-Rata Pengeluaran Makanan Per Hari Responden

Rata-Rata Pengeluaran Makanan Per hari	Belum Menikah	Menikah
< = Rp. 50.000	69.49%	28.21%
> Rp 50.000 - 100.000	27.12%	58.97%
> Rp. 100.000	3.39%	12.82%

Seperti halnya pola pengeluaran untuk makanan, besarnya pengeluaran untuk transportasi yang dikeluarkan oleh penduduk yang sudah menikah lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang belum menikah. Hal ini disebabkan responden yang telah menikah harus menanggung biaya transportasi anggota keluarga lainnya. Rata-rata responden yang telah menikah membayar biaya transportasi per hari antara Rp 30.000 hingga Rp. 50.000, sedangkan penduduk yang belum menikah menanggung biaya transportasi perhari rata-rata Rp. 25.000.

Tabel 6. Rata-Rata Pengeluaran Transportasi Responden Per Hari

Rata-Rata Pengeluaran Transportasi Perhari	Belum Menikah	Menikah
< = Rp. 10.000	32.95%	14.02%
> Rp. 10.000 - 20.000	27.27%	21.50%
> Rp. 20.000 - 30.000	19.32%	12.15%
> Rp. 30.000 - 40.000	12.50%	26.17%
> Rp. 50.000	7.95%	26.17%

Hal berbeda bagi pengeluaran pulsa telepon seluler. Data menunjukkan tidak adanya perbedaan antara penduduk muda kelas menengah perkotaan baik yang sudah menikah atau belum. Sebagian besar responden mengeluarkan biaya antara Rp 100.000 – 150.000 setiap bulannya untuk membeli pulsa telepon seluler.

Tabel 7. Rata-Rata Pengeluaran Telpn Seluler Responden Per Bulan

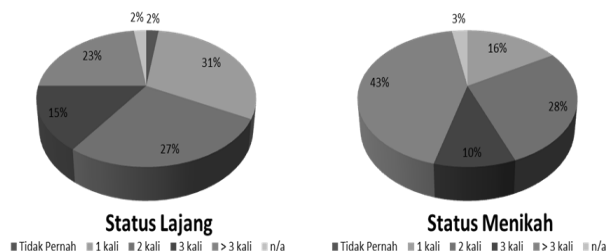
Rata-Rata Pengeluaran Telp Seluler Per Buan	Belum Menikah	Menikah
<= 100.000	46.07%	22.64%
> Rp. 100.000 - 300.000	46.07%	53.77%
> Rp. 300.000 - 400.000	1.12%	10.38%
> Rp. 400.000 - 600.000	5.62%	11.32%
> Rp. 600.000	1.12%	1.89%

Hasil analisis yang ditunjukkan dalam bagian ini memperlihatkan bahwa gaya hidup responden penduduk kelas menengah muda, berbeda dengan gaya hidup yang dikemukakan oleh penelitian Zhang (2009). Zhang menyatakan bahwa meningkatnya kelas menengah muda menyebabkan konsumsi terhadap produk-produk mewah menjadi meningkat seperti budaya Golf di Cina. Penduduk muda kelas menengah lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk pengeluaran pokok seperti rumah, makanan, dan transportasi. Sementara hasil studi ini memperlihatkan bahwa pengeluaran penduduk kelas menengah masih pada pemenuhan kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan tersier lainnya.

Gaya hidup lainnya yang dapat diamati dari hasil survey adalah frekuensi ke mal yang tinggi. Meskipun hasil studi ini menguatkan studi Ansori (2009) yang menyatakan bahwa ke mal dan kafe adalah bagian dari

reproduksi kelas menengah, namun kunjungan ke mal tidak diikuti dengan budaya konsumerisasi yang tinggi. Motif untuk mencari hiburan dan kenyamanan di tempat publik adalah alasan utama untuk menghabiskan waktu luang.

Gambar 6 dibawah memperlihatkan frekuensi penduduk muda kelas menengah berkunjung ke mal dalam sebulan rata-rata lebih dari dua kali. Penduduk muda yang telah menikah rata-rata memiliki frekuensi yang lebih sering dibandingkan dengan penduduk yang belum menikah. Data menunjukkan 31 persen penduduk belum menikah hanya mengunjungi mal satu kali dalam sebulan, 27 persen menyatakan 2 kali, 15 persen menyatakan 3 kali, dan 23 persen mengunjungi mal lebih dari 3 kali. Sementara itu, responden yang telah menikah, memiliki frekuensi mengunjungi mal lebih sering. Hampir separuh responden dengan status menikah atau 43 persen mengunjungi mal lebih dari tiga kali dan hanya 16 persen yang mengunjungi mal satu kali dalam sebulan. Bagi penduduk yang telah menikah, hiburan untuk anak-anak dapat dilakukan dengan mengunjungi mal. Keterbatasan ruang publik terbuka sebagai hiburan keluarga menyebabkan mal sebagai alternatif untuk mengisi waktu luang keluarga.



Gambar 6. Frekuensi Responden Pergi ke Mal

Pada tahun 2012 menurut data Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPI) terdapat 240 mal di seluruh Indonesia, sebagian besar berada di kota-kota besar¹¹. Sementara di Jakarta terdapat 74 mal skala besar dan diprediksi akan terus tumbuh pada tahun-tahun berikutnya. Sarana transportasi juga melengkapi bagian pembangunan mal yang menyebabkan penduduk muda kelas menengah mendapatkan akses yang mudah untuk berkunjung ke mal. Meskipun demikian, tidak sedikit mal di Jakarta dan sekitarnya yang terlihat kosong. Fenomena sepi pengunjung dan tenan di pusat-pusat belanja baru, mengindikasikan Jakarta dan sekitarnya mengalami kejenuhan. Kondisi terjadi karena suplai mal telah melebihi kebutuhan¹². Menjamurnya mal yang tak terkendali mendapat

perhatian pemerintah kota, seperti Pemerintah Jakarta, sehingga pada tahun 2013 Pemkot Jakarta mengeluarkan moratorium pembangunan mal baru di pusat-pusat kota Jakarta¹³. Moratorium tersebut ternyata tidak mengurangi pembangunan yang ada karena pembangunan dialihkan ke wilayah-wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang yang memiliki peningkatan penduduk kelas menengah. Pemahaman tentang gaya hidup kelas menengah tersebut menjadi penting dalam memberikan alternatif bagi pemerintah untuk menyediakan ruang publik hiburan lain yang lebih ramah terhadap lingkungan.

KESIMPULAN

Studi tentang konstruksi kelas menengah yang disebabkan oleh budaya konsumerisasi global dengan tingginya konsumsi produk-produk tersier dan mewah tidak sepenuhnya terlihat dalam studi kelas menengah di Negara berkembang seperti Indonesia khususnya di daerah Jabodetabek. Meskipun penduduk tersebut belum menikah, pengeluaran untuk makanan dan hiburan relatif besar, tetapi pada tahap kehidupan selanjutnya (setelah menikah), dengan jumlah anggota keluarga yang lebih besar, kelas menengah tersebut akan dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan pokok yang mengambil porsi terbesar terhadap pendapatan keluarga. Sebagian besar pendapatan keluarga bagi penduduk muda kelas menengah yang telah menikah digunakan untuk membayar hutang baik rumah maupun mobil. Biaya ini bisa mencapai hingga 50 persen dari pendapatan keluarga. Sementara itu, berbagai kebutuhan dasar lainnya masih harus dipenuhi (makanan, kesehatan dan pendidikan). Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap kemiskinan. Volatilitas kondisi ekonomi negara seperti fluktuasi tingkat suku bunga, Begitu juga dengan peningkatan harga pangan masih berpengaruh pada besarnya pengeluaran perbulan khususnya bagi penduduk yang telah menikah karena hutang yang harus dibayar semakin besar dan kebutuhan lainnya meningkat.

Di lain sisi, Gaya hidup ke mal yang terlihat dari tingginya frekuensi kunjungan ke mal, harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota dalam menyediakan alternatif ruang hiburan. Di Indonesia, tingginya kunjungan kelas menengah ke mal yang dianggap sebagai pasar perkembangan properti pusat pembelanjaan tidak serta merta menciptakan keuntungan bagi para penyewa mal tersebut, karena

¹¹ merdeka.com tanggal 31 Maret 2013

¹² <http://properti.kompas.com/read/2013/06/29/2144085/Jakarta.Kel.ebihan.Pusat.Belanja>.

¹³ Jokowi (Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013) menyatakan tidak menandatangani izin pembangunan 14 mal di Jakarta. <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/17/1552045/Moratorium.Mal.Jokowi.Tak.Gunakan.Pergub>.

kedatangan mereka tidak diikuti dengan pembelanjaan seperti kelas menengah di Negara berkembang lainnya. Mencari hiburan yang bersifat gratis (*windows shopping*) atau murah (makan di *food court*) dan mencari kenyamanan adalah alasan utama tingginya frekuensi penduduk muda kelas menengah di Indonesia pergi ke mal. Hal ini tentunya memperlihatkan adanya ketidak seimbangan antara *demand* dan *supply* mengingat jumlah mal di perkotaan yang sudah menjamur. Oleh karena itu, moratorium pembangunan mal di pusat kota dan penyediaan sarana publik hijau yang lebih banyak dapat menjadi alternatif kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota dalam menanggapi gaya hidup penduduk muda kelas menengah perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M.H. 2009. Consumerism and the Emergence of a New Middle Class in Globalizing Indonesia. *Volume 9, Spring 2009*.
- Banerjee A dan E. Duflo. 2007. What is middle class about the middle classes around the world?. *Center for Economic Policy Research Discussion Paper 6613*.
- Bappenas, BPS, UNFPA. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.
- Bautista, C. 2006. Beyond the EDSA revolts: The middle classes in contemporary Philippines development and politics, dalam buku Hsin-Huang Michael Hsiao (Ed.), *The changing faces of the middle classes in Asia-Pacific*. Taipei: Academia Sinica, Center for Asia-Pacific Area Studies, Research Center for Humanities and Social Sciences.
- Boumphrey, S. dan E. Bevis. 2013. Reaching The Emerging Middle Class Beyond BRIC. Euromonitor International.
- Chua, B.H. 1997. *Communitarian ideology and democracy in Singapore*. London: Routledge, paperback edition.
- Dhakidae, D. 2001. Lifestyles and political behavior of the Indonesian middle classes, dalam buku Hsin-Huang Michael Hsiao (Ed.), *Exploration of the middle classes in Southeast Asia*. Taipei: Program for Southeast Asian Area Studies, Academia Sinica.
- Eisenhauer, J.G. 2008. An Economic Definition of the Middle Class. *For Soc Econ*, 37.
- Febriani, R. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja. Tugas Akhir FEUI. Belum Terpublikasi.
- Fielding, N, R. M. Lee dan G. Blank (Ed.). 2008. *The SAGE Handbook of Online Research Method*.
- Gudmunson, C.G. dan S.M. Danes. 2011. Family Financial Socialization: Theory and Critical Review. *Journal Fam Econ Iss* (2011) 32.
- Gunn, G. C. 1993. Rentier capitalism in Negara Brunei Darussalam, dalam buku K. Hewison, R. Robison and G. Rodan (Eds.), *Southeast Asia in the 1990s: Authoritarianism, democracy and capitalism*. St. Leonards, NSW: Allen and Unwin.
- _____. 1997. Language, power, and ideology in Brunei Darussalam. Athens: Ohio University Center for International Studies, Monographs in International Studies, *Southeast Asia Series*, No. 99.
- International Labor Office. 2004. "Laporan Mengenai Data Tenaga Kerja Muda di Indonesia: Data Terbaru". Jakarta: International Labor Office.
- Juma, A. 2007. Promoting Livelihood Opportunities for Rural Youth: Some Lessons from Tanzania. Paper for IFAD Governing Council Roundtable: Generating Remunerative Livelihood Opportunity for Rural Youth.
- Kharas, H. dan G. Gertz. 2010. The New Global Middle Class: A Cross-Over from West to East. Dalam buku *China's Emerging Middle Class: Beyond Economic Transformation* (Cheng Li, editor). Washington, DC: Brookings Institution Press.
- King, V. T. 2008. The Middle Class In Southeast Asia: Diversities, Identities, Comparisons And The Vietnamese Case. *IJAPS Vol. 4, No. 2* (November) 2008.
- International Labor Office. 2004. "Laporan Mengenai Data Tenaga Kerja Muda di Indonesia: Data Terbaru". Jakarta: International Labor Office.
- Martin, A. 1992. *Introduction in Globalization, Knowledge and Society*. London: Sage.
- Muwi, L. R. 2012. *Rural Youth and Smallholder Farming: The Present and Future of Agrarian Activities from Generational Perspectives*. Master Thesis. International Institute of Social Studies (ISS): Netherland.
- Prawiro, R. 1998. *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action*. New York: Oxford University Press.
- Robison, R. dan Goodman, D. S. G. (Eds.). 1996. *The new rich in Asia: Mobile phones, McDonalds and middle-class revolution*. London and New York: Routledge.
- Sekhampu, T.J. dan F. Niyimbaira. 2013. Analysis of The Factors Influencing Household Expenditure In A South African Township. *International Business & Economics Research Journal*, Vol 12 No. 3.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Tan, E S. 2004. *Does class matter? Social stratification and orientations in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing.
- Tashakkori, A dan C. Teddlie. 2003. *Handbook of Mixed Method in Social and Behavioral Research*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Teddlie, C dan F. Yu. 2007. Mixed Methods Sampling : a Typology with Examples. *Journal of Mixed Method Research*, Vol 1 (1).
- The Boston Consulting Group. 2013. *ASIA'S NEXT BIG OPPORTUNITY :Indonesia's Rising Middle-Class and Affluent Consumers*. www.bcgtaelaviv.com/documents/file128797.pdf
- Thurow, L. 1987. "A Surge in Inequality" *Scientific American* 256: 30
- Torii, T. 2003. The mechanism for state-led creation of Malaysia's middle classes. *The Developing Economies* (Special issue) 41.
- White, B. 2012. Agriculture and the Generation Problem: Rural Youth , Employment and the Future of Farming. *IDS Bulletin* 43 (6).
- Yusof, S.A, dan J. Duasa. 2010. Household Decision-Making and Expenditure Patterns of Married Men and Women in Malaysia. *Journal Fam Econ Iss* (2010) 31.
- Zhang, Y., J. Deng, S. Majumdar, dan B. Zheng. 2009. Globalization of Lifestyle: Glofing in China, dalam Buku Bunga Rampai *The New Middle Class: Globalizing Lifestyles, Consumerism, and Enviromental Concern*, Hellmuth Lange dan Lars Meier (Eds). New York: Springer Dordrecht Heidelberg

Web

- Alexander, H. Jakarta Kelebihan Pusat Belanja?. Kompas. <http://properti.kompas.com/read/2013/06/29/2144085/Jakarta.Kelebihan.Pusat.Belanja>. diakses tanggal 15 Desember 2014.
- BPS [Badan Statistik Indonesia]. *Penduduk Umur 15 ke Atas yang Bekerja menurut Propinsi, Umur, dan Daerah Perkotaan-Perdesaan, 1996-2005*. http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/index.php?option=com_Tabel&kat=2&idTabel=214&Itemid=171
- Euromonitor International. Special Report: The World's Youngest Populations. <http://blog.euromonitor.com/2012/02/special-report-the-worlds-youngest-populations-.html> diakses tanggal 13 November 2014.
- ILO. Menciptakan Peluang Bagi Kaum Muda. http://apyouthnet.ilo.org/resources/generating-opportunities-for-young-people-the-ilo2019s-decent-work-agenda-in-bahasa-indonesia/at_download/file1 Diakses tanggal 13 November 2014.
- Kompas. Moratorium Mal, Jokowi tidak Menggunakan Pergub. <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/17/1552045/Moratorium.Mal.Jokowi.Tak.Gunakan.Pergub>. Diakses tanggal 14 Juni 2014.

PANDUAN PENULISAN JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Kependudukan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan di media cetak lain maupun elektronik.
2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
4. Naskah ditulis dengan menggunakan model huruf Times New Roman, font 12, margin atas 4 cm, margin bawah, 3 cm, margin kanan 3 cm, dan margin kiri 4 cm, pada kertas berukuran A4 minimal 5000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Setiap lembar tulisan diberi halaman.
5. Isi naskah terdiri dari;
 - a. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata.
 - b. Identitas Penulis yang diletakkan di bawah judul, meliputi nama dan alamat lembaga penulis serta alamat email
 - c. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 100-150. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
 - d. Pendahuluan yang berisi tentang justifikasi pentingnya penulisan artikel, maksud/tujuan menulis artikel, sumber data yang dipakai, dan pembabakan penulisan.
 - e. Tubuh/inti artikel berisi tentang isi tulisan, pada umumnya berisi tentang kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, dan pendirian penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa subbagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
 - f. Kesimpulan berisi temuan penting dari apa yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.
 - g. Tampilan tabel, gambar atau grafik harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan diatas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan dibawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik.
 - h. Acuan Pustaka diupayakan menggunakan acuan terkini (lima tahun terakhir)
- i. Penulisan daftar Pustaka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - Kutipan dalam teks: nama belakang pengarang, tahun karangan dan nomor halaman yang dikutip
Contoh: (Jones, 2004:15), atau Seperti yang dikemukakan oleh Jones (2004:15).
 - Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. *Judul buku*. kota penerbitan: penerbit.
Contoh: Horowitz, Donald. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley: University of California.
 - Kutipan dari artikel dalam buku bunga rampai: nama belakang, nama depan pengarang, tahun. "judul artikel" dalam nama editor (Ed.), Judul Buku. nama kota: nama penerbit. Halaman artikel.
Contoh: Hugo, Graeme. 2004. "International Migration in Southeast Asia since World War II", dalam A. Ananta dan E.N.Arifin (Eds.), *International Migration in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hal: 28—70.
 - Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. "Judul artikel", Nama Jurnal, Vol (nomor Jurnal): halaman.
Contoh: Hull, Terence H. 2003. "Demographic Perspectives on the Future of Indonesian Family", *Journal of Population Research*, 20 (1):51—65.
 - Kutipan dari *website*: dituliskan lengkap alamat *website*, tahun dan alamat URL dan html sesuai alamatnya. Tanggal *download*.
Contoh: World Bank. 1998. <http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html>. Washington DC. Tanggal 25 Maret.
 - Catatan kaki (*footnote*) hanya berisi penjelasan tentang teks, dan diketik di bagian bawah dari lembaran teks yang dijelaskan dan diberi nomor.
6. Naskah dikirim melalui email: jki.ppklipi@yahoo.com dan jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id
7. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan melalui e-mail.
8. Redaksi memiliki kewenangan untuk merubah format penulisan dan judul tulisan sesuai dengan petunjuk penulisan, serta mengatur waktu penerbitan.

KEPENDUDUKAN INDONESIA

Women Labor Migration in Asia: Mother Migration and Its Impacts on Left-Behind

Meirina Ayumi Malamassam

Mengurai Jaringan Migrasi: Kajian Komunitas Petani Migran Bugis di Sulawesi

Elok Mulyoutami, Ekawati Sri Wahyuni, Lala M Kolopaking

Kerentanan Ekologi dan Strategi Penghidupan Pertanian Masyarakat Desa Persawahan Tadah Hujan di Pantura Indramayu

Ali Yansyah Abdurrahim, Arya Hadi Dharmawan, Satyawan Sunito, I Made Sudiana

Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah

Deshinta Vibriyanti

Relevansi Pendidikan Kejuruan Terhadap Pasar Kerja di Kota Salatiga

Ngadi

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 9	No. 1	1-72	Jakarta, Juni 2014	ISSN 1907-2902
----------------------------------	--------	-------	------	-----------------------	-------------------

ISSN 1907-2902



9 771907 290214

PEMENUHAN HAK ASI EKSKLUSIF DI KALANGAN IBU BEKERJA: PELUANG DAN TANTANGAN¹

(FULFILLING THE RIGHT FOR EXCLUSIVE BREASTFEEDING AMONG WORKING WOMEN: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES)

Angga Sisca Rahadian

Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Korespondensi Penulis: ansira.sofyan@gmail.com

Abstract

Women participation in the business today cannot be neglected. Demographic data shows that the proportion of women in the total labor force from year to year is exhibiting an upward trend. The data also shows that approximately 66% of the working women are at their reproductive age. Given on these circumstances, the aim of this paper is to study challenges as well as opportunities of fulfilling the right for exclusive breastfeeding among working women. This study uses data from in-depth interview of working women and direct observation in office environment. The study found that the number of working women able to do exclusive breastfeeding is still far from the expectation. On this finding, the study identified that the lack of support from both physical and social environments is the major reason. Most of respondents have not lactation room in their office and if they want to express the milk, they have to use improper room, even in the toilet. In addition, they did not get support from their colleagues and it can influence the production of milk. Meanwhile, based on PP No. 33 Tahun 2012 about ASI Eksklusif states that workplace have to provide lactation room for their employee who breastfeed. The recommendation of this study are (1) authorized institution have to encourage workplace to provide the lactation room and the support facilities according to their financial ability (2) the workplace should make a campaign about exclusive breastfeeding with posters or brochures so it can increase awareness and knowledge to support ASI Eksklusif program (3) a strict sanction must be applied for the workplace which do not provide lactation room.

Keywords: Working Women, Exclusive Breastfeeding, Health

Abstrak

Peran perempuan dalam dunia kerja saat ini tidak dapat diabaikan. Hal ini terlihat dari jumlah angkatan kerja perempuan tiap tahun semakin meningkat dan 66 persen angkatan kerja perempuan tersebut berada dalam usia reproduksi. Tulisan ini menganalisis hambatan dan tantangan ibu bekerja dalam memenuhi ASI eksklusif. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam dengan beberapa ibu bekerja dengan kriteria tertentu dan observasi tempat bekerja informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ASI eksklusif di kalangan ibu bekerja masih jauh dari yang diharapkan. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial kurang mendukung para ibu bekerja untuk memberikan ASI sehingga memberi dampak negatif bagi ibu bekerja itu sendiri maupun anaknya. Mayoritas informan tidak memiliki ruang laktasi untuk tempat memompa ASI di tempat bekerjanya dan mereka memompa di tempat-tempat yang kurang nyaman bahkan harus memompa di toilet. Selain itu, rekan-rekan satu kantor kurang mendukung ibu bekerja untuk memompa dan membuat ibu bekerja merasa tidak mendapat dukungan sehingga memengaruhi jumlah hasil ASI perahan dan tidak mencukupi kebutuhan anaknya. Menurut PP No 33 Pasal 32 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif menyatakan bahwa tempat bekerja harus menyediakan ruang laktasi untuk pegawainya yang menyusui anaknya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah instansi berwenang perlu mendorong tempat bekerja untuk menyediakan ruangan menyusui dan fasilitas pendukung sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, tempat bekerja sebaiknya mensosialisasikan pemberian ASI eksklusif kepada pegawainya dengan membuat brosur atau poster sehingga menumbuhkan kesadaran dan pemahaman para pegawai untuk mendukung ASI eksklusif. Terakhir sanksi tegas perlu diberikan bagi tempat bekerja yang tidak memiliki ruangan menyusui.

Kata Kunci: Ibu Bekerja, ASI Eksklusif, Kesehatan

¹ Artikel ini telah dipresentasikan dalam forum pertemuan Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) yang berlangsung di Jatinangor, 26 -28 November 2014

PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam dunia kerja tidak dapat diabaikan. Tren jumlah angkatan kerja perempuan dari tahun 2012 sampai dengan 2014 menunjukkan adanya peningkatan. Berdasar data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2014 jumlah angkatan kerja perempuan yang terdiri dari golongan umur 15 ta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2014 jumlah angkatan kerja pere. Sementara itu, sebesar 66 persen angkatan kerja perempuan tersebut berada dalam usia reproduksi. Pambudi (2012) menyatakan bahwa usia reproduksi seseorang berada dalam rentang usia 15 15 berada Usia reproduksi dalam hal ini mengacu pada kemampuan seorang perempuan dalam menghasilkan keturunannya. Jumlah angkatan kerja perempuan yang cukup besar pada usia reproduksi memungkinkan pekerja perempuan tersebut dapat mengandung serta memiliki anak.

Dalam teori *continuum of care* dijelaskan bahwa seribu hari pertama kehidupan seorang manusia yang terhitung sejak dalam janin sampai usia dua tahun merupakan fase penting yang bukan hanya berpengaruh terhadap jangka pendek akan tetapi jangka panjang kehidupan mereka (Jalal, 2014). Salah satu hal yang direkomendasikan untuk memenuhi fase penting dalam periode enam bulan pertama adalah pemberian air susu ibu (ASI) Eksklusif².

Mayoritas perempuan kembali bekerja setelah masa cuti melahirkan selesai (Geusken dan Burdorf, 2014). Setelah kembali bekerja, mereka dapat menghentikan atau melanjutkan kembali pemberian ASI kepada bayinya. Terdapat dua kajian yang bertolak belakang

antara pekerjaan dan pemberian ASI. Kajian pertama menunjukkan bahwa pekerjaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberian ASI, perempuan bekerja maupun tidak bekerja memiliki durasi yang tidak jauh berbeda dalam memberikan ASI (Orwell dan Murray, 1974: Plank and Milanesi, 1973 dalam Esterik dan Greiner, 1981). Hal tersebut dapat terjadi salah satunya karena jarak antara rumah dengan tempat bekerja dekat sehingga pada saat istirahat ibu dapat pulang untuk menyusui anaknya. Selain itu, jenis pekerjaan juga menentukan apakah ibu masih dapat melanjutkan menyusui atau tidak. Pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah seperti *home industry* sangat memungkinkan ibu dapat menyusui anaknya karena waktu yang fleksibel dan tidak adanya ketentuan ketat dari tempat bekerja terkait menyusui.

Sementara itu, kajian lainnya menyatakan bahwa kembalinya ibu bekerja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan angka pemberian ASI menurun. Hal ini dapat diketahui dari *The UK National Infant Feeding* yang dilakukan pada tahun 2000 dengan melibatkan sampel 9.500 ibu yang melahirkan bayi di Inggris, menunjukkan bahwa sebanyak 39 persen alasan berhenti menyusui karena kembalinya ibu bekerja (Hamlyn, dkk, 2002: 144). Demikian pula, hasil kajian Ong dkk dengan mewawancarai 2.149 ibu di Singapura menunjukkan pekerjaan merupakan alasan utama ibu-ibu di Singapura untuk berhenti menyusui anaknya antara 2-6 bulan setelah melahirkan (Ong, dkk, 2005). Kajian yang dilakukan Li Bai, dkk melalui survei terhadap 1.738 ibu yang kembali bekerja setelah melahirkan menunjukkan hanya 32 persen yang dapat melanjutkan menyusui anaknya (Li Bai, dkk, 2014). Hal yang sama terjadi di Malaysia, dari 290 responden yang diwawancarai yaitu ibu bekerja yang memiliki anak antara 6 sampai 12 bulan, menunjukkan 51 persen tidak melanjutkan menyusui (Amin, dkk, 2011).

Kondisi kembalinya ibu bekerja memengaruhi menurunnya pemberian ASI juga terjadi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo dan Dyah (2009) di Purwokerto, Jawa Tengah terhadap karyawan Perguruan Tinggi Negeri menunjukkan presentase pemberian ASI eksklusif hanya 21 persen. Kemudian, penelitian Fauzie (2006) di Jakarta menunjukkan bahwa hanya 3,8 persen ibu bekerja di Jakarta yang menyusui ASI eksklusif. Senada dengan hal di atas penelitian Afriana (2004) menunjukkan bahwa di Instansi Pemerintah DKI Jakarta, ibu bekerja yang dapat menyusui secara eksklusif hanya 28 persen. Penelitian secara kualitatif yang dilakukan oleh Rejeki (2004) menunjukkan bahwa ibu bekerja terpaksa menghentikan penyusuan bayi dan

² Definisi mengenai ASI eksklusif dapat berbeda-beda, definisi yang digunakan saat ini adalah fokus terhadap jumlah dari ASI itu sendiri sedangkan definisi lain yakni fokus pada bagaimana bayi menerima ASI tersebut dan bukan hanya terpaku pada jumlah (Weiss, dkk, 2012). Dalam tulisan ini definisi ASI eksklusif mengacu pada WHO yakni pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir tanpa makanan dan minuman tambahan lain kecuali vitamin, mineral, atau obat dalam bentuk tetes atau sirup sampai bayi berusia 6 bulan. Terkait dengan durasi menyusui, rekomendasi WHO mengalami perubahan pada durasi menyusui secara eksklusif. Sebelum tahun 2001, rekomendasi yang diajukan adalah sejak bayi lahir sampai usia 4 bulan. Kemudian WHO melakukan kajian dengan mengidentifikasi 16 penelitian independen terkait dengan ASI eksklusif baik di negara maju maupun negara berkembang. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa bayi yang diberikan ASI eksklusif selama enam bulan akan lebih sedikit menderita infeksi gastrointestinal dan juga lebih sedikit mengalami gangguan pertumbuhan (WHO, 2002). Oleh karena itu, sejak tahun 2002 WHO merekomendasikan ASI eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan lagi sampai usia anak 24 bulan.

mengganti dengan susu formula karena jarak tempat kerja yang jauh dari rumah dan tidak tersedianya fasilitas bagi ibu untuk menyusui bayinya (Abdulah, 2011: 3).

Peraturan yang ada terkait dengan cuti melahirkan adalah pekerja perempuan berhak mendapatkan tiga bulan selama proses melahirkan. Oleh karena itu, ibu bekerja harus mengeluarkan ASI ketika sedang berada di tempat bekerja yang dapat dipergunakan oleh anaknya di rumah. Lebih lanjut Faught menyatakan bahwa ketika ibu menyusui tidak bersama dengan anaknya, maka perlu memerah ASI untuk menjaga pasokan ASI dan mencegah komplikasi yang biasa terjadi seperti pembengkakan payudara, kebocoran ASI, dan tersumbatnya payudara (dalam Cardenas dan Major, 2005). Tempat bekerja diwajibkan menyediakan ruang laktasi sesuai dengan amanah PP No 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif yang ditujukan bagi ibu bekerja yang masih menyusui anaknya sehingga ibu bekerja dapat memerah ASI dengan cara dipompa menggunakan alat khusus maupun secara manual atau dengan tangan.

Berdasar data SDKI 2012 presentase pemberian ASI eksklusif secara nasional sebesar 27 persen. Angka tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 80 persen. Sejak tahun 2012 PP mengenai ASI sudah disyahkan dan hal ini menunjukkan adanya dukungan dan keleluasaan bagi ibu bekerja yang masih menyusui untuk dapat memberikan ASI kepada anaknya. Akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah ibu bekerja merasa kesulitan untuk memerah ASI dikarenakan tidak mendapat dukungan baik fasilitas maupun dari lingkungan sosial. Tujuan tulisan ini yakni ingin menganalisis peluang dan tantangan ibu bekerja dalam memberikan ASI eksklusif.

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dari wawancara mendalam terhadap lima orang ibu bekerja yang dipilih sesuai dengan kriteria, diantaranya ibu bekerja yang bekerja di sekitar Jabodetabek, pekerja formal yang bekerja di lembaga pemerintah, perusahaan swasta, dan fasilitas umum. Selain itu, untuk memperoleh gambaran ruangan yang dijadikan sebagai ruang laktasi oleh para informan, penulis juga mengobservasi ruangan tersebut. Data sekunder penulis peroleh dari BPS, data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kajian-kajian yang relevan, dan informasi dan data dari media massa. Proses pengumpulan data dilakukan pada Agustus – Oktober 2014.

MENGAPA HARUS ASI?

Pembahasan mengenai pemberian ASI kepada bayi bukan hanya dijelaskan secara ilmiah, namun bagi umat muslim dijelaskan dalam kitab suci Al Quran yakni surat Al Baqarah ayat 233. Surat tersebut memiliki arti:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...”.

Makna dalam surat tersebut adalah anjuran bagi para ibu yang melahirkan anaknya untuk memberikan ASI selama dua tahun. Dalam Al Quran sendiri bahasan mengenai menyusui disebutkan sebanyak sebelas kali (Mahmud, 2006). Dengan demikian, menyusui merupakan sesuatu yang memiliki manfaat bukan hanya untuk bayi akan tetapi juga bagi ibunya sehingga menyusui sangat dianjurkan menurut ajaran agama Islam.

Pemberian ASI tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek akan tetapi juga dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian pada anak-anak akibat penyakit infeksi, sedangkan dalam jangka panjang pemberian ASI memiliki hubungan yang erat dengan IQ (WHO, 2013). Lembaga dunia yang menangani masalah anak-anak atau UNICEF (2012) telah merangkum manfaat ASI untuk ibu dan anak. Berikut adalah manfaat pemberian ASI bagi anak; ASI merupakan makanan sempurna yang sesuai dengan kebutuhan bayi dalam enam bulan pertama kehidupannya. ASI juga meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan dapat mencegah bayi dari kekerdilan. ASI selalu tersedia dan dalam temperatur yang tepat sehingga tidak perlu khawatir ASI akan habis. Dengan menyusui ikatan antara ibu dan anak semakin kuat sehingga berguna untuk menstimulasi kemampuan psikomotorik, perkembangan sosial, dan kasih sayang anak. Penelitian yang dilakukan oleh Lamberti, dkk (2013) menunjukkan bahwa menyusui dapat mengurangi risiko kematian dan kesakitan akibat penyakit pnemonia pada anak-anak di bawah dua tahun sehingga dianjurkan untuk menyusui secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 24 bulan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lamberti, Dkk (2011) menyatakan menyusui juga dapat mengurangi risiko kesakitan dan kematian akibat diare. Pnemonia dan diare adalah salah satu penyebab utama kematian bayi di bawah lima tahun (WHO, 2014).

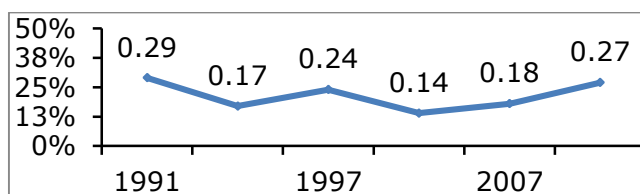
Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Wendy dkk (2009) menyatakan bahwa menyusui selama lebih dari enam bulan dapat mengurangi masalah kesehatan mental pada anak dan remaja. Selanjutnya Roesli (2009) menyatakan bahwa bayi yang disusui memiliki perasaan dilindungi karena sering berada dalam dekapan ibunya sehingga hal ini menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan spiritual yang baik (dalam Abdulah, 2012).

Sementara itu, manfaat untuk ibu antara lain bahwa dengan menyusui mengurangi risiko pendarahan setelah melahirkan dan menyusui sesegera mungkin dan sesering mungkin akan mencegah dari risiko pembengkakan payudara. Selain itu, menyusui dapat mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium serta osteoporosis (UNICEF, 2012). Menyusui secara eksklusif menunda masa subur sehingga ada jeda kehamilan berikutnya atau menyusui secara eksklusif merupakan salah satu bentuk metode kontrasepsi (American Academic of Paediatrics, 2014).

PELUANG IBU BEKERJA DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Tren ASI eksklusif dari tahun 1991 s.d. 2012 mengalami fluktuasi. Di tahun 1991 bayi yang mendapat ASI eksklusif sebesar 29 persen dan turun menjadi 17 persen di tahun 1994. Kemudian di tahun 1997, angka ASI eksklusif meningkat sebesar 7 persen namun turun secara signifikan di tahun 2002-2003 dan berada pada titik terendah. Kemudian, data menunjukkan bahwa bayi yang mendapat ASI eksklusif naik perlahan-lahan sampai mencapai angka 27 persen di akhir periode. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2012) menunjukkan bahwa proporsi pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di Kementerian Kesehatan sebesar 62,5 persen, masih dibawah target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal, institusi tersebut merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mensukseskan program ASI eksklusif. Berikut adalah grafik tren ASI eksklusif di Indonesia dari tahun 1991 s.d. 2012.

Diagram 1: Persentase Cakupan Bayi yang mendapat ASI Eksklusif di Indonesia Tahun 1991 s.d. 2012



Sumber: SDKI 2012 Kesehatan Reproduksi

Masih rendahnya target angka capaian pemberian ASI eksklusif membuat instansi yang berwenang perlu membuat peraturan yang dapat mendukung ibu bekerja supaya tetap dapat memberikan ASI kepada anaknya. Berikut adalah beberapa kebijakan dalam lingkup internasional maupun nasional yang mengupayakan hak ibu bekerja untuk memberikan ASI kepada anaknya dapat terakomodasi:

1. Dalam lingkup internasional peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung ibu bekerja supaya tetap menyusui yaitu dibuat oleh badan dunia yang mengurus masalah perburuhan, ILO, melalui Konvensi Internasional No. 183 Tahun 2000 Tentang Konvensi Perlindungan Maternitas. Tujuan dari konvensi ini adalah mempromosikan kesetaraan semua perempuan dalam angkatan kerja dan kesehatan, serta keselamatan ibu dan anak. Dalam konvensi tersebut terdapat pasal yang melindungi ibu bekerja untuk tetap dapat memberikan ASI, yakni pasal 10 ayat 1 dan ayat 2.
 - Ayat 1: Seorang perempuan harus diberi hak untuk satu atau lebih istirahat harian atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya.
 - Ayat 2: Masa istirahat untuk menyusui atau pengurangan jam kerja harian diperbolehkan; jumlahnya, durasi istirahat menyusui dan prosedur pengurangan jam kerja harian harus ditentukan oleh hukum dan praktek nasional. Istirahat atau pengurangan jam setiap hari kerja akan dihitung sebagai waktu kerja dan dibayar dengan sesuai.
2. UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 Pasal 83 menyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
3. Peraturan bersama tiga menteri: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, 27/MEN/XII/2008, DAN 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Bekerja. Tujuan peraturan bersama ini adalah untuk memberi hak ibu menyusui yang berupa kesempatan dan fasilitas kepada ibu bekerja untuk memberikan/memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI perah tersebut. Akan tetapi, peraturan tersebut sifatnya hanya imbauan sehingga apabila ada

tempat bekerja yang tidak mematuhi maka tidak dapat diberikan sanksi.

4. PP No 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif,

- Pasal 30 :
 - Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
 - Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI diatur dengan Peraturan Menteri.
- Pasal 31
 - Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas: perusahaan dan perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.
- Pasal 34
 - Pengurus Tempat Kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja
- Pasal 35
 - Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- Pasal 36
 - Setiap pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 34, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pasal 37
 - Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.

Peraturan-peraturan di atas menunjukkan adanya keleluasaan bagi ibu bekerja untuk dapat menyusui sehingga anaknya memperoleh ASI eksklusif. Selain itu, adanya peraturan tersebut juga diharapkan semakin banyaknya cakupan ASI eksklusif sehingga target capaian ASI eksklusif sebesar 80 persen dapat tercapai. Akan tetapi, realita yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang terdapat dalam peraturan. Tidak semua tempat bekerja mau dan menyediakan ruang menyusui untuk para pegawainya, bahkan kurangnya dukungan dari lingkungan sosial.

Pengetahuan dan perhatian akan manfaat ASI yang besar untuk anak membuat masyarakat mulai mendirikan komunitas untuk mendukung dan melakukan pemberian ASI. Salah satu komunitas yang turut aktif mengkampanyekan ASI diantaranya adalah komunitas peduli ASI (KPA) yang ada di berbagai daerah seperti KPA Banten, KPA Balikpapan, dll. Selain itu juga di jejaring media sosial seperti di Twitter, Facebook, yang dapat dilihat melalui akun AIMI, ID_AyahASI, kelompok Tambah ASI Tambah Cinta. Komunitas tersebut sebagai media berbagi pengetahuan antar para anggotanya dan juga media untuk saling mendukung para ibu menyusui dan keluarganya. Keberadaan komunitas-komunitas tersebut membantu para ibu dan juga keluarga dapat memahami manfaat dan pemberian ASI sehingga pemberian ASI bukan sesuatu yang sulit dan memberatkan untuk dijalankan. Dengan adanya komunitas tersebut, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh ibu bekerja dalam memberikan ASI kepada anaknya dapat diminimalisir selain itu masyarakat juga semakin sadar akan manfaat ASI.

Selain itu, munculnya bisnis jasa antar jemput ASI profesional di mana kurir mengambil ASI perah dari tempat bekerja ibu menuju rumah. Kurir tersebut sudah menyediakan tas pendingin sehingga ASI masih dalam keadaan baik sesampainya di rumah (www.detik.com). Supaya menghindari jalan macet di Jakarta dan sampai rumah tepat waktu, kurir tersebut menggunakan motor. Keberadaan jasa layanan antar tersebut mempermudah ibu bekerja memberikan ASI eksklusif sehingga anak masih tetap dapat menikmati ASI meskipun ibu berada di tempat bekerja.

TANTANGAN

Dalam usaha memberikan ASI eksklusif, ibu bekerja menghadapi halangan dan rintangan yang tidak kecil. Akan tetapi, meskipun dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ibu bekerja harus tetap bisa memerah ASI dengan fasilitas minimal dan tekanan maksimal. Meskipun terdapat peraturan yang mewajibkan tempat bekerja menyediakan ruang menyusui untuk

pegawainya dan perlunya dukungan dari masyarakat, pada kenyataannya masih banyak tempat bekerja yang tidak memiliki ruang menyusui. Hal ini dapat diketahui dari survei yang dilakukan oleh AIMI dengan Save the Children di Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan dari 37 kantor pemerintah yang diteliti hanya empat kantor atau 10,81 persen yang sudah mempunyai fasilitas ruangan menyusui khusus. Tak berbeda jauh dengan kantor pemerintah, di kantor swasta juga mengalami hal yang sama, hanya dua kantor dari 18 kantor yang disurvei memiliki ruang menyusui. (www.detik.com).

Fasilitas Ruang Menyusui yang tidak memadai: Dari Toilet sampai Ruang Rapat

Terkait dengan fasilitas untuk menyusui di tempat bekerja, semua informan yang diwawancarai memerah ASI bukan di ruangan khusus menyusui akan tetapi di tempat yang memungkinkan untuk memerah. Dari lima informan, hanya satu informan, C, yang memiliki ruang menyusui. Ia bekerja sebagai pegawai pemerintah yang kantornya cukup besar. Meskipun C memiliki ruang menyusui akan tetapi ia tidak pernah sekalipun memerah di ruangan tersebut. Hal ini dikarenakan ruangan tersebut memang tidak pernah digunakan oleh para ibu menyusui di lingkungan tersebut untuk memerah. Keberadaan ruang menyusui tersebut relatif baru karena memang baru dibuat setelah kunjungan ketua AIMI ke kantor tersebut. Tidak adanya informasi resmi tentang ruangan tersebut dan pegawai mengetahui adanya ruangan menyusui dari mulut ke mulut. Fasilitas yang disediakan juga tidak sesuai dengan ketentuan, hanya pendingin ruangan yang kontrolnya juga tidak ada sehingga tidak dapat digunakan. Apabila ada ibu menyusui yang ingin menggunakan ruangan tersebut untuk memerah harus mencari-cari kunci terlebih dahulu sedangkan orang yang memegang kunci tidak jelas siapa. Dapat dikatakan bahwa keberadaan ruang menyusui tersebut hanya memenuhi syarat dari peraturan yang ada namun fasilitas yang diberikan terbatas dan pada akhirnya tidak berfungsi selayaknya ruang menyusui.

Dengan berbagai ketidaknyaman dan kesulitan mengakses ruangan tersebut, C memilih untuk memerah di kubikalnya yang hanya berukuran 1m x 1m dengan menggunakan apron, kain penutup menyusui. Ruang C berisi tujuh orang pegawai, yaitu lima perempuan dan dua laki-laki. Aktivitas yang dilakukan setiap orang di ruangan tersebut dapat terlihat oleh rekan-rekan lainnya karena tidak adanya sekat antar kubikal. Awal-awal kegiatan memerah dengan kondisi demikian membuat C salah tingkah, merasa kikuk karena terdapat dua orang laki-laki di

ruangannya, sampai-sampai ASI tumpah dari corong pemompa dan membasahi baju. Selain itu, ia juga kesulitan untuk menyimpan ASI perah yang harus disimpan di lemari pendingin atau kulkas karena kulkas yang ada terlalu penuh untuk menyimpan barang-barang lain dan khawatir ASI perah terkontaminasi. Selama ini, ia menyimpan ASI perah di tas pendingin yang terdapat *ice gel* sehingga dapat tahan lama sampai dibawa pulang ke rumah.

Tidak berbeda jauh dengan C, A memerah ASI di kubikal yang kondisinya lebih baik dari C karena masih terdapat sekat. Meskipun terdapat sekat, apabila terdapat rekan kerja lain yang mencarinya dan berdiri di sekat tersebut, aktivitas yang dilakukan A masih terlihat. Pilihan memompa di kubikal merupakan pilihan yang lebih baik karena tidak ada ruangan yang lebih aman untuk memompa. Ia bekerja sebagai peneliti di sebuah rumah sakit besar rujukan nasional. Tempat bekerjanya memiliki ruangan laboratorium yang hanya digunakan olehnya, akan tetapi karena eksperimen yang dilakukan menggunakan bahan-bahan karsinogenik sehingga apabila ia memerah di laboratorium khawatir ASInya tercemar bahan-bahan berbahaya tersebut. A menyimpan ASI perah di kulkas milik kantor sedangkan untuk mensteril alat perah ia menggunakan air panas dari dispenser.

Pengalaman A menunjukkan bahwa meskipun tempat kerjanya merupakan salah satu fasilitas umum yang cukup besar dan berhubungan dengan pelayanan kesehatan, namun tidak menyediakan ruangan menyusui untuk para pegawainya. Terlebih lagi rumah sakit tersebut berada langsung di bawah Kementerian Kesehatan yang membuat peraturan bersama dengan dua kementerian lainnya yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai perlu disediakannya ruangan menyusui di setiap tempat bekerja. Dari kondisi tersebut dapat terlihat bahwa masih belum seriusnya pemerintah dalam mendukung praktik ASI eksklusif.

Sama halnya dengan pengalaman A dan C, E juga harus memompa di kubikalnya karena tidak adanya ruangan menyusui di tempat bekerjanya. Ia bekerja di kantor pemerintahan di mana salah satu fungsi lembaganya melakukan kajian-kajian di berbagai bidang, salah satunya tentang kesehatan. E harus memerah dengan apron dan terkadang menghadap tembok untuk menutupi kalau ia sedang memerah sehingga tidak terlihat orang-orang yang masuk ke ruangannya. Ia tidak mengalami masalah dalam menyimpan hasil ASI perah, ia dapat menaruhnya di kulkas kantor dan setelah pulang dapat dibawa dengan cooler bag yang telah disiapkan. Untuk mensteril

botal dan alat pemerah ASI, ia menggunakan air panas yang terdapat di dispenser karena di kantor tidak terdapat sterilizer.

Sementara itu, pengalaman D jauh lebih mengenaskan karena meskipun kantornya termasuk perusahaan besar tapi ruangan menyusui tidak tersedia. Kegiatan pemerah ASI dilakukan di salah satu bilik di toilet yang jarang terpakai karena rusak. Ia tidak pemerah di kubikal karena lokasi kubikalnya berdekatan dengan kubikal atasannya yang laki-laki sehingga ia tidak nyaman apabila harus pemerah di tempat tersebut. Selain itu, ia pemerah menggunakan pompa asi elektrik yang bunyinya cukup keras dan mengganggu rekan-rekan kerja yang lain apabila mesin tersebut digunakan. Ketika pemerah di toilet, ia tidak dapat menggunakan tenaga listrik untuk menjalankan mesin pompa ASInya karena di toilet tidak terdapat aliran listrik sehingga ia harus menggunakan batu batre dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk kebutuhan batu batre tersebut. Meskipun ia tidak merasa nyaman harus pemerah di toilet, tapi itu adalah tempat yang memungkinkan untuk pemerah. Kekhawatiran akan kondisi toilet yang kotor dan banyak kuman-kuman yang berbahaya yang dapat mencemari ASInya ia kesampingkan karena ia sangat ingin memberikan ASI eksklusif untuk anaknya. Selain itu, di kantornya juga tidak tersedia kulkas yang digunakan untuk pegawai. Satu-satunya kulkas terdapat di ruang *Board of Director* (BOD) sehingga ia merasa sungkan menitip ASI perah di kulkas tersebut. Solusinya adalah menggunakan tas pendingin dengan tambahan *ice gel* sehingga sampai di rumah ASI tersebut masih layak dikonsumsi.

Dari kelima informan, informan B yang paling beruntung. Meskipun tidak memiliki ruang menyusui untuk pemerah, akan tetapi ia diperbolehkan untuk memompa di ruang rapat apabila tidak digunakan atau di ruang salah satu atasan perempuannya sehingga ia tidak merasa ada masalah dalam pemerah ASI. Kantor B termasuk perusahaan kecil dengan jumlah pegawai sekitar 20 orang dan terletak di daerah segitiga emas Jakarta. Pembuatan ruang menyusui khusus agak sulit karena menyewa ruangan di tempat tersebut sangat mahal sehingga atasan harus efisien dalam membuat ruangan baru yang digunakan bukan untuk tujuan utama perusahaan. Ia juga tidak mengalami kesulitan apabila harus menyimpan ASI setelah diperah, kulkas kantor dapat ia pergunakan untuk menyimpan ASI perah.

Dari semua pengalaman informan mengenai ruangan menyusui yang terdapat di tempat bekerja dapat diketahui bahwa kebijakan mengenai ASI eksklusif

belum dilaksanakan dengan baik, terutama di kantor pemerintah yang membuat peraturan bersama mengenai adanya ruangan menyusui di tempat bekerja. Pengetahuan informan mengenai adanya PP No 33 Tahun 2012 mengenai ASI Eksklusif di mana setiap tempat bekerja harus menyediakan ruangan menyusui juga terbatas. Hanya dua informan yang mengetahui adanya PP tersebut namun juga tidak dapat berbuat apa-apa karena terkait dengan kebijakan atasan. Di tempat bekerja sendiri tidak ada kebijakan khusus bagi pekerja yang memberikan ASI di waktu bekerja. Meskipun tidak memiliki kebijakan internal di setiap kantor informan, mereka tetap diperbolehkan untuk pemerah di waktu bekerja.

Minimnya Dukungan Lingkungan Sosial

Selain fasilitas berupa ruang menyusui dan peralatan lainnya, lingkungan sosial merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Lingkungan tersebut merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menyusui, yang termasuk pengaruh lingkungan yakni opini-opini keluarga dan teman-teman, kebijakan kesehatan dll (Geuskens dan Burdorf, 2008).

Pengalaman yang dialami oleh informan berbeda-beda, ada yang didukung oleh rekan-rekan kerja maupun keluarga, namun tidak sedikit yang tidak mendapat dukungan bahkan komentar negatif. Sementara itu, komentar positif membuat ibu bekerja dapat pemerah dengan lancar. Hal ini didukung oleh Cardenas dan Major (2005) yang menyatakan bahwa lingkungan yang mendukung, dalam hal ini atasan maupun rekan kerja, merupakan indikasi diterimanya kegiatan menyusui di tempat bekerja sehingga dapat meminimalisir tekanan yang dialami ibu bekerja untuk dapat menyusui atau pemerah. Tekanan yang diterima oleh ibu bekerja berpotensi memengaruhi jumlah produksi ASI perah. Dengan demikian, salah satu keberhasilan ASI eksklusif adalah dukungan lingkungan sehingga membuat ibu menyusui merasa nyaman dan aliran ASI pun lancar.

A merupakan pegawai yang paling muda usianya diantara rekan kerja lainnya. Kegiatan pemerah dilakukan di kubikal dengan menggunakan mesin pompa elektrik yang suaranya cukup keras. Selama ia di tempat bekerja, dalam sehari ia pemerah sebanyak tiga kali dan waktu yang dibutuhkan setiap kali pemerah paling lama 15 menit, yaitu pertama setelah sampai kantor sekitar pukul 8, kedua pada jam istirahat, dan terakhir pada saat sebelum pulang atau setelah ia merapikan alat-alat eksperimennya. Ketika ia pemerah, ia usahakan menggunakan waktu yang bukan jam-jam sibuk sehingga tidak mengganggu pekerjaannya.

Tidak hanya sekali A mendapatkan sindiran maupun komentar pedas dari temannya akan tetapi cukup sering. Komentar yang membuat A berlinang air mata selain dengan bahasa yang tidak baik, juga membandingkan dengan kehidupan rekan-rekan kerjanya zaman dulu ketika mempunyai anak bayi. Komentar-komentar tersebut antara lain:

“A kerjaannya cuma meres tetek doang”
(wawancara, 9 September 2014)

Di lain kesempatan ketika melihat A sedang memerah, langsung berkomentar:

“yahhh.. meres tetek lagi, kapan sih berakhirnya? kasian tetek lo sakit!”
(Wawancara, 9 September 2014)

Komentar tersebut melukai perasaan A, terlebih apa yang diucapkan tidak benar karena ia memerah tidak mengganggu pekerjaannya. Komentar seperti itu membuat ia berpikir bahwa lingkungan kerja, yang umumnya perempuan berusia lebih dari 40 tahun, tidak mendukung dalam pemberian ASI. Hampir terucap oleh A untuk mengundurkan diri karena tidak kuat dengan ucapan-ucapan rekan kerjanya yang pedas. Peran suami yang cukup besar dalam meyakinkan dirinya untuk membuktikan ke rekan-rekan kerjanya bahwa ia mampu bekerja dan memberikan ASI dan akhirnya A tidak mengambil langkah untuk mengundurkan diri. Kegiatan memerah pun tetap ia lakukan meskipun mendapat sindiran.

Pada saat usia anaknya sekitar empat bulan, ASI yang diperah hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya karena kebutuhan anaknya menjadi meningkat. Jalan terbaik supaya anaknya tetap mendapatkan ASI yakni ia harus pulang lebih cepat dari biasanya. Ia izin ke atasannya untuk pulang lebih awal dan atasannya pun membolehkannya. Akan tetapi melihat A dapat pulang lebih awal dari biasanya dengan alasan harus memberikan ASI, rekan-rekan kerjanya ada yang tidak setuju dan mulai berkomentar yang tidak mengenakan

“kenapa sih harus saklek banget kasih ASI, kalo gak mampu ya udah, kasih susu formula juga sehat-sehat aja anak kita sampe sekarang, apa bedanya anak ASI sama anak sufor?”(Wawancara, 9 September 2014).

Dari komentar tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan mengenai ASI di lingkungan kerja A belum memadai. Komentar bernada sinis tersebut memengaruhi jumlah produksi ASI yang dihasilkan.

Sebelum mendengar komentar dari rekan kerjanya, setiap memerah ia dapat menghasilkan 100 ml s.d. 150 ml, namun setelah adanya masalah tersebut produksi ASInya turun drastis menjadi 20 ml dalam setiap perahan. Hal ini menjadi kendala untuk mencapai ASI eksklusif, solusi yang ia ambil yakni dengan menggunakan ASI donor. Dari cerita A dapat dikatakan bahwa dukungan lingkungan sosial, khususnya tempat bekerja sangat penting dalam keberhasilan ASI eksklusif.

Pengalaman yang hampir sama juga dialami oleh D ketika harus memerah ASI di toilet. Lingkungan tempat bekerja sulit untuk mendukung dalam memerah ASI, bahkan bukan dukungan yang didapat karena harus memompa di tempat yang bukan semestinya melainkan komentar yang menjatuhkan. Bukannya dukungan yang didapat karena kantor tidak menyediakan ruangan menyusui, akan tetapi malah mendapatkan kata-kata yang membuat khawatir.

“Kok lo masih mompa di situ sih ntar kayak anaknya Vina tuh kena kena apa tuh ke virus atau apa, ‘ya semoga engga ya’.”
(Wawancara, 11 September 2014).

Pengalaman A dan D menunjukkan lingkungan kerja masih belum memahami akan pentingnya ASI eksklusif dan perlunya mendukung ibu menyusui untuk dapat memberikan ASI eksklusif. Padahal dalam peraturan mengenai ASI eksklusif pada Pasal 37 tertulis masyarakat harus mendukung keberhasilan pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.

Hal berbeda dialami oleh B dan C dalam mendapatkan dukungan dari lingkungan kerjanya. Meskipun kantornya termasuk kantor kecil yang mempekerjakan sekitar 20 orang, namun B sangat didukung untuk memberikan ASI kepada anaknya. Hal ini terlihat ketika ia memerah ASI pada saat jam kerja tidak dipermasalahkan, bahkan ia menggunakan ruang rapat atau salah satu ruang atasan. Atasan tertingginya pun memaklumi ketika B sedang memerah sementara ia ada keperluan dengan rekan kerja yang ruangnya digunakan, bahkan atasan tertingginya tersebut mempersilahkan B untuk melanjutkan memerah. Hal demikian membuat B merasa didukung dan tidak mengalami pengurangan produksi ASI.

Begitu pula C, meskipun ruangan untuk memerah sangat tidak nyaman, akan tetapi ia mendapat dukungan dari rekan-rekan seruangan untuk memerah. Meskipun ada dua orang laki-laki di ruangan tersebut,

mereka tidak merasa terganggu dengan aktivitas memerah yang dilakukan C setiap harinya.

Lain halnya dengan pengalaman E, meskipun lingkungan tempat bekerja E mendukung kegiatan memerah, namun ia sempat kesulitan memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Pekerjaan E mengharuskan dirinya untuk mengikuti pelatihan di luar kota selama tiga minggu, ia sampai membawa keluarga dan anaknya untuk pindah dekat tempat pelatihan supaya lebih mudah memberikan ASI. Meskipun demikian, ia masih kesulitan memberikan ASI karena peraturan yang terlalu ketat dan tidak fleksibel terhadap ibu menyusui. Tidak adanya keleluasaan bagi peserta pelatihan untuk memberikan ASI meskipun tidak mengganggu jadwal pelatihan. Ia terpaksa memberi makan anaknya sebelum enam bulan.

Dari pengalaman informan dapat diketahui bahwa belum semua masyarakat sadar mengenai ASI sehingga dukungan bagi ibu bekerja yang memberikan ASI kepada anak masih sulit. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat terhadap PP No 33 terkait dukungan kepada ibu yang menyusui masih besar sehingga hal tersebut menyulitkan ibu bekerja untuk memberikan ASI kepada anaknya. Hal ini disebabkan karena tekanan yang diterima ibu dalam memberikan ASI sangat besar dan berpotensi membuat produksi ASI menurun.

KESIMPULAN

Dari berbagai kajian yang ada, ASI memiliki manfaat bukan hanya untuk kesehatan anak akan tetapi juga ibu. Pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi angka kematian dan kesakitan anak. Berdasar data SDKI 2012, angka kematian bayi masih menunjukkan angka 32 dan angka tersebut masih tergolong cukup tinggi dan belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam MDGs. Sementara itu, data angka kematian ibu juga masih menunjukkan hal yang sama. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan menargetkan cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen. Untuk memenuhi target cakupan tersebut, badan yang berwenang lainnya membuat peraturan yang mendukung suksesnya program ASI eksklusif. Salah satu peraturan tersebut secara khusus ditujukan untuk tempat bekerja supaya mendukung ibu bekerja dalam memberikan ASI untuk anaknya, di mana jumlah perempuan yang bekerja saat ini cukup signifikan.

Meskipun sudah terdapat peraturan yang mendukung ibu bekerja untuk memberikan ASI kepada anaknya, namun masih terdapat kekurangan di beberapa tempat bekerja. Ibu bekerja di tempat informan bekerja

mengalami kesulitan dan hambatan dalam memberikan hak anaknya untuk mendapatkan ASI. Dukungan sosial yang sangat penting untuk mendukung ibu bekerja justru sulit didapatkan dari lingkungan kerja. Mayoritas informan mampu melewati hambatan dalam memberikan ASI eksklusif, hal ini tidak terlepas dari niat besar dan pengetahuan tentang ASI ibu bekerja tersebut. Namun, apabila kondisi demikian tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan gagalnya pemberian ASI eksklusif.

Beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam kajian ini yaitu (1) instansi berwenang perlu mendorong tempat bekerja untuk menyediakan ruangan menyusui dan fasilitas pendukung sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, di setiap tempat bekerja juga perlu mempunyai kebijakan yang sifatnya kondisional, seperti pada saat pegawai mengikuti pelatihan, peraturan untuk pegawai yang masih menyusui tidak terlalu ketat sehingga pegawai tersebut tetap dapat memberikan ASI. (2) tempat bekerja sebaiknya mensosialisasikan pemberian ASI eksklusif kepada pegawainya dengan membuat brosur atau poster sehingga menumbuhkan kesadaran dan pemahaman para pegawai untuk mendukung ASI eksklusif. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian adalah advokasi dengan melibatkan *stakeholder* terkait kepada penentu kebijakan di tempat kerja dan (3) sesuai amanat PP ASI Eksklusif perlunya sanksi tegas bagi tempat bekerja yang tidak mendukung ASI eksklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Giri Inayah. 2012. "Determinan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Bekerja di Kementerian Kesehatan RI tahun 2012". Tesis Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Depok.
- Cardenas, Rebeka A dan Debra A Major. 2005. s, Rebeka A dan Dment and Breastfeeding: Utilizing A Work-Family Conflict Framework to Understand Obstacles and Solutionsrk to UJournal of Bussiness and Psychology 20(1): 31-51.
- Esterik, Penny Van dan Ted Greiner. 1981. , Penny Van dan Ted Greiner. 1981. ding: Utilizingopportunities Pestudies in Family Planning (12) 4: 184-197.
- Fikawati, Sandra dan Ahmad Syafiq. 2010. i, Sandra dan Ahmad Syafiq. 2010. ding: Utiliziksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini di Indonesia: UtiliMakara 14 (1): 17 Ini
- Geuskens, Goedele dan Alex Burdof. 2008. s, Goedele dan Alex Burdof. 2008. ding: Utiliziksklusif dan Inisiasi Menyusu W. Kirch (Ed.), Promoting Health for Working Women255-265.

- Greiner, Ted. 1998. History of Breastfeeding. Nursing Mothers Newsletter
- Hamlyn, Becky, dkk. 2002. *Infant Feeding 2000*. London: TSO.
- Horta, Bernardo L dan Cesar G. Victora. 2013. *Long-term Effect of Breastfeeding: A Systematic Review*. Geneva: WHO.
- ILO. 2002. K-183 Konvensi Perlindungan Maternitas, 2000 dalam
- Jalal, Fasli. 2014. Fasli. 20 Peneliti untuk Pengabdian yang Konkret dalam Pembangunan Negara dan Bangsa_149910 *Naskah Orasi Ilmiah*. Jakarta: LIPI dan BKKBN.
- Joy Noel-Weiss*, Sonya Boersma and Sonya Kujawa-Myles. 2012. l-Weiss*, Sonya Boersma and Sonya Kujawa-Myles. 2012. *PembaInternational Breastfeeding Journal*: 7-9.
- Kementerian Kesehatan. 2012. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Jakarta: Kemenkes RI
- Lamberti, Laura M., dkk. 2013. raturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemidity and Mortality in Chldren Under Two: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis”dalam *BMC Public Health* 13 (Suppl. 3): 1, d
- Lamberti, Laura M., dkk. 2011. raturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemidity and Morta *BMC Puclic Health* 11 (Suppl 3): 1-12.
- Li Bai, Dorothy., Daniel Yee Tak Fong, Marie Tarrant. 2014. . Tarrant. 2014. 3 Tahun 2012 Tentang Pemidity and Mortality in Chldren Under Two: A Systematic Literature Review an *Matern Child Health Journal*.
- Mahmud, Fahmi Musthafa. 2006. ri'jazu al-quran al kariim fi muddati al radhaah wa nau'iyatiiha, mu'tamar al alami 8 i'jazi al ilmi fi al quran wa al sunahl s
- Oddy, H Wendy, dkk. 2009. i muddati al radhaah wa nau'iyatiiha, mu'tamar al alami 8 i'jazi al ilmi fi al quran wa al sunahwo: A Systematic Literature Review *The Journal of Pediatrics* 156 (4): 568-574.
- Ong, Gary, dkk. 2005. ics i muddati al radhaah wa nau'iyatiiha, mu'tamar al al; *European Journal of Public Health*, (15)4: 424-430.
- Pambudi, Wiyarni. 2012. ic Healthti al radhaah wa nau'iy ,iiha, mu'tamar al al; i 8 i'jazikarta, 6 Mei 2012
- SDKI. 2012. Kesehatan Reproduksi. Jakarta: BKKBN, BPS, Bakti Husada, USAID.
- SDKI. 2012. Kesehatan Anak. Jakarta: BKKBN, BPS, Bakti Husada, USAID.
- UNICEF. 2012. . 2012. sehatan Anak. Jakarta: BKKBN, BPS, and Young Child Feeding Counselling Packageack
- World Health Organization. 2002. The Optimal Duration of Exclusive Breastfeeding, Report of an Expert Consultation. Switzerland: WHO.

Web

- World Health Organization. 2014. “Children Reducing Mortality”dalam <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/> / diunduh pada 11 November 2014 pukul 10.00
- <http://health.detik.com/read/2012/11/28/184001/2104280/75/kurir-asi-solusi-untuk-menyusui-jarak-jauh>
- <http://www.unicef.org/programme/breastfeeding/innocenti.htm> diunduh tanggal 27 Agustus 2014 pukul 13.20
- http://www.breastfeedingbasics.org/cgi-bin/deliver.cgi/content/International/his_innocenti.html diunduh tanggal 16 September 2014 pukul 09.40.
- http://menyusui.info/data-statistik/ibu-menyusui-indonesia-makin-sadar/Ibu_Menyusui_Indonesia_makin_sadar. Diunduh tanggal 21 Oktober 2014
- http://www.who.int/features/factfiles/child_health2/photo_story/en/index2.html. Diunduh tanggal 11 Oktober 2014
- <http://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Benefits-of-Breastfeeding-for-Mom.aspx> diunduh pada 12 November 2014 pukul 12.45
- http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_149910.pdf f diunduh tanggal 23 Oktober 2014.

MENGEMBANGKAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA UNTUK MENJAWAB TANTANGAN MODERNISASI, DEMOKRATISASI DAN GLOBALISASI¹

(DEVELOPING INSAN CENDEKIA HIGH SCHOOL TO ADDRESS MODERNISATION, DEMOCRACY, AND GLOBALISATION CHALLENGES)

Makmuri Sukarno

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Korespondensi Penulis: murikarno@yahoo.com

Abstract

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN-IC) faces, similar with other schools, disfunctional in preparing people that are more qualified, if the institution does not reform it-self along with the strategic challanges which are developing. MAN-IC, that was build based on Modernist-Islam spirit, is a model madrasah especially with regard to its religious and science & technology teaching practices. Nowadays, this institution is not only challanged with old challanges, that are searching Islamic as well as Indonesian characters and modernization, but also with the new ones, that are democratization including local otonomy and globalization. Rapid Assessment method to see its governance, management, curriculum, and teaching-learning aspects within the two of three existing MAN-ICs (which are located in Jakarta and Jambi) reveals the imbalances and un-readiness of those institution in facing those challanges. Reform on those aspects proposed by this article is assumed to be empowering its responsive ability in preparing future generation.

Keywords: Education, Madrasah, Governance, Management, Modernization, Democratisation, Globalization.

PENDAHULUAN

Dalam Politik Etis kolonial Belanda, menurut Brugmans (1987) pendidikan lebih ditekankan aspek pengajarannya, yaitu untuk menyiapkan generasi

Abstrak

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN-IC), seperti halnya sekolah pada umumnya, terancam disfungsional dalam menyiapkan penduduk yang berkualitas, jika tidak memperbaharui diri sesuai dengan tantangan strategis yang berkembang. MAN-IC, yang didirikan dengan semangat Islam-Modernis, merupakan madrasah percontohan, terutama dalam pembelajaran agama dan sains/teknologi. Sekarang lembaga ini tidak hanya ditantang oleh tantangan lama, yaitu menemukan karakter Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan dan tantangan modernisasi, melainkan juga tantangan baru, yaitu demokratisasi (termasuk otonomi daerah) dan globalisasi. Melalui metode *Rapid Assessment* terhadap sistem penyelenggaraan (*governance*), manajemen, tenaga pendidik, kurikulum, peserta didik serta cara pembelajaran pada dua dari tiga MAN-IC (yaitu di Jakarta dan Jambi), nampaklah ketidakseimbangan sekaligus ketidaksiapan lembaga ini dalam merespon tantangan-tantangan tersebut. Pembaharuan pada hal-hal tersebut di atas yang diajukan dalam tulisan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan responsif MAN-IC dalam menyiapkan generasi mendatang.

Kata Kunci: Pendidikan, Madrasah, Governance, Manajemen, Modernisasi, Demokratisasi, Globalisasi

dengan *knowledge* dan terutama *knowhow* untuk mendukung politik dan ekonomi kolonial. Pasca Perang Dunia kedua, negara-negara berkembang sebagai negara bangsa yang baru lahir, cenderung menekankan pertama-tama peran pendidikan sebagai alat pembentukan kebangsaan (*nation and character*

¹ Tulisan ini dikembangkan dari paper hasil penelitian yang dipresentasikan pada Diskusi Pengembangan Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Senin 28 Januari 2013, di Jakarta.

building), dan kemudian sebagai alat modernisasi khususnya industrialisasi, yaitu dengan mengembangkan *knowledge* dan *knowhow* penduduk untuk mengejar ketertinggalan, terutama ekonominya. Dengan demikian, pembangunan sistem pendidikan nasional yang baru tersebut relatif memarginalisasi sistem pendidikan yang disebut oleh Furnivall (1943:7) sebagai “pendidikan asli” yang dianut oleh komunitas-komunitas. Oleh karena itu, negara berperan sentral menempatkan pendidikan nasional sebagai alat transformasi budaya, sosial dan ekonomi. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam sistem pendidikan nasional boleh dikatakan hanya berperan resisten, komplemen atau adaptif terhadap peran sentral yang dimainkan oleh negara. Dampaknya adalah teralienasinya kelompok terdidik dari budaya lokalnya, serta meningkatnya kompetisi antar individu dan antar kelompok masyarakat dalam memperebutkan jabatan pekerjaan modern yang bersifat impersonal yang tumbuh dari negara yang baru. Muncul kesenjangan karena pengangguran terselubung kelompok kurang berpendidikan formal serta melemah hubungan setara dan kekerabatan. Reaksi terhadap peran negara yang berlebihan dan memarginalisasi peran pendidikan komunitas menggejala dalam bentuk politik identitas yang akarnya tumbuh dari kerinduan pada keakraban dan perlindungan (oleh patron) yang pernah dialami di masyarakat primordial (Fukuyama, 2009: 12). Dalam bentuk yang ekstrem, reaksi itu berujung penyelenggaraan pendidikan yang eksklusif yang kadang-kadang disertai politik separatisme pendidikan.

Munculnya madrasah negeri (standard Depag) antara lain adalah untuk mengurangi reaksi ekstrem tersebut dan mengurangi kesenjangan antara pendidikan umum yang diselenggarakan negara dan “pendidikan asli” termasuk pesantren yang diselenggarakan masyarakat, serta memperkecil kesenjangan sosial ekonomi dengan kelompok berpendidikan umum. Namun demikian, upaya tersebut nampak berjalan lambat, antara lain oleh karena kuatnya peran pendidikan “asli”/lokal ini sebagai instrumen reproduksi sosial dan politik lokal dan karena masih lemahnya pengaruh pemikiran Islam modernis di tanah air. Di samping itu juga karena dukungan pemerintah sendiri lemah, bahkan sampai sekarang diskriminatif terhadap madrasah formal yang diperkenalkannya (USAID dan DBE3, 2007:19).

Sebagian madrasah masih tetap terpaku dan menjadi pelayan masyarakat tradisional dan yang lain lebih mendekati atau terkooptasi oleh negara, tetapi keduanya kurang tanggap terhadap tuntutan perubahan modernisasi yang datang². Oleh karena itu, munculnya penekanan pembelajaran sains dan teknologi (baca:modernisasi) di MAN-IC di tahun 90an sebagai madrasah model untuk menyambut tantangan modernisasi sekaligus mempertahankan nilai tradisi pondok pesantren (*Islamic boarding school*), merupakan fenomena penting. MAN-IC sebagai madrasah yang mengembangkan sekaligus menyeimbangkan *imtak* (iman-takwa) dan iptek ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Islam-Modernis (oleh ICMI di masa Prof Habibi)--, dijadikan oleh Departemen Agama sebagai model pengembangan bagi madrasah-madrasah yang lain³. Kebijakan ini merupakan fenomena kebijakan pengembangan kualitas SDM yang penting. Hal ini karena model ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh madrasah dalam “memodernisasi” siswanya yang secara keseluruhan hampir seperlima dari seluruh siswa di lembaga pendidikan menengah ke bawah dan dalam dekade terakhir, jumlah lembaga dan siswanya tumbuh lebih cepat daripada sekolah serta umumnya melayani masyarakat menengah bawah (USAID dan DBE3, 2007:5). Di samping itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi ketertinggalan sains dan teknologi yang penting guna memanfaatkan peluang demografi yang sedang dialami Indonesia sampai tahun 2030-an.

Di tengah upaya MAN-IC menjawab tantangan modernisasi tersebut, muncul tantangan yang baru yang lahir di Era Reformasi, yaitu politik demokratisasi yang menuntut ruang bagi partisipasi dan pluralisme-kebhinnekaan (baca peran komunitas) dan otonomi daerah, serta globalisasi. Di tengah tantangan tersebut, pada berbagai madrasah muncul reaksi berupa eksklusifisme yang memarginalkan ke-bhinneka-an, keengganan untuk menerima demokratisasi dan terjadinya marginalisasi basis sosial madrasah yang umumnya berasal dari kelompok menengah bawah sebagai dampak globalisasi dan komersialisasi pendidikan (Amirrachman dkk, 2009: 143-151) di samping melemahnya secara umum pendidikan “karakter” pada pendidikan nasional⁴. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan nasional termasuk MAN-

² Madrasah secara formal secara bertahap bergeser dari pengutamaan pendidikan agama ke pendidikan umum (yaitu mencapai 70 persen; Keputusan Bersama Tiga menteri tahun 1975), tetapi MAN-IC sejak awal didirikannya sudah memprioritaskan jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam).

³ Sistem MAN-IC dengan model asrama (*boarding*) ini telah menunjukkan keberhasilan akademik yang menonjol. Mulai dari tingkat kelulusan yang mendekati seratus persen, jumlah kelulusan

yang banyak diterima di perguruan tinggi favorit (ITB, UGM, UI, IPB, UNAIR) sampai menerima beasiswa dari berbagai universitas ternama di luar negeri. Sejak tahun 2009, agaknya karena potensinya yang besar, ujian rekrutmen calon penerima beasiswa dari Indonesia dilakukan Nanyang Technology University di madrasah ini.

⁴ Nampak pada ungkapan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Nawacita presiden /wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

IC sebagai upaya menyiapkan sejak dini agar generasi penerus lebih tanggap dalam menjawab tantangan lama (modernisasi) maupun tantangan yang baru (demokratisasi dan globalisasi) yang sedang berlangsung memerlukan reorientasi dan penyegaran.

Reorientasi MAN-IC agar lebih tanggap terhadap perubahan atau akumulasi tantangan-tantangan tersebut tersebar dari hal yang menyangkut sistem penyelenggaraan (*governance*), manajemen, tenaga pendidik, kurikulum, peserta didik serta cara pembelajaran. Di samping itu MAN-IC ini juga perlu dipersiapkan agar dapat direplikasi di daerah lain untuk mendorong munculnya keunggulan lokal yang khas. Atas dasar dua kepentingan di atas itulah maka metode *rapid assessment* telah dilakukan. *Rapid assesment* atas penyelenggaraan dan pelaksanaan MAN-IC telah dilakukan di dua lokasi (Jakarta dan Jambi) tahun 2012, merupakan studi kualitatif dan sebagai penelitian kebijakan (*policy research*). Tujuannya adalah memberikan bahan untuk mengembangkan model MAN-IC yang ideal. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan uraian singkat yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut.

LANDASAN TEORETIK DAN PARADIGMA POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL

Teori Human Capital menyebutkan bahwa investasi sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh *harapan nilai balik budaya dan sosial-ekonomi seumur hidup* yang dibayangkan lebih tinggi daripada kesempatan yang hilang (Becker, 1975: 9; Woodhall, 1987: 1-2). Teori ini dapat menerangkan mengapa anak-anak dan anak muda, terutama lelaki dianggap lebih ‘menguntungkan’ untuk menerima investasi pada pendidikan, karena mereka cenderung akan memperoleh nilai balik investasi yang lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya (Becker, 1975:64-75). Oleh karena itu pendidikan/pelatihan generasi muda menjadi prioritas investasi, baik oleh masyarakat, negara, maupun dunia usaha/perusahaan. Pendidikan generasi muda sebagai investasi diharapkan mampu menciptakan kekuatan untuk melakukan reproduksi dan transformasi budaya, sosial dan ekonomi di masa depan. Sejalan dengan hal di atas, terdapat aliran-aliran yang menekankan arti dan peran pendidikan secara berbeda-beda. Aliran Reproduksi (Bourdieu dan Passeron, 1977:26) menekankan peran pendidikan sebagai instrumen untuk *mereproduksi* budaya, sosial dan ekonomi, aliran Modernisme (Inkeles and Smith, 1974) menekankan peran pendidikan formal sebagai instrumen *transformasi* agar masyarakat menjadi modern, sedangkan aliran Post-Modernisme (Aronowitz & Giroux, 1990) menekankan peran

pendidikan sebagai “*locus of struggle*” dan instrumen *negosiasi* serta *cara kompetitif* bagi peserta didik untuk menentukan ke mana arah budaya, sosial dan ekonomi masyarakat ke depan. Pada ketiga aliran besar tersebut, baik yang menekankan reproduksi, transformasi ataupun “*struggle*”/ *negosiasi* serta kompetisi budaya, sosial dan ekonomi. Peran yang diberikan kepada masyarakat, negara dan dunia usaha dalam pendidikannya bervariasi sesuai dengan filsafat yang dianut. Filsafat Sosialisme menekankan peran komunitas, Etatisme menekankan peran negara, dan Kapitalisme menekankan peran dunia usaha dalam pendidikan. Kecenderungan pada masing-masing filsafat tersebut juga berdampak pada penekanan masing-masing aliran menyangkut aspek-aspek pendidikan, yaitu apakah akan lebih menekankan pada pendidikan *value*, pada *knowledge* ataukah pada pendidikan *knowhow* di sekolah.

Paradigma politik pendidikan nasional Indonesia, yang mendasarkan diri pada falsafah Pancasila, tampak dari nilai yang terkandung pada masing-masing silanya, maupun UU Sisdiknasnya, yang mana mempunyai karakternya sendiri yaitu tidak membabi buta mereproduksi, atau sebaliknya mentransformasi ataupun “*struggle* dan *negisoasi*” terhadap semua bentuk realitas budaya, sosial dan ekonomi di masyarakat. Paradigma politik pendidikan nasional Indonesia melakukan ketiganya secara selektif. Ini berarti bahwa falsafah pendidikan nasional juga mereproduksi, mentransformasi sekaligus menegosiasi/ mengkompetisikan realitas budaya, sosial dan ekonomi, sejauh persepektif masing-masing-masing silanya dapat tumbuh kembang pada peserta didik. Demikian pula paradigma yang dimiliki tidaklah hanya mengandalkan salah satu saja dari tiga pilar yang ada (negara, pasar dan komunitas), melainkan memberikan peran kepada ketiganya sekaligus dalam penyelenggaraan pendidikan untuk bersinergi mengembangkan semua silanya. Demikian pula MAN-IC berkewajiban menganut paradigma ini.

KONDISI AKTUAL TANTANGAN MODERNISASI, GLOBALISASI DAN DEMOKRATISASI

Dilihat dari sejarah pendidikan di negara-negara bangsa yang tumbuh setelah Perang Dunia Kedua dan ketika globalisasi belum masuk dengan deras, seperti diutarakan Martin (1978), pendidikan nampak lebih ditekankan untuk menciptakan kebangsaan (*nation and character building*, persatuan nasional) di atas masyarakat yang berbeda-beda suku dan agamanya. Namun pada tahap kemudian, yaitu setelah persatuan nasional dianggap oleh elit telah relatif tercapai,

pendidikan lebih diarahkan menjadi instrumen modernisasi/ industrialisasi nasional (*national socio-economic development*). Pendidikan Islam di Indonesia yang asli yang mempunyai berbagai nama sesuai daerah masing-masing, (seperti pesantren di Jawa, *kerbung* di Lombok, *dayah* di Aceh) pada umumnya tidak memberikan “pelajaran umum”, seperti Sejarah Indonesia, kewarganegaraan, matematika dan sains, juga kemudian secara bertahap menerima pelajaran-pelajaran tersebut. Madrasah merupakan bentuk baru hasil modernisasi terhadap pendidikan Islam yang asli tersebut (Noor, Sikand dan van Bruinessen, 2007: 14). Akibat modernisasi, komposisi kurikulum yang diajarkan di madrasah pun mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, yaitu dari penekanan yang kuat pada pelajaran agama ke penekanan yang kuat pada mata pelajaran umum, termasuk matematika dan sains (Amirrachman dkk, 2009: 143-151). Kendati demikian, modernisasi pendidikan di Indonesia, jika dilihat dari hasil pembelajarannya, pada umumnya belum mengembirakan. Hasil pendidikan di Indonesia termasuk madrasah, menurut *The Learning Curve Report*, dengan kriteria kemampuan matematika, sains dan membaca tertinggal, hanya sejajar dengan Kolumbia, Brazil, Thailand dan Meksiko (Suyanto, 2013:7). Survey TIMSS 2011 juga menunjukkan ketertinggalan siswa Indonesia di tingkat dasar dan menengah di bidang sains - menempati tiga urutan terendah, jauh di bawah hampir semua negara Timur Tengah (Tabel 3.2 TIMSS 2011 Sains, Terry Mart, 2012:6). Gambaran ketertinggalan ini diperkirakan lebih serius dialami madrasah apalagi pesantren.

Di samping itu, modernisasi yang dilakukan juga telah meminta ongkos sosialnya. Dalam proses perkembangannya, modernisasi/ industrialisasi yang dilakukan ini kemudian melahirkan spesialisasi, sehingga masyarakat baru yaitu sebagai bangsa terbagi atau terstratifikasi dalam klas-klas sosial dan profesi. Ini menimbulkan kesenjangan pembangunan secara geografis akibat perbedaan tingkat modernisasi/ industrialisasi yang mendorong migrasi-urbanisasi. Dalam kondisi seperti itu, maka pengikat sosial yang lama yang diberikan masyarakat lama (primordial), khususnya pengikat solidaritas ke atas dan ke sampingnya hilang, atau berubah menjadi impersonal, dan solidaritas ke dalam yaitu ikatan keluarga, mengendur. Di balik dinamika sosial seperti itu, juga terjadi pergeseran nilai yang pada dasarnya menuju pada keahlian yang dihargai dengan uang/materi sebagai kriteria yang menstratifikasi masyarakat. Nilai dasarnya, yaitu uang yang menjadi representasi tingkat keahlian, kemudian dirasakan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga modernisasi/industrialisasi dipandang juga membawa dehumanisasi. Respon

terhadap dehumanisasi akibat modernisasi/ industrialisasi muncul dalam bentuk sosial politik yaitu demokrasi. Yaitu, nilai *vote* atau suara yang dianggap lebih merepresentasi “nilai atau kepentingan” setiap manusia yang dianggap sama daripada sekedar tingkat kepemilikan uang yang senjang.

Namun demikian konsensus yang menjadi ciri demokrasi dipandang mereduksi perbedaan, karena disensus identitas yang plural tidak dapat direpresentasikan, sehingga menimbulkan anomie (Kymlicka, 1995:30). Akibatnya, di dalam demokrasi model lama, apalagi yang bertumpu pada negara-bangsa yang menekankan persatuan dan kurang menghargai keberagaman, ruang bagi tampilnya identitas pribadi-pribadi yang bersifat dissensus atau plural menjadi sempit. Dalam bahasa Fukuyama (2007), industrialisasi dalam negara bangsa telah mengubah ethos masyarakat yang disebut Ferdinand Tonnies sebagai *gemeinschaft* (*paguyuban*) menjadi *gesellschaft* (*patembayan* (bhs Jawa) atau kompetisi) yang disertai penekanan berlebihan pada aspek ke-ika-an dari kebangsaan, mengakibatkan alienasi dan anomie sosial-ekonomi dan hilangnya identitas asli, maka pada puncak krisisnya menjadikan masyarakat ingin menemukannya kembali identitas atau jati-dirinya melalui politik identitas (Jackson, 2011:3) antara lain suku atau agama. Masyarakat yang mengalami alienasi dan anomie akibat modernisasi/industrialisasi dan penekanan pada keikaan itu kemudian memandang agama sebagai potensi untuk humanisasi karena agama memberikan nilai spiritual dan menjanjikan masyarakat yang kompak, intim-personal, beridentitas dan berkarakter. Pertumbuhan madrasah yang lebih cepat daripada sekolah akhir-akhir ini di Indonesia (USAID & DBE3, 2007:7), agaknya berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Agaknya pendidikan madrasah dianggap dapat menjadi simpul yang berperan mengisi, menyatukan, dan membangun format hubungan sosial yang baru untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang telah luntur akibat modernisasi/industrialisasi. Namun demikian, *counter-culture* sebagai respons terhadap modernisasi dan industrialisasi ini akan bersifat problematik bagi Madrasah, mengingat sebagai pendidikan formal berciri ke-Islam-an, di samping mengemban visi keumatan yang global juga harus melaksanakan modernisasi /industrialisasi tetapi tetap membangun jangkar (*anchor*) kebangsaan Indonesia.

Oleh karena itu, upaya perbaikan model MAN-IC sendiri mendapat momentum politik ketika Kemenag berupaya mencari kembali arah madrasah ini di tengah tawaran Pemerintah Daerah untuk bekerjasama “menerapkan standard nasional MAN-IC” sekaligus mengkomodasikan warna lokal di daerah. Model

idealnya adalah dengan menjawab tantangan jaman dari perspektif Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan dengan mempertimbangkan Standar Pendidikan Nasional (SPN) sebagai pijakan keikaan serta mengakomodasi budaya lokal yang plural. Perspektif “ke-Islaman dan Keindonesiaan” muncul menjadi masalah yang signifikan, ketika wadahnya yaitu negara-bangsa, juga mengalami tantangan serius. Hancurnya negara-bangsa (Ohmae, 2002: hal vi) seperti yang terjadi di berbagai negara, disebabkan oleh bergesernya peran empat *moulding factors* pembentuk negara-bangsa, yaitu teritorial, kontrol atas kekerasan, dan struktur kekuasaan impersonal serta legitimasi, akibat kehadiran faktor moulding yang baru, yaitu globalisasi industri, investasi, globalisme individu dan informasi, serta *global governance*. Oleh karena itu, kehadiran globalisasi menuntut pembentukan “karakter negara kebangsaan yang baru”.

Menghadapi kelima globalisasi itu, kelompok-kelompok sosial, ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda yang terdapat di suatu negara atau wilayah, terpapar secara tidak simetrik dalam mendapatkan peluang dan tantangan yang masuk untuk mengembangkan ruang hidupnya (*lebensraum*). Akibatnya terjadi kesenjangan dan kesetaraan yang baru muncul yang menuntut tata hubungan dan *equilibrium* yang baru. Ohmae berpendapat bahwa guna memperkuat negara dari ancaman globalisasi, maka negara perlu memperkuat otonomi di daerah-daerah, antara lain melalui pengembangan peran komunitas dan otonomi daerah. Sejalan dengan itu maka permintaan beberapa daerah terhadap kehadiran MAN-IC untuk men-substitusi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang memberatkan anggaran daerah, merupakan peluang untuk diakomodasikan ke dalam model MAN-IC “baru” ke depan.

Di sisi lain, dampak dari globalisme individu dan informasi pada umat Islam cenderung menawarkan aliran politik, baik liberal (baca: Barat), maupun sebaliknya, yaitu *global Islamist* dari luar yang mengedepankan identitas tegas dan radikal, ke tengah umat Islam Indonesia yang sedang mengalami kelunturan identitas (lokal) akibat penekanan ke-ika-an yang dipaksakan negara dan modernisasi/industrialisasi tetapi membutuhkan identitas baru. Geopolitik budaya umat Islam Indonesia sekarang berada di tengah persaingan tiga “supra negara” yaitu, (nilai) Demokrasi Barat, supra-negara berupa “*global political Islam*”, serta Supra-Negara Kebudayaan Konfusianisme (Jacques, 2010: 20-25). Umat Islam Indonesia menjadi “bahan rebutan” aliran Fundamentalisme Islam (al diwakili Jamaah Islamiyah dan ISIS yang beraliran Salafi), demokrasi Liberal

(Indonesia dianggap AS sebagai mitra strategis menghadapi China) dan Konfusianisme China. Sejauh ini globalisasi nampak telah membuahkan polarisasi umat Islam: di satu pihak oleh tarikan globalisme Islam (aliran Salafi) dan di lain pihak oleh tarikan demokrasi (Barat). Pilihan demokratisasi politik yang dipilih di Era Reformasi sementara ini dianggap mampu untuk memenuhi berbagai tuntutan ruang politik, baik tuntutan politik identitas “asli” lokal, gerakan salafi, liberalis, maupun Konfusianisme.

Di samping itu, globalisasi aliran Neo-liberal yang telah masuk ke Indonesia menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang lebih dalam melalui desentralisasi, termasuk pada sekolah/madrasah.

“Differences of wealth and social class, a further factor that has long fractured Indonesian integration, have deepened in recent years, partly under the influence of external agencies, such as the World Bank and Asian Development Bank, which have each pressed for more structural adjustment measures. Under this new regime of structural adjustment, or economic globalisation (Welch and Mok: 2003), wealthier and more powerful communities with greater cultural and financial resources have extended their advantage. Decentralisation has further licensed this cleavage” (Amirrachman, 2009:147)

Masalahnya adalah pada tataran konsepsional penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan nasional, termasuk pada madrasah, format mana yang akan dibentuk umumnya masih dijawab dengan gamang: yaitu antara bergerak mempertahankan tradisi lama, dan atau selektif, serta eklektif terhadap hal baru yang hadir bersama demokratisasi dan globalisasi itu. Sebagai contoh, dari segi kurikulum bahasa nampak bahasa Inggris (di semua sekolah) dan bahasa Arab (di madrasah) telah banyak diberikan. Tantangan atau peluang yang diberikan oleh Konfusianisme, masih belum masuk dalam orientasi hampir semua sekolah/madrasah di Indonesia. Di pihak lain, respon terhadap globalisasi yang nyata diambil oleh berbagai sekolah/madrasah di tanah air adalah-bukan kerjasama, melainkan kompetisi, antara lain dengan menggaet pihak luar (*sister school* di luar negeri) atau bahkan sekolah/madrasah, pada umumnya sekolah swasta, dibentuk sebagai *franchise* sekolah asing, guna menghadapi sekolah /madrasah lokal. Kompetisi nampaknya lebih merebak dan komersialisasi nampaknya menjadi salah satu caranya. Dalam hal ini, madrasah yang umumnya berbasis sosial ekonomi

masyarakat menengah-bawah nampak mendapat tantangan serius.

Oleh karena itu menemukan orientasi yang tepat bagi sistem pendidikan madrasah ke depan, dengan kata lain politik pendidikan nasional, politik madrasah dan MAN-IC khususnya, untuk merespon secara konsepsional geopolitik budaya globalisasi tersebut, merupakan kebutuhan strategis yang dapat disumbangkan untuk membangun bentuk yang kokoh pendidikan yang berkarakter keIslaman-keIndonesiaan sekaligus.

Di samping tantangan geo-politik budaya global yang masuk ke Indonesia seperti di atas, pilihan politik dalam berbangsa dan bernegara, yaitu demokratisasi, juga menjadi tantangan, baik berupa tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran maupun tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan (yaitu agar pada keduanya lebih demokratis). Sosialisasi demokrasi *melalui* praktek pendidikan (pembelajaran terhadap mitra didik) merupakan hal yang nampak baru bagi sekolah/madrasah, antara lain oleh karena munculnya isu hak-hak azasi anak (Zamroni, 2001). Sosialisasi demokrasi melalui pelaksanaan pembelajaran *dapat* terjadi atau potensial oleh karena pendidikan berdampak pada tiga hal: pertama, meningkatkan mobilitas kultural (siswa menjadi kritis, *civilized*, otonom, solider, multikultural dan toleran) (Gouldner, 1979:50). Kedua, pendidikan meningkatkan mobilitas horisontal selepas sekolah (kelompok terdidik cenderung berurbanisasi yang menimbulkan '*interest based society*' yang bertolak dari pluralitas etnik, sosial dan budaya pada suatu wilayah perkotaan, bukan '*identity-based society*' seperti yang terjadi pada komunitas pertanian. *Interest based society* ini menuntut nilai dan tatanan sosial yang demokratis (Ma'ruf, 2003:30) Ketiga, pendidikan meningkatkan mobilitas vertikal (pembentukan kelas menengah yang berakar sosial plural dan berperan penting dalam mengontrol negara) (Sujatmiko, 2003:40-47, Gouldner, 1979:50). Peran pendidikan yang demikian dapat dianggap merupakan prasyarat utama bagi pemberdayaan masyarakat untuk mencapai *civil society* atau masyarakat madani⁵, yaitu masyarakat yang menurut Arif Budiman (dikutip oleh Tilaar, 2003: 49) mempunyai ciri-ciri demokrasi, inklusivisme, egalitarianisme, dan toleransi.

Namun demikian, potensi sosialisasi demokrasi kepada peserta didik melalui pendidikan, khususnya melalui proses pembelajaran, dapat mubazir bahkan sebaliknya dapat melahirkan nilai dan perilaku sosial anti demokrasi manakala antara lain rekrutmen siswa, kurikulum dan cara pembelajarannya tidak dirancang untuk itu (Suparno, 2000:60). Terdapat gejala yang memprihatinkan di sekolah dan madrasah sekarang, yaitu kecenderungan untuk menemukan identitas eksklusif yang nampak pada rekrutmen siswa secara eksklusif (kelompok mampu atau kelompok agama tertentu saja) dan pembelajaran pada ideologi keagamaan dengan cara yang kurang kritis (*religious mindedness*) sehingga kurang toleran. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali apakah rekrutmen siswa, kurikulum dan cara pembelajaran yang telah dilakukan di madrasah, dan juga di kebanyakan sekolah, itu telah sejalan dengan semangat demokratisasi.

Tantangan yang kedua dalam sosialisasi demokrasi adalah *pada* penyelenggaraan (*governance*) pendidikan. Demokratisasi pada penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu mengubah tata hubungan antara pemerintah, sekolah dan masyarakat serta siswa, sehingga lebih memungkinkan lembaga pendidikan sebagai arena publik (Habermas, 1991) yang 'dialogis dan partisipatif'. Sosialisasi demokrasi pada penyelenggaraan pendidikan mengkondisikan dan memberikan "relasi kuasa" bagi masyarakat untuk terlibat dalam *governance* dan manajemen untuk terselenggarakannya pendidikan yang demokratis. Demokratisasi pada penyelenggaraan pendidikan melalui partisipasi komunitas dan desa sangat penting untuk keberhasilan pendidikan. Secara empirik, dari 520 sekolah yang diteliti di Jawa Tengah, Pradhan dkk, menemukan bahwa demokratisasi melalui partisipasi komunitas dan desa terbukti signifikan meningkatkan hasil pembelajaran (sementara suntikan dana dan SDM, seperti yang ditekankan pemerintah, kurang signifikan)

"We find that institutional reforms of school committees that enhance its social capital in the community show positive effects on learning but interventions that enhance financial and human capital are less cost effective..... Our results also speak to well-known, cross-country evidence showing that changes in educational spending show weak

⁵ Dari bermacam-macam pengertian atau bahkan definisi-definisi *civil society* atau 'masyarakat madani', Iwan Gardono Sujatmiko (Sujatmiko, 2003:40-47) yang bertolak dari pendapat Foley dan Edwards menyimpulkan bahwa terdapat 3 tipe *civil society*, yaitu tipe horizontal, tipe vertikal dan tipe gabungan keduanya. Tipe horizontal menunjukkan adanya nilai-nilai moral yang mengikat

kebersamaan masyarakat yang plural, tipe vertikal menunjukkan adanya asosiasi dan ruang public yang dimunculkan oleh tipe pertama di luar atau menghadapi Negara.

correlations with changes in learning outcomes (World Bank, 2003). Like Duflo, Dupas and Kremer (2009), we find that providing resources alone is not cost effective. However, substantial gains are obtained when grants are combined with relatively cheap institutional reforms” (Pradhan dkk, 2013:6-8).

Di samping itu, lembaga pendidikan sebagai investasi sosial, budaya dan ekonomi akan menjadi kuat, lestari dan relevan dalam melakukan transformasi masyarakat dan dapat memetik nilai baliknya (*returns on investment*) yang maksimal jika berada pada “ruang persinggungan yang dinamis” antara komunitas, negara dan pasar. Artinya, lembaga pendidikan akan berperan maksimal manakala mampu melayani “titik-temu” kebutuhan antara masyarakat, negara dan pasar. Dalam jangka panjang, layanan yang tepat seperti itu akan menempatkan pendidikan sebagai agen yang mampu mentransformasikan hubungan antara ketiganya agar lebih meningkat sinergitasnya. Namun demikian, kebanyakan madrasah dan juga sekolah, kurang mengambil posisi yang tepat sesuai dengan perubahan hubungan tiga pilar tersebut. Sebagian besar sekolah sangat lekat dengan negara, sebagian besar madrasah lekat dengan masyarakat (Amirrachman dkk, 2009: 149) dan sebagian yang lain (sangat kecil, yaitu sekolah kejuruan) diharapkan lekat dan bergantung pada pasar. Dampak dari bias-bias tersebut menempatkan pendidikan seakan-akan bukan arena publik, masing-masing tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk melakukan *check and balances* dalam governance dan manajemennya, di samping hasilnya, yaitu kuantitas-kualitas lulusan, kurang mendukung “titik-temu” kebutuhan sebagai sinergitas tiga pilar tersebut. Spesialisasi sangat dibutuhkan, namun jika kelahirannya mengabaikan partisipasi pilar lainnya, seperti terjadi pada politik pengajaran jaman kolonial yang mengabaikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pendidikan sebagai strategi kebudayaan ini akan cenderung menempatkan pilar lainnya sebagai objek eksploitasi. Pemulihannya dari kondisi seperti itu mensyaratkan adanya pengembangan peran yang relatif seimbang antara tiga pilar tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan. Sesungguhnya peluang ke arah itu terbuka luas dengan lahirnya kebijakan Otonomi Madrasah sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Melalui pembentukan Majelis Madrasah, maka komunitas dan dunia usaha –di samping negara- mendapat peluang partisipasi politik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dari berbagai tantangan di atas, nampaklah bahwa salah satu isu yang sangat strategis untuk menghadapi atau

memecahkan tantangan-tantangan di atas adalah isu demokratisasi: dalam *governance* pendidikan, dalam manajemen (pemberian bantuan kepada kelompok miskin), dalam mengembangkan KeIslaman dan Ke-Indonesia-an, dalam desentralisasi (untuk menghubungkan madrasah dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal, dan dalam proses pembelajaran). Tanpa memperhatikan tantangan strategis di atas, maka madrasah ke depan akan menjadi kekuatan yang isolasionis atau *dis-engagement* dan kurang efektif seperti pada masa-masa sebelumnya, karena madrasah tak akan mampu berperan “*to connect, compete and collaborate*” (hasil Konferensi Pendidikan Islam se-Dunia di Azerbaijan), baik bagi individu maupun kelembagaan.

Oleh karena itu, MAN-IC memerlukan penyegaran dan reorientasi guna mendapatkan sistem penyelenggaraan, manajemen, tenaga pendidik, kurikulum serta cara pembelajaran yang relevan dengan tantangan perubahan yang terbaru, khususnya demokratisasi, termasuk otonomi daerah, dan globalisasi. Ujudnya, antara lain, tuntutan bahwa madrasah hendaknya menerapkan sistem *governance* dan manajemen publik dan meningkatkan relevansinya dengan upaya penguatan iptek, demokratisasi dan otonomi daerah. Dengan kata lain, MAN-IC memerlukan kurikulum dan pembelajaran yang mendukung bagi tercapainya nilai-balik budaya, sosial dan ekonomi yang maju/maksimal ke depan, serta bersifat emansipatif-demokratis sehingga terjadi keterbukaan, partisipasi, serta keberpihakan kepada yang tertinggal. Corak pembelajaran misalnya, harus menyesuaikan lebih lanjut dengan prinsip-prinsip “sharing” dalam demokrasi, dimana guru dan kurikulum bukan lagi seperti sekarang, yaitu masih dianggap sumber kebenaran tunggal, kurang menghargai hak azasi siswa, kurang dialog, dan siswa beridentitas lain (baca: agama lain) belum dijadikan mitra setara, kurang empati serta kurang menempatkan pihak selain guru sebagai sumber pengetahuan dan penilaian.

PRINSIP-PRINSIP UNTUK MENUJU MODEL MAN-IC “BARU”

Gambaran untuk mendapatkan model MAN-IC yang diidealkan, paling tidak terdapat sejumlah prinsip bagi visi-misi “MAN-IC Baru” sebagai berikut; Pertama, di masa depan MAN-IC harus menjadi model yang mampu mengkolaborasikan tiga pilar: Negara, masyarakat dan dunia usaha. Ketergantungan MAN-IC yang kuat pada Negara yang terjadi sekarang harus dimaknai sebagai masa transisi. Kolaborasi itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sehingga madrasah akan lebih relevan

secara politik, ekonomi dan sosial-budaya. Sedangkan dalam manajemen, di samping mengedepankan prinsip efektif dan efisien, juga perlu lebih akuntabel dan transparan. Prinsip seperti ini sejak dini harus dikondisikan, agar madrasah negeri akhirnya benar-benar menjadi milik dan tanggung-jawab publik, bukan seperti sekarang yang lebih nampak terkesan sebagai milik dan tanggungjawab pemerintah atau sebaliknya milik keluarga. Kesan ini muncul karena pertanggung-jawaban lebih pada pertanggungjawaban administrasi anggaran DIPA ke Pemerintah, atau sebaliknya Yayasan, terutama sarana-prasarana dan nilai capaian Ujian Nasional, sedangkan isu manajemen yang lain (perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) yang menyangkut komponen pendidikan yang lain (kurikulum, siswa, tenaga pendidikan/kependidikan, praktek pembelajaran) nampak diterima *taken for granted* oleh sekolah dan tidak terbuka ruang untuk partisipasi dari pihak di luar pemerintah. Misalnya rekrutmen siswa (seperti kelompok sosial-ekonomi mana yang lebih diuntungkan) serta apakah madrasah, terutama madrasah negeri tersebut sebagai jangkar Ke-Islam-an dan Ke-Indonesia-an telah mencerminkan ke-bhinnekaan pemahaman ke-Islaman dan keberagaman etnis Nusantara, tampak kurang transparansinya, sehingga publik belum dapat melihat akuntabilitasnya. Melalui pengembangan keterlibatan/partisipasi peran non-negara dan pengembangan manajemen yang transparan, maka pemerintah melalui dinas, guru & civitas madrasah, dan orangtua murid serta masyarakat, termasuk dunia usaha, pada gilirannya dapat menjadi *stakeholders* yang saling berbagi visi, masalah, dan sumberdaya dan solusi untuk memajukan madrasah.

Kedua, perbaikan model MAN-IC sebagai madrasah percontohan hendaknya diarahkan untuk mempersiapkan sejak dini generasi baru yang kelak dapat menjawab modernisasi, tantangan global pendidikan Islam (*to connect, to compete and to collaborate*⁶) dan demokratisasi dengan berkarakter Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan. Oleh karena itu, Standar Pendidikan Nasional (SPN) sebagai pijakan awal dan hasil positif dari evaluasi internal yang telah dilakukan tetapi belum memasukkan globalisasi dan demokratisasi sebagai tantangan, belumlah cukup sehingga diperlukan formulasi karakter yang khas MAN-IC dengan visi-misinya yang baru guna menjawab tantangan di atas.

Ketiga, Takwa, cerdas, terampil sebagai tujuan akhir dari proses belajar nampak masih belum disasar secara seimbang oleh karena adanya penekanan pada pengembangan kognisi, sementara pengembangan

afeksi (kendati melalui agama khususnya kecerdasan spiritual relatif kuat dibanding pada sekolah umumnya) dan pengembangan psikomotorik/ ketrampilan, tampak masih kurang. Penekanan pada kognisi, seperti optimalisasi nilai UN (Ujian Nasional) dan penghafalan al-Qur'an sebagai "simbol" penanda MAN-IC selama ini perlu diimbangi dengan pengembangan afeksi dan psikomotorik. Oleh karena itu MAN-IC dengan visi-misi yang baru nanti perlu menyegarkan kembali pendidikan yang seimbang-utuh tersebut sebagai prinsip guna menyongsong tuntutan modernisasi, globalisasi dan demokratisasi.

Keempat, konsep sekolah berasrama (*boarding school*) sebagai alat untuk mempertemukan dan memelihara keanekaragaman sosial-budaya peserta didik, bukan untuk mengisolasi dan menyeragamkannya seperti yang umumnya terjadi. Sistem asrama yang memiliki sejumlah kelebihan untuk pendampingan proses belajar dan evaluasi terhadap perilaku (budi pekerti siswa), hendaknya tidak menjebak siswa sehingga hanya memahami "school culture"-nya sendiri, tetapi relatif "buta" terhadap "social and cultural environment" sekitarnya seperti yang terjadi sekarang ini. Terlebih lagi MAN-IC yang mengadopsi model pondok pesantren sebagai lembaga reproduksi budaya toleran dan inklusif di Indonesia--, maka perlu menjadi kehidupan asrama sebagai sarana untuk mencapai keunggulan ketrampilan sosial yang santun dengan semangat "*to live together*", termasuk dengan umat beragama lain.

Kelima, cara belajar-mengajar didasarkan pada keseimbangan antara deduksi, induksi dan dialogis, agar siswa terlatih untuk berpikir dinamik yang melibatkan tiga hal sekaligus: prinsip umum, detail empirik dan cara pandang yang menyeimbangkan kepentingan pihak diri dan kepentingan orang lain. Sejauh ini pembelajaran umumnya menekankan cara "menabung" –materi berupa dalil, kaidah dan corak umum, sehingga bersifat deduktif, diikuti guru mengevaluasi serapan siswa sebagai "bank". Corak pembelajaran seperti ini kurang mengembangkan bahkan mematikan rasa keterlibatan terhadap empiri dan detail, serta mematikan sifat partisipatoris dan emansipatoris yang penting untuk membangun generasi yang mampu merumuskan masalah dan solusi sesama generasinya secara demokratis, sekaligus terlatih dengan cara dan langkah pemecahannya yang kontekstual-historis agar menjamin keadilan.

Keenam, menghindarkan terjadinya komersialisasi pendidikan, dengan mengedepankan porsi yang adil

⁶ Hasil Konferensi Pendidikan Islam se-Dunia di Azerbaijan, 2011.

antara mereka yang mampu menyumbang biaya pendidikan dengan mereka yang miskin tetapi cerdas dan memerlukan bantuan. Sistem subsidi dan subsidi silang perlu diadopsi dan harus didasarkan pada prinsip keadilan tersebut.

KELEMAHAN MAN-IC YANG MENDESAK UNTUK DITANGANI SAAT INI

Berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengembangkan MAN-IC yang baru tersebut di atas, maka terdapat kelemahan dan cara-cara mengatasinya. Kelemahan prinsipial yang mendasak untuk ditangani terdapat pada empat ke-tidak-seimbangan. Yaitu, kurang seimbangannya partisipasi antara pemerintah, orangtua/masyarakat dan dunia usaha; kurang seimbangannya penguatan antara afeksi, kognisi dan psikomotor atau *value, knowledge* dan *knowhow*; dan kurang seimbangannya penguatan antara kemampuan individual dan kemampuan kelompok serta kurang seimbangannya penguatan antara *academic/ school culture* dengan *socio-environmental culture*. Upaya penyeimbangan terhadap kondisi-kondisi timpang di atas sekaligus merupakan upaya di tingkat madrasah untuk menyiapkan generasi muda secara nyata untuk menyambut tantangan modernisasi, globalisasi dan demokratisasi seperti diuraikan di bawah ini.

Sistem pendidikan nasional yang kuat dan lestari tidak semata-mata bertumpu pada negara (etatisme), masyarakat (komunitarianisme) atau semata-mata bertumpu pada dunia usaha (kapitalisme), melainkan menjadi titik sinergi sekaligus membangun SDM yang relevan dengan menguatkan (partisipasi) ketiganya. Pihak MAN-IC sebagai lembaga dalam sejarah yang telah dijalaninya nampak menjadi “*battle-ground*” antara setidaknya dua aliran, yaitu yang menekankan peran (subsidi) negara (periode awal), dan peran partisipasi (finansial) masyarakat/orangtua siswa (akibat kurangnya dana anggaran pemerintah, periode krisis ekonomi tahun 1998). Pada periode terakhir, kembali menekankan peran (subsidi penuh) negara tetapi dengan catatan, bahwa MAN-IC dikhususkan untuk anak miskin. Peran dunia usaha/korporasi belum pernah nampak dalam *governance* dan manajemen MAN-IC. Sesungguhnya dengan Undang-undang Sisdiknas nomor 20 /2003 sistem pendidikan nasional telah mengarahkan pada keseimbangan partisipasi tiga pilar tersebut. Namun demikian, sekolah dan madrasah negeri pada umumnya masih sangat bergantung kepada negara. Dari prinsip ini juga terkandung makna bahwa

upaya pendidikan sebagai upaya pembudayaan adalah untuk menyiapkan SDM berkualitas dengan menginternalisasi dan mengembangkan *value, knowledge* dan *knowhow* dari tiga pilar yang saling mendukung dan *check and balances* itu. Sejarah MAN-IC sendiri menunjukkan bahwa periode ketika para walimurid diberi ruang partisipasi terbukti melahirkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Dilihat dari prinsip keseimbangan partisipasi tiga pilar tersebut, maka nampaklah beberapa kelemahan MAN-IC sekarang berikut berbagai akibatnya.

Kelemahan pertama adalah ketergantungan dana yang sangat besar kepada negara (subsidi siswa mendekati 100 persen,-- perkapita subsidi diperkirakan lebih dari Rp 3.5 juta per bulan) yang dialami MAN-IC sekarang adalah belum ideal dan kurang serasi dengan UU Sisdiknas yang berlaku (UU Sisdiknas tahun 2003 Pasal 46 (1)⁷ yang menekankan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan. Manajemen DIPA yang kurang fleksibel, di samping kurang memberi ruang bagi Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah, juga menyebabkan MAN-IC saat ini mengalami kelambanan respon terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan dan pengembangan yang cepat dan prima, salah satunya adalah dalam pengadaan guru (sebagian telah mendekati usia pensiun, sementara yang muda sebagian masih berstatus honorer).

Kelemahan kedua, di luar isu gaji yang lebih kecil dibandingkan masa sebelumnya (pada Fase Pertama dulu gaji guru empat kali guru PNS), manajemen tenaga pendidikan secara sentralistik (di tangan Kemenag) cenderung mendorong pertanggungjawaban guru lebih berorientasi formal-administratif “ke atas” dan kurang berorientasi pada peningkatan kinerja siswa dan pertanggungjawaban kolegal sebagai korps MAN IC sebagai korps madrasah model. Akibatnya, al. modal kreatifitas manajemen dan model pembelajaran yang selama ini telah diakumulasi MAN IC selama masa otonomi (periode kedua), cenderung kurang berkembang sekarang.

Kelemahan ketiga, sebagaimana umumnya “fenomena siswa bebas-bea”, kepedulian orangtua /wali terhadap pembelajaran anak dan sekolahnya itu lemah dan kurang kritis (Jowett dan Baginsky, 1988: 36–44), sehingga Majelis Madrasah (yang berfungsi memberi ruang partisipasi bagi masyarakat dan juga dunia usaha), kurang terpacu untuk bersinergi dengan Madrasah untuk memecahkan masalah-masalah kongkrit, baik yang bersifat kelembagaan, ketenagaan

⁷ UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan Pasal 4 (1) Pendanaan pendidikan

menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

maupun kinerja siswa, secara lebih fokus dan terencana.

Di samping itu, Kelemahan selanjutnya adalah ketergantungan yang besar kepada subsidi pemerintah pada MAN-IC ini menjadi kurang sesuai dengan peran idealnya sebagai madrasah percontohan, karena kebanyakan madrasah adalah swasta yang justru banyak bertumpu pada (sumberdaya) partisipasi masyarakat. Lemahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha pada penyelenggaraan MAN-IC sebagiannya merupakan akibat dari dicabutnya Keputusan Menteri Agama Nomor 101 tahun 2001 yang lebih demokratis dengan diterbitkannya Kepmen Nomor 409 Oktober 2003 yang lebih birokratis dan kurang demokratis (Amirrachman dkk, 2009:153). Kemen 101/2001 pada dasarnya merupakan upaya reformasi internal organisasi madrasah dan eksternal yaitu hubungan antara staf madrasah dengan kantor Kanwil, melalui tujuh kewenangan yang diberikan kepada Majelis Madrasah sebagai representasi masyarakat. Tujuh kewenangan Majelis Madrasah itu adalah kewenangan memilih kepala sekolah, anggaran, kurikulum muatan lokal, rencana pembelajaran, rekrutmen guru, pengawasan dan evaluasi pembelajaran (Amirrachman, 2009:151).

Menurut Amirrachman (2009: 152) " the lesson of Decree 101 is that policy-makers in MORA (Kementerian Agama, penulis) failed to make principals and teachers aware of the potential benefits of increased involvement of parents, teachers, and community members. The lack of resources and political will on the part of MORA is behind its failure to market parental and community participation ".

Dengan "kegagalan" itu maka ditetapkan Kepmen 409/2003 yang justru kembali memperkuat posisi Kanwil dan kepala sekolah, yang berdampak pada hilangnya ruang demokrasi dan transparansi publik. Dalam hal ini, civitas MAN-IC menganggap bahwa pencabutan Kepmen 101/2001 itu juga merugikan, karena sistem *governance* yang diderivasi dari Kepmen 101 ini dianggap telah terbukti mendorong tanggungjawab semua stakeholders dan telah berhasil mendorong manajemen sehingga dapat memberikan layanan yang cepat dan prima sehingga hasil pembelajaran lebih optimal. Partisipasi masyarakat/orangtua pada penyelenggaraan pendidikan berdampak positif pada hasil pembelajaran banyak berkesejajaran dengan berbagai hasil penelitian (Jowett

and Baginsky, 1988). Sebaliknya Kepmen yang baru (Kepmen 409/2003) dianggap telah mengurangi partisipasi masyarakat, mengurangi ruang gerak madrasah, menjebakny pada manajemen yang formalistik dan berorientasi ke prosedur yang ditentukan dari atas, bukan berorientasi pada pengembangan madrasah yang tanggap dan inovatif untuk perbaikan hasil pembelajaran. Kepmen yang baru itu juga melemahkan rasa memiliki di kalangan pegawai akibat sistem rekrutmen kepegawaian dan manajemen keuangan di MAN IC yang kurang otonom akibat sentralisasi.

MAN-IC tahap sekarang yang sepenuhnya disubsidi dan seharusnya ditujukan hanya untuk siswa miskin, pada kenyataannya sebagian besar siswa justru berasal dari kelompok sosial menengah⁸, sehingga subsidi nampak sebagian besar tidak tepat sasaran, padahal kelas menengah secara etis mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi secara finansial (dan politik) dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kelemahan kelima, Siswa yang berhasil direkrut dari kelompok miskin, apalagi yang mengambil jurusan IPS, setelah lulus, terutama dari MAN-IC Jambi, cenderung melanjutkan ke jurusan atau domain pendidikan non-teknologi, sehingga terlalu mahal dilihat dari biaya pendidikan yang telah dikeluarkan negara, di samping kurang efektif-produktif dilihat dari tujuan awal pendirian MAN-IC yang mengedepankan penguasaan iptek untuk mengatasi ketertinggalan umat.

Kelemahan keenam, di tengah subsidi siswa yang sangat besar, sistem *rekrutmen* siswa, di samping kurang tepat sasaran (seharusnya afirmatif terhadap kelompok miskin), juga tidak terproyeksikan secara tuntas dari hulu ke hilir (seharusnya dari hulu yaitu penelusuran minat dan bakat di tingkat SD/MI, ke seleksi penerimaan di MAN IC dan ke hilir, yaitu kontinuitas dengan pengarah ke jenjang Perguruan Tinggi yang menguntungkan. Di samping itu juga kurang efektif untuk mencapai misi, karena rekrutmen bersubsidi tinggi tersebut tidak disertai perencanaan *deployment*, yaitu *penempatan* oleh Pusat setelah mereka lulus Perguruan Tinggi. Akibatnya, melihat kenyataan kecenderungan bahwa alumni MAN-IC lulusan Perguruan Tinggi di dalam maupun luar negeri sebagian bekerja di perusahaan asing, maka tanpa adanya "ikatan dinas" tersebut, manfaat langsung yang diperoleh negara akan kurang sesuai dengan subsidi besar yang telah dikucurkan. Hal-hal di atas dapat diatasi manakala Majelis Madrasah diperkuat untuk

9 Dari kehadiran orangtua atau wali murid yang menimbulkan penumpukan kendaraan roda empat (lebih dari seratus) menjelang puasa lalu di MAN IC Serpong, begitu pula di Jambi kendati lebih

moderat, sulit untuk membenarkan bahwa semua siswa MAN IC patut untuk disubsidi seratus persen.

ikut merencanakannya, bukan diperlemah seperti sekarang.

Masalah ketujuh lainnya adalah dunia usaha sebagai salah satu *stakeholder* dan pengguna akhir hasil pendidikan, nampak belum dilibatkan dalam pengembangan MAN-IC, baik untuk aspek pengembangan, misalnya pendanaan melalui CSR, penyediaan sarana pembelajaran (misalnya untuk widya-wisata industri), maupun pendidikan kewirausahaan. Padahal, di pihak lain, dunia usaha di negara lain tempat sebagian lulusan MAN-IC melanjutkan, cenderung terlibat dengan penyelenggaraan pendidikan dan pemanfaatan lulusan MAN-IC.

Di samping kelemahan pada *sistem governance* di atas, pada MAN-IC juga terdapat kelemahan lain yang mendesak untuk diperbaiki, yaitu berupa ketidakseimbangan substansi pendidikan. Pendidikan yang ideal menempatkan upaya pengembangan afeksi, kognisi dan psikomotor atau *value*, *knowledge* dan *knowhow* secara seimbang untuk menciptakan manusia yang utuh. Akibat pengaruh politik pendidikan pemerintah yang menempatkan pendidikan non-kejuruan lebih menekankan intelektual, maka secara umum sekolah non-kejuruan kurang memperhatikan pengembangan afeksi dan psikomotor atau *value* dan *knowhow*. Secara khusus penekanan sisi intelektualitas tersebut nampak pada penempatan hasil Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan sekolah. Kendati pada bulan Januari tahun 2015 Pemerintah telah menetapkan bahwa hasil Ujian Nasional tidak lagi menentukan kelulusan, namun demikian dalam pembelajarannya masih menekankan pada pengembangan kognitif, sehingga ketidakseimbangan pengembangan substansi masih tinggi. Pengaruh politik seperti itu nampak direspon secara lebih arif oleh MAN-IC dengan penekanan pada target kelulusan Ujian Nasional yang tinggi, tetapi dengan disertai penguatan afeksi atau pengembangan *value*, terutama nilai-nilai keagamaan. Kendati demikian, di samping secara umum lemah pada pengembangan afeksi dan psikomotorik untuk mencapai keseimbangan tersebut, MAN-IC sekarang masih menghadapi kelemahan-kelemahan substansi itu, al.

Pada ranah nilai, pembelajaran nilai-nilai Ke-Islaman masih lebih menekankan nilai-nilai ritual dan kesalihan individual, kurang dan perlu ditekankan kesalihan sosial yang inklusif yang duduk pada (konteks) Ke-Indonesiaan, mengingat para siswa diharapkan menjadi model percontohan dari umat Islam mayoritas yang diharapkan menjadi jangkar (*anchor*) bangsa yang berazas Bhinneka-Tunggal-Ika.

Hal di atas nampaknya berhubungan pula dengan kelemahan pada ranah pengetahuan (mata pelajaran) Agama, Sejarah dan Kebudayaan. Pelajaran Agama Islam yang diberikan masih bertumpu pada salah satu aliran Teologi (Asy'ariyah-Maturidiyah) dan satu aliran Hukum Islam (Mazhab Syafii) sehingga siswa kurang terlatih sejak dini untuk berbeda pendapat dan toleran terhadap aliran (agama) lain: sikap yang penting untuk pengembangan demokratisasi. Pelajaran Sejarah Islam lebih banyak ditandai dengan perang dan kebudayaan Timur Tengah daripada narasi perbedaan pendapat dan upaya menggalang perdamaian dan kebudayaan Nusantara dan Asia umumnya. Akibatnya, nampak pelajaran sejarah kurang muatan pembelajaran nilai kepemimpinan, kecerdikan, keteladanan, kesantunan, diplomasi, dan toleransi dari para pelaku sejarah Islam di Indonesia sebagai "*peace maker*" untuk mengembangkan nilai dan perilaku Ke-Islaman yang sesuai dengan konteks Ke-Indonesiaan di atas. Aspek ini penting untuk mengembangkan jiwa kewarganegaraan dan kepemimpinan yang Islami yang cocok dalam kondisi multikulturalisme dan globalisme, sekaligus cocok untuk mengantisipasi ancaman persaingan antar bangsa yang sekarang lebih banyak bersifat "*intellectual warfare*" yang bertujuan hegemoni, bukan perang fisik untuk dominasi dan kolonisasi.

Kelemahan pengembangan afeksi dan psikomotorik yang dialami kebanyakan sekolah non-kejuruan juga menimpa MAN-IC, namun model asrama yang dimilikinya lebih membantu mengkondisikan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan afeksi dan psikomotorik ini. Hambatan utamanya, seperti umumnya dikeluhkan oleh sekolah-sekolah, adalah waktu yang telah terlampaui padat oleh banyaknya mata pelajaran yang harus dicerna secara kognitif. Curahan waktu yang besar untuk pengembangan kognitif terutama melalui pelajaran matematika dan sains ini merupakan respon negara atas tuntutan lama yaitu modernisasi/industrialisasi yang memang banyak memerlukan penguasaan matematika dan sains, tetapi dengan penekanan seperti itu, belum memberikan porsi yang cukup untuk menjawab tantangan demokratisasi dan globalisasi. Kendati demikian, perubahan kebijakan nasional sejak awal tahun 2015 yang tidak lagi menempatkan hasil Ujian Nasional -- yang banyak menekankan kognisi -- sebagai penentu kelulusan dan kebijakan untuk kembali ke Kurikulum 2006 yang lebih sederhana, nampaknya dua kebijakan ini lebih memberikan peluang bagi madrasah untuk mengembangkan afeksi dan psikomotorik tersebut. Untuk itu, upaya untuk menemukan kristal substansi yang esensial untuk mengurangi tumpang tindih dan pengulangan materi pembelajaran, terutama

yang bersifat kognitif, mendesak dilakukan, agar pada gilirannya terbuka lebih luas peluang madrasah untuk pengembangan afeksi dan psikomotorik, terutama yang relevan untuk internalisasi nilai demokratisasi dan globalisasi. Upaya, antara lain *integrasi* 17 nilai ke dalam berbagai mata pelajaran dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya, memang perlu untuk membangun karakter siswa, namun belum cukup.

Hal lain yang mendesak untuk diperbaiki adalah menyangkut pengembangan kemampuan individual dan pengembangan kelompok secara seimbang. Seperti pada pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia umumnya, pembelajaran di MAN-IC masih lebih menekankan pengembangan kemampuan peserta didik sebagai individu-individu yang mampu berkompetisi secara individual, sedangkan pengembangan kemampuan untuk bekerjasama dalam kelompok nampak –kendati telah dilakukan— masih jauh dari cukup. Kurangnya pengembangan kemampuan kerjasama dan berkelompok ini kurang kondusif, bukan hanya untuk memanifestasikan konsep ke-umat-an, melainkan juga untuk mempersiapkan lulusan agar kelak mampu berdemokrasi dan mengembangkan *corporate*: dua hal yang penting untuk memasuki era demokratisasi dan untuk secara bersama-sama (dalam satu *corporate* sebagai bangsa, *Indonesia incorporated*, bukan dicerai-beraikan) dalam menghadapi globalisasi.

Seperti pada umumnya sekolah-sekolah Indonesia, ujian mata pelajaran di MAN-IC lebih banyak didesain untuk mengetahui kemampuan individu, kurang diseimbangkan dengan upaya untuk mengetahui dan mengembangkan kemampuan berkelompok. Padahal, ujian kelompok penting, bukan hanya untuk mengembangkan ketrampilan sosial siswa, melainkan juga sekaligus mendorong siswa secara berkelompok memperdalam penguasaan materi secara partisipatif dan emansipatorik (hal-hal yang penting untuk menetralisasi dampak dari orientasi Ujian Nasional yang cenderung mekanistik). Di samping itu, bekerja dalam kelompok juga penting untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, mentransfer informasi secara horisontal dan setara: suatu prasyarat yang penting untuk pengembangan kepemimpinan, komunitas, demokrasi dan korporasi.

Selain itu, pembelajaran dan evaluasi penguasaan materi, sikap dan prilaku siswa lebih dipercayakan kepada guru dan kurang mengikutsertakan pembelajaran dan penilaian dari siswa sejawat. Evaluasi yang *top-down* ini, terutama bila menyangkut sikap dan prilaku siswa, bukan hanya kurang lengkap atau akurat, mengingat guru kurang mengetahui prilaku siswa sehari-hari dibanding teman sejawat, melainkan juga

cenderung menimbulkan orientasi masing-masing siswa lebih “ke atas”, sehingga kurang berorientasi “ke samping” dan komunal: orientasi yang penting untuk pengembangan keterampilan sosial sebagai prasyarat pengembangan empati dan solidaritas, demokrasi serta kepemimpinan.

Evaluasi terhadap “kinerja (antar) kelompok” kurang ditekankan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Padahal, evaluasi terhadap kinerja antar kelompok siswa yang dilakukan oleh guru dan siswa kelompok lain dapat mendorong sikap akuntabel dan prilaku berkompetisi antar kelompok secara *fair*: suatu prasyarat penting untuk pengembangan sikap dan prilaku “siap dan *legowo* jika kalah” yang diperlukan dalam berdemokrasi. Dengan menerapkan model-model pembelajaran dan evaluasi seperti di atas, maka diharapkan pengembangan ranah afeksi dan psikomotor dapat dilakukan sekaligus dalam pengembangan ranah kognisinya.

Hal lain yang mendesak untuk diperbaiki adalah antara *academic school-culture* yang kuat tanpa diimbangi oleh penguatan *socio-environmental culture*. Penguatan *academic /school culture* pada dasarnya memberikan jembatan kepada para siswa yang berlatar belakang plural heterogen untuk bertemu dan terstandarisasi untuk distratifikasikan menurut tingkatan kemampuan akademiknya. Oleh karena itu, penguatan *academic /school culture* cenderung melunturkan latar belakang budayanya yang plural, sehingga *academic /school culture* yang meritokratik, yang memang penting untuk membentuk struktur sosial suatu bangsa, membentuk ke-Ika-an, di sisi lain juga mengakibatkan kondisi alienasi atau kehilangan identitas asli yaitu *socio-environmental culture* yang tumbuh berakar dari budayanya yang primer yang membangun ke-bhinneka-an. Untuk menjawab tantangan itu, kondisi di MAN-IC dan madrasah negeri pada umumnya, agaknya dipengaruhi oleh sejarah politik kebudayaannya. Pendidikan nasional sejak jaman Orde Baru, --berbeda dengan di masa Orde Lama,-- cenderung lebih menekankan *academic/school culture*, yang lebih menekankan pengajaran (*knowledge*) daripada pendidikan dalam artian yang sempit (yaitu *panggulowentah*: bahasa Jawa) yang berupa sosialisasi nilai-nilai budaya yang terhubung dengan *socio-environmental culture*. MAN-IC memang telah mencoba menyeimbangkan *academic/school culture* dengan *Islamic social-culture* melalui kegiatan di asrama, yang mencoba menghidupkan kembali semacam tradisi pondok pesantren untuk membangun karakter sosial budaya siswa yang Islami. Kendati demikian, belum jelas betul sosok *socio-environmental archetype* -nya. Jika di dalam Perguruan Taman Siswa

guru dengan aliran pemikirannya ditempatkan sebagai sentral dan mempunyai kedudukan tertinggi, di MAN-IC memang secara fisik masjid dijadikan sentral, namun secara sosial-budaya belum jelas betul bagaimana sosok sosial-budaya (Modernis-Islam?) yang dijadikan rujukannya. Kedua, akibat semangat Kebangkitan Islam yang memuat pesan tentang adanya “satu umat” (*globalized*) yang sedang bangkit dan mengajak anggotanya yang bermacam-macam untuk bergerak menyamakan sikap dan langkah, cenderung mengabaikan perbedaan, sehingga dapat berujung pada hilangnya kebhinekaan. Sementara itu kemana sosial-budaya “satu umat” itu akan dibawa, secara makro masih menjadi perdebatan antara aliran yang menganggap Islam *compatible* dengan demokrasi dan aliran yang menganggap Islam tidak *compatible* dengan demokrasi.

Dalam hal ini, Keputusan Menteri No E 101 Maret 2001 yang memberikan 7 kewenangan kepada Majelis Madrasah yang mewakili komunitas di masing-masing madrasah untuk menentukan muatan lokal, di samping perencanaan pembelajaran, pembiayaan, memilih kepala sekolah, merekrut guru, dan supervisi dan evaluasi pembelajaran, (Amirrachman, 2009:151) sesungguhnya mengarahkan madrasah berorientasi pada sosok sosial-budaya demokrasi yang bertolak dari akar rumput (*grass-root democracy*). Dengan itu model rekrutmen guru di samping perlu didasarkan pada keahlian, profesionalitas, juga perlu berdasarkan pada kompetensi social, antara lain pemahaman yang memadai tentang sosial budaya lokal. Tetapi dengan dicabutnya Kepmen tersebut dan digantikan dengan Kepmen 409/2003 yang kurang demokratis, maka peluang untuk itu menjadi sempit dan ketidak-seimbangan yang berupa penekanan pada *academic school culture* terus berlanjut.

Namun demikian, untuk berubah menuju keseimbangan itu ke depan MAN-IC nampaknya mendapatkan momentum. Yaitu, peluang untuk mendiversifikasi dirinya sekaligus menyatukan keanekaragaman *Islamic socio-environmental culture* di daerah-daerah melalui pembangunan MAN-IC yang ditawarkan kerjasamanya oleh beberapa Pemerintah Daerah. Momentum ini bukan hanya sebagai peluang untuk mengembangkan *Islamic socio-environmental culture* di daerah-daerah, melainkan juga, jika Majelis Madrasah kembali direhabilitasi sesuai Kepmen yang lama (tahun 2001), mengembangkan hubungan dengan kelompok lokal yang kuat melalui rencana kegiatan bersama, seperti yang ditemukan Pradhan dkk (2013:6-8) akan meningkatkan hasil pembelajaran. Dengan tantangan itu, MAN-IC diharapkan dapat juga berperan dalam pembentukan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika,

melengkapi peran yang dimainkan STPDN di Jatinangor Bandung, yang nampak masih lebih menekankan keikaan (sebagai penyiapan sdm birokrasi).

PENGEMBANGAN MAN-IC DI DAERAH-DAERAH

Kemungkinan MAN-IC “baru” dijadikan sebagai “model pendidikan berkualitas” akan terus bergulir ke berbagai daerah. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi secara masif tetapi kurang terarah, maka, di samping MAN-IC induk (terutama di Jakarta) memperbaharui diri dengan perbaikan atas masalah-masalah mendesak untuk menjawab tantangan strategis berupa modernisasi, globalisasi dan demokrasi—seperti telah disebutkan di atas, juga diperlukan schema yang dapat menghubungkan antara Kemenag (Dirjen Madrasah) dengan Pemda dan di lain pihak antara MAN-IC induk dengan MAN-IC yang dibangun di daerah-daerah.

Pengembangan MAN-IC “baru” di daerah-daerah sebagai kebijakan Kemenag menjawab permintaan daerah merupakan peluang untuk menjawab tantangan strategis. Seperti diutarakan Ohmae (2002:30), mempertahankan negara bangsa dari rongrongan globalisasi antara lain adalah dengan otonomi daerah yang membangun struktur berlapis dengan domain kewenangan Pusat dan Daerah yang tidak seragam. Implementasi desentralisasi madrasah untuk mencapai standar mutu nasional melalui penguatan Majelis Madrasah. Struktur berlapis ini diharapkan di satu pihak menyatukan dan di lain pihak memberikan ruang bagi penguatan partisipasi demokratisasi dan pengembangan identitas daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil pembelajaran dan relevansi pendidikan untuk pengembangan sosial-ekonomi dan budaya yang bhinneka. Untuk itu agar pengembangan/pembangunan MAN-IC “baru” di berbagai daerah dapat berperan seperti tersebut di atas, maka terdapat langkah-langkah yang diperlukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, antara lain:

Asal-usul kelahiran MAN-IC adalah untuk mencetak para siswa yang unggul dalam bidang sains dan teknologi, maka perlu ditegaskan kembali visi-misi tersebut kepada Daerah; dalam bentuknya yang riil jurusan IPS ditiadakan dan kelak para alumninya diarahkan untuk meneruskan ke jurusan tersebut di perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan negara atas SDM lulusan sains untuk modernisasi industri. Agaknya untuk itu diperlukan organ khusus di tingkat pusat (Kemenag, misalnya sub-direktoral Pendidikan Madrasah Unggul (dalam sains) yang tugas utamanya melakukan perencanaan, pengawasan, evaluasi seluruh

program yang berkaitan dengan MAN-IC seluruh Indonesia untuk membangun keikaan dengan standar karakter dan mutu keunggulannya. Sub-direktorat ini juga perlu memberikan definisi secara konkrit tentang kewenangan Kanwil dan Kandep terhadap (otonomi) MAN-IC sebagai madrasah unggulan. Ini diharapkan dapat mengurangi intervensi Kantor Wilayah Kemenag yang seringkali telah terlalu jauh yang dapat mengganggu proyek percontohan otonomi MAN-IC yang segera didirikan di berbagai daerah tersebut.

Komitmen anggaran daerah terhadap madrasah MAN-IC yang akan didirikan, bukan sekedar lahan, perlu disetujui terlebih dulu. Kendati Surat Edaran no.903/2429/SJ Tahun 2005 dari Direktorat Badan Keuangan Daerah Depdagri, yang melarang alokasi anggaran Pemda untuk madrasah, telah dicabut dan diganti tahun berikutnya dengan Surat Edaran nomor 903/210/BKAD agar madrasah masuk dalam alokasi anggaran daerah, namun seperti disebutkan dalam laporan USAID dan DBE3 (2007:19) diskriminasi anggaran terhadap madrasah masih tetap berlangsung. Oleh karena itu persetujuan anggaran non-diskriminasi terhadap madrasah dari Pemerintah Daerah perlu terlebih dulu diperoleh Kemenag.

Untuk jangka pendek, hubungan antara Pemerintah Pusat (Kemenag) dan Pemerintah Daerah (Pemda), lebih diarahkan pada upaya keseimbangan peran, namun Pusat sebaiknya tetap memiliki hak istimewa untuk menentukan cetak biru dan jaminan Otonomi MAN-IC di daerah, sedangkan Daerah lebih berfungsi sebagai pendukung. Dalam bentuknya yang riil, Pemerintah Pusat (Kemenag) bertanggung-jawab mengawal model Model MAN-IC yang ideal, pengadaan infrastruktur (gedung), gaji guru dan beasiswa, sedangkan Pemda selain bertanggungjawab atas pengadaan tanah, pemeliharaan dan rehab ringan infrastruktur, serta sangat dimungkinkan al.melalui peran Dinas Sosial dan BAZIS Daerah, Pemda membantu bea-siswa anak miskin berpotensi yang ada di wilayahnya.

Kemampuan finansial dunia usaha dan kelas menengah, yang karena berbagai alasan nampak sekarang lebih berminat memasukkan anak-anak mereka ke madrasah unggul, sangat potensial untuk dilibatkan secara internal dalam melaksanakan model MAN-IC “baru”. Oleh karena itu, maka relasinya dengan kelompok ini perlu dirumuskan kembali dalam sistem *governance* MAN-IC “baru” nanti. Caranya antara lain, seperti yang diharapkan seluruh stakeholders MAN-IC yang diteliti maupun temuan Amirrachman dkk (2009), MAN-IC di daerah perlu memberikan ruang partisipasi yang lebih luas, bukan hanya partisipasi finansial, bagi komunitas.

Terdapat tiga alasan untuk itu; pertama, di samping partisipasi komunitas terbukti meningkatkan hasil pembelajaran siswa, partisipasi komunitas juga meningkatkan pembelajaran demokrasi dalam penyelenggaraan (*governance* dan manajemen) pendidikan. Kedua, komunitas MAN-IC lebih siap untuk partisipasi (finansial dan politik) dibandingkan komunitas madrasah biasa. Komunitas walimurid MAN-IC umumnya berasal dari kelas menengah, lebih kuat modal sosial ekonomi dan politiknya untuk ketiga hal (finansial, hasil pembelajaran siswa dan sosialisasi demokrasi) tersebut, berbeda dengan MAN “biasa” yang pada umumnya berbasis sosial kelas bawah. Ketiga, guna mengurangi secara bertahap beban negara, perlu juga dipikirkan ulang tentang pembiayaan subsidi. Subsidi-silang sangat dimungkinkan, namun kriteria penerima bantuan perlu mempertimbangkan prinsip merit dan emansipasi kelompok sosial-ekonomi terencil/tertinggal. Kebijakan afirmatif ini dimaksudkan agar MAN-IC berperan ‘reproduksi kelas menengah’ secara elitis, melainkan menyiapkan munculnya kelas menengah berakar Bhinneka, karena juga memberi kesempatan mobilitas vertikal bagi mereka yang terbelakang, miskin tetapi berpotensi tinggi (UU Sisdiknas Bab IV Pasal 5, utamanya ayat (3) dan (12).

Agar MAN-IC terhindar dari eksklusifime, seperti hanya menerima pendaftar yang berlatar belakang pesantren seperti disuarakan akhir-akhir ini--maka prinsip *multi-entry*, yaitu tidak tertutup bagi lulusan SMP, SLB, perlu diterapkan. Namun agar lulusan MTS tidak tergusur dalam kompetisi masuk MAN-IC, maka dapat dilakukan kebijakan kuota yang proporsional (sebanding jumlah murid MTs terhadap SMP di daerah yang bersangkutan) tanpa mengorbankan standar mutu yang ditetapkan. Untuk menjamin kualitas kuota tersebut, maka ketertinggalan kemampuan lulusan MTs dibanding lulusan SMP, terutama dalam pelajaran IPA dan Matematik, perlu diperkecil, antara lain melalui *capacity building* oleh Pusat agar MTs unggulan di masing-masing daerah menjadi *pilot project* pembinaan terhadap MTs yang lain.

Model rekrutment guru secara terbuka melalui media secara nasional, seperti ketika guru generasi pertama MAN IC Serpong direkrut, perlu dihidupkan kembali dan dijadikan acuan utama untuk menjauhi perekrutan berskala lokal yang telah terbukti kurang mampu menjaring guru yang berkualitas, termasuk kompetensinya secara sosial. Jika perlu, setiap guru yang belum diangkat diwajibkan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk Pusat (Kemenag) dan melakukan magang yang evaluasinya menyertakan guru-guru senior MAN IC induk (di

Jakarta). Rekrutmen guru oleh daerah setempat dapat dilakukan, tetapi khusus untuk menjadi tenaga pengajar Kurikulum Lokal.

Guna memberikan otonomi kepada MAN-IC dalam menentukan kepala sekolahnya, pencalonan/pengusulannya diserahkan kepada guru-guru lokal yang diasumsikan lebih mengetahui kemampuannya, termasuk kemampuannya untuk membangun kolaborasi antara sekolah dengan komunitas. Kemampuan ini penting bagi kepala sekolah, karena dari temuan Amirrachman dkk (2009) terbukti dapat mengembangkan *governance* dan manajemen madrasah yang demokratis, transparan dan akuntabel secara lebih damai. Pengangkatan kepala madrasah—bukan berikut pemilihannya yang telah mengakibatkan matinya demokrasi madrasah, dapat terus dilakukan Kandep/ Kanwil. Pengembangan multikulturalisme di kalangan guru dan siswa sangat penting, maka penempatan guru dan siswa dengan sistem quota atau sirkuler ke MAN IC daerah lain perlu dipertimbangkan.

Pengembangan KTSP (kurikulum Terkait Satuan Pendidikan) Kurikulum Nasional maupun KTSP Kurikulum Lokal perlu melibatkan guru-guru pengampu bersama Universitas /daerah, agar KTSP tersebut terkait dengan orientasi pengembangan potensi daerah yang dipilih agar lebih relevan. Misalnya, di Riau potensi lokalnya adalah perkebunan dan perdagangan dengan (etnik China) Singapura, maka arah Mulok dapat berupa perkebunan dan Bahasa Mandarin untuk mengembangkan diri dalam menyambut globalisasi. Dalam tahun ini akan didirikan MAN-IC yang baru di tiga kabupaten, maka seluruh persiapan hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip di atas sebagai acuannya.

KESIMPULAN

Kehadiran MAN-IC yang lahir dari semangat untuk menjawab tantangan modernisasi merupakan kebijakan pengembangan kualitas SDM yang penting, karena penekanan dan keberhasilannya dalam pembelajaran sains menonjol di tengah pendidikan nasional yang umumnya tertinggal di bidang tersebut. Kendati demikian, sekarang MAN-IC sebagai suatu lembaga telah mengalami keusangan dan beresiko irrelevan jika tidak dibangun kembali sesuai tantangan-tantangan strategis baru yang muncul, yaitu terutama demokratisasi dan globalisasi. Secara garis besar, terdapat tiga masalah yang menimbulkan keusangan pada MAN-IC sehingga kurang relevan dengan tantangan tersebut, yaitu ketidakseimbangan pada *governance*, manajemen dan pada kurikulum/pembelajaran.

Peran pemerintah terlalu menonjol dalam *governance* dan manajemen MAN-IC, kurang memberikan ruang partisipasi kepada komunitas dan dunia usaha. Ini menimbulkan ketergantungan yang besar kepada Pemerintah. Manajemennya sangat sentralistik dan pertanggungjawabannya birokratis “ke atas dan kaku”, sehingga kurang fleksibilitas bagi pelaksana di madrasah untuk dapat merespon secara tepat dan cepat tantangan lokal yang khas dan mendesak. Di samping itu kurang transparan-akuntabel kepada stakeholders sehingga melemahkan kepedulian. Kondisi seperti ini kurang memanfaatkan partisipasi komunitas dan dunia usaha yang justru dapat berkontribusi pada sosialisasi demokrasi, peningkatan hasil dan relevansi pembelajaran.

Dalam hal kurikulum, terdapat kecenderungan MAN-IC mengembangkan jurusan IPS padahal prioritas pada pengembangan SDM berlatar belakang sains penting sebagai khittahnya untuk kelanjutan modernisasi. Di samping itu, kurikulum keagama-annya seharusnya, tetapi kurang-- memberikan ruang bagi pengembangan rasa (afeksi) dan kegiatan (psikomotorik) yang mendorong kemampuan bekerjasama, multikultural dan toleran. Cara pembelajaran dan penilaiannya juga bersifat *top-down* dan menekankan secara berlebihan kompetisi siswa, kurang memberikan ruang dialogis, kerjasama dan kesetaraan (ke samping yaitu sesama individu / kelompok lain). Kondisi di atas, bukan hanya kurang relevan dengan tantangan demokratisasi, melainkan juga menimbulkan kerentanan pada siswa dari pengaruh paham global Islamis yang otokratik dan intoleran/radikal, di samping dapat menimbulkan semangat persaingan antar sesama secara berlebihan yang dapat membahayakan “semangat Indonesia-incorporated” sebagai bangsa dalam menghadapi globalisasi. Penyeimbangan yang dilakukan terhadap kondisi-kondisi di atas dapat berperan penting, apalagi jika model MAN-IC yang baru nanti dijalankan di seluruh madrasah di Indonesia, guna menyiapkan baik civitas madrasah maupun masyarakat pendukungnya dalam menghadapi tantangan modernisasi, demokratisasi dan globalisasi.

Momentum untuk melakukan penyeimbangan terhadap *governance*, manajemen dan kurikulum/ pembelajaran di atas pun telah tiba. Antara lain, Undang-undang Sisdiknas memberikan hak partisipasi bagi masyarakat termasuk dunia usaha melalui Majelis Madrasah dan Manajemen Berbasis Madrasah. Undang-undang Guru juga mengamatkan perlunya kompetensi sosial (kepala sekolah/madrasah), dan cara pembelajaran yang demokratis yang menghargai hak-hak azasi siswa (termasuk hak-hak Ekosobnya). Di samping itu pendidikan karakter melalui integrasi 17 nilai ke

dalam berbagai mata pelajaran seperti yang didorong pemerintahan sekarang, juga membuka ruang lebih luas untuk pengembangan afeksi dan psikomotorik untuk menyiapkan generasi guna menghadapi modernisasi, demokratisasi dan globalisasi. Di samping itu, terdapat antusiasme para guru dan (calon) wali murid MAN-IC (umumnya dari kelas menengah) terhadap demokratisasi (Majelis Madrasah) serta aliran CSR dari dunia usaha ke madrasah, maupun adanya semangat MAN-IC dalam bekerjasama dengan *sister school*-nya di luar negeri (sekolah Katolik di Sydney). Kondisi di atas memberikan gambaran momentum bagi penyeimbangan yang diperlukan, agar MAN-IC lebih berperan dalam menyiapkan SDM yang lebih berkualitas sesuai dengan tantangan jaman. Hambatan untuk melangkah ke arah itu terletak terutama pada resistensi oknum birokrasi di Kanwil dan Kandep Kemenag, yang telah memperoleh keuntungan dari leverage politik dan ekonomi yang terbuka dari Kepmen 409/2003 yang mengurangi partisipasi dan *check & balances* dari pihak komunitas dan civitas kampus pada *governance* dan manajemen madrasah. Kepmen di atas dianggap oleh para birokrat Kemenag waktu itu cocok untuk madrasah yang umumnya memang miskin sumberdaya. Sebaliknya bagi civitas MAN-IC, Kepmen ini telah melemahkan kekuatan *governance* dan manajemen yang telah terakumulasi dari pengalamannya bermitra dengan komunitas pendukung madrasah, menjauhkan lembaga dari sumberdaya potensial di luar negara, serta tidak memberikan ruang untuk berinovasi guna meningkatkan hasil pembelajaran maupun untuk menanggapi tantangan jaman yang berkembang.

Sesungguhnya Kepmen yang bersifat re-sentralisasi ini merupakan “langkah mundur” dan menjauh dari *grass root democracy* dan melemahkan identitas lokal yang penting untuk mempertahankan negara bangsa dari efek negatif globalisasi. Di samping itu juga kurang kondusif untuk mengembangkan madrasah model yang mempunyai potensi sumberdaya (kelas menengah dan berpendidikan) yang besar seperti MAN-IC sekarang. Oleh karena itu, di tengah penerimaan yang luas dari pihak MAN-IC, perwakilan berbagai “madrasah maju” dari daerah serta pemikir di Direktorat Madrasah terhadap konsep model MAN-IC “baru” yang ditawarkan ini, maka yang diperlukan sekarang adalah *political will* dari birokrat Kemenag. Yaitu untuk antara lain menghidupkan kembali (semangat) Kepmen 101/2001 yang telah dicabut itu, melakukan kajian lebih mendalam menyangkut konsep model MAN-IC “baru” dan schema kerjasama antara Kemenag dan Daerah yang ditawarkan tersebut berikut tahapan replikasinya ke madrasah di daerah lain.

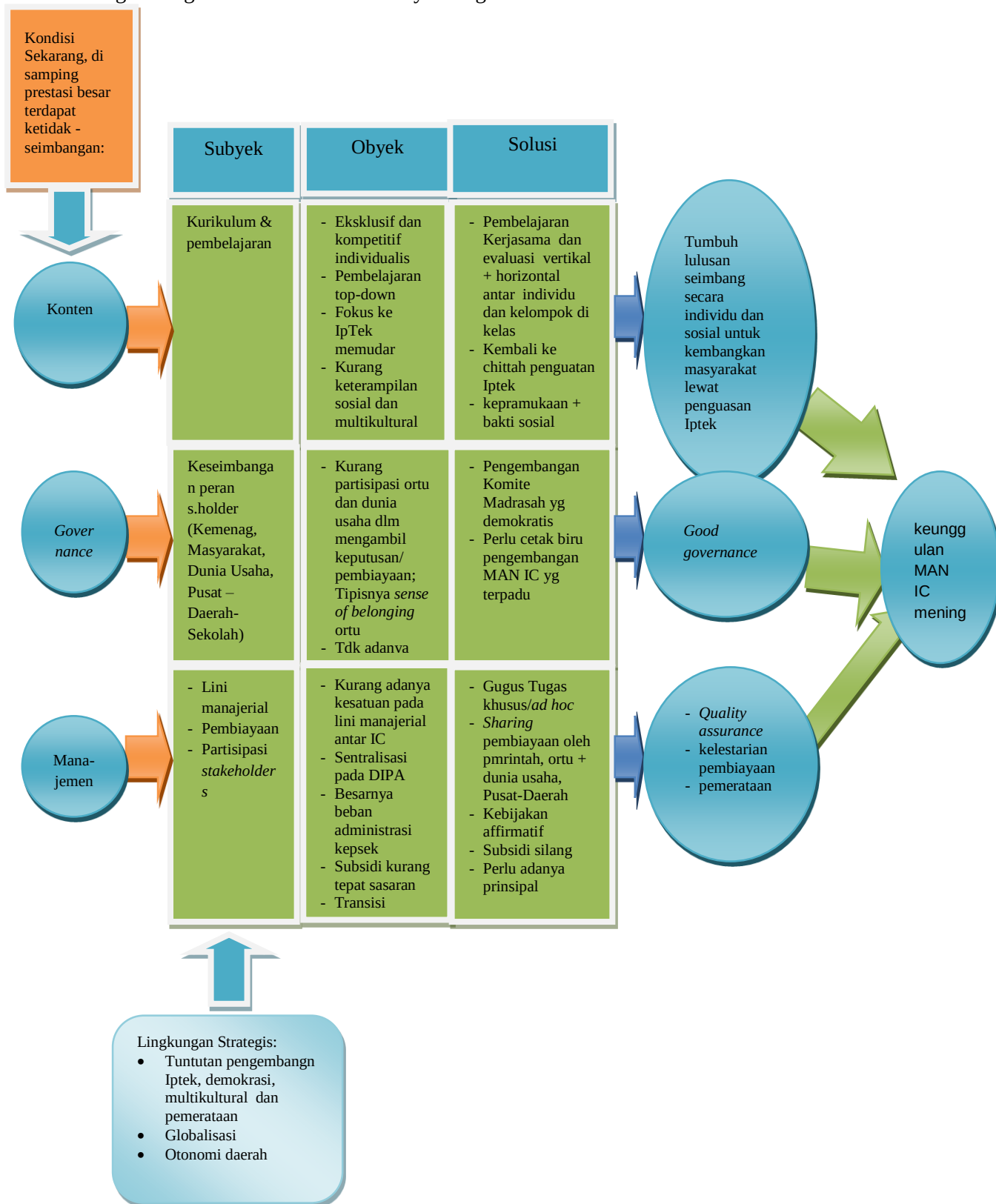
DAFTAR PUSTAKA

- Amirrachman, Alpha, Saefudin Syafi'i, dan Anthony Welch. 2009. Decentralising Indonesian Education: The Promise and the Price dalam J. Zajda and D.T. Gamage (eds.), “Decentralisation, School-Based Management, and Quality”, *Globalisation, Comparative Education and Policy Research* 8, hlm.141-157.
- Aronowitz, Stanley dan Henry A .Giroux. 1990. *Post-Modern Education: Politics, Culture dan Social Criticism*. Oxford: University of Minnessota Press.
- Becker, Harry S. 1975. *Investment in Human Capital: with special reference on education*. California: University of Berkeley.
- Bourdieu, Pierre. 1986. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, trans. Richard Nice. London: Routledge and Kegan Paul.
- Bourdieu, Pierre dan Jean-Claude Passeron. 1977. *Reproduction in Education, Society and Culture*. Los Angeles: Sage Publication.
- Brugmans, I.J. 1987. “Politik Pengajaran,” dalam *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, H. Baudet dan I.J. Brugmans (eds.) Jakarta: Yayasan Obor.
- Bush, Robin. 2003. Akar Kultural “Civil society” NU, dalam Burhanuddin (ed.), *Mencari Akar Kultural Civil society di Indonesia*. T.t. INCIS-CSSP-USAID, 2003:28-36.
- Fukuyama, Francis. 2007. Identity and Migration. *Prospect Magazine Issue 131, 25th February 2007*.
- Furnivall, J.S. 1943. *Educational Progress in South East Asia*, New York: Institute of Pacific Relations.
- Giroux, Henry A. 1981. *Ideology, Culture and the Process of Schooling*. Washington DC: Falmer Press.
- Gouldner, Alvin W. 1979. *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class*. London: The Macmillan Co.
- Habermas, Jurgen. 1991. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: The MIT Press.
- Inkeles, A. and D.H. Smith. 1974. *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Jackson, Robert. 2011. Cameron, 'multiculturalism' and education about religions and beliefs <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wie/research/wreru/>
- Jacques, Martin. 2010. *When China Rules the World*. New York: The New York Syndicates.
- Jowett S, Baginsky M. 1988. Parents and education: a survey of their involvement and a discussion of some issues. *Educ Res* 30(1):hlm. 36–44
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship*. New York: Oxford University Press.Inc.

- Martin, David. 1978. A general Theory of Secularization. Agincourt: The Book Society of Canada.
- Ma'ruf, Jamhari "Komunalisme atau "Civil Society"? dalam Burhanuddin (ed.), *Mencari Akar Kultural Civil society di Indonesia*. T.t. INCIS-CSSP-USAID, 2003, hal.25-28.
- Noor, Farish A. Yoginder Sikand and Martin van Bruinessen. 2007. Introduction: Behind the Walls: Re-Appraising the Role and Importance of Madrasahs in the World Today, dalam *The Madrasa in Asia*. Farish A. Noor, Yoginder Sikand dan Martin van Bruinessen (Eds). Amsterdam: Amsterdam University press, hlm. 9-30.
- Ohmae, Kenichi. 2002. *Memudarnya Negara-Bangsa*. Jakarta: Qalam
- Pradhan, Menno.□Daniel Suryadarma,□Amanda Beatty,□Maisy Wong, Armida Alisjahbana, Arya Gaduh, Rima Prama Artha. 2013. Improving Educational Quality Through Enhancing Community Participation:results from a randomized field experiment in Indonesia, The World Bank.
- Sujatmiko, Iwan Gardono. 2003. Wacana *Civil society* di Indonesia, dalam Burhanuddin (ed.), *Mencari Akar Kultural Civil society di Indonesia*. T.t.INCIS-CSSP-USAID, hlm.40-56.
- Suparno, Paul. 2000. Kurikulum SMU yang Menunjang Pendidikan Demokrasi, dalam Sindhunata (ed.) *Membuka Masa Depan Anak-anak Kita: Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius, hlm.50-67.
- Suyanto. 2013. Negara Adikuasa Pendidikan. *Kompas* Kamis, 10 Januari 2013, hlm. 7.
- Terry Mart. 2012. Menuju Pendangkalan Nalar. *Kompas*, Kamis 27 Desember 2012, hlm. 6.
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesiatera.
- Tsuchiya, Kenji. 1987. *Democracy and leadership: The Rise of The Taman Siswa Movement in Indonesia*.Transl. Peter Hawkes. Honolulu: University of Hawaii Press.
- USAID & DBE3, 2007. Analysis of the Current Situation of Islamic Formal Junior Secondary Education in Indonesia. ddp-ext.worldbank.org/Edstats/IDNdprep07.pdf.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

LAMPIRAN.

Pola Pikir Mengembangkan Model Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia



SUPPORTING URBAN POOR FACING CLIMATE CHANGE: CREATING EFFECTIVE ADAPTATION MESSAGES¹

(MENDUKUNG MASYARAKAT MISKIN KOTA MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM: MENYUSUN PESAN ADAPTASI YANG EFEKTIF)

Syarifah Aini Dalimunthe

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
syarifah.dalimunthe@gmail.com

Abstrak

Pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi sipil masyarakat di Indonesia sudah mengkomunikasikan perubahan iklim kepada khalayak luas. Contoh komunikasi yang ada adalah aktivitas 'hijau' seperti bike to work, car-free days, dan bangunan yang berkonsep efisien energi. Namun demikian pertanyaan sederhana yang muncul: apakah tipe komunikasi seperti ini mampu memberi manfaat kepada kelompok yang paling rentan? Tulisan ini memberikan gambaran kebutuhan informasi dari masyarakat miskin kota ketika menghadapi perubahan iklim, terutama media apa yang dipercaya oleh masyarakat miskin perkotaan, pilihan sumber informasi dan bagaimana mereka ingin informasi tersebut disajikan. Sebagai contoh, tulisan ini memberikan model pengemasan pesan adaptasi terhadap perempuan miskin perkotaan. Perempuan miskin perkotaan ternyata masuk dalam kategori struggling (41%), mengalami dampak perubahan iklim namun tidak memiliki sumberdaya dan dukungan untuk melakukan aksi adaptasi. Dengan memahami kebutuhan informasi dan model pengemasan informasi, akan mendukung efektivitas pesan adaptasi perubahan iklim. Data dari riset ini dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam, focus group discussion, dan survei terhadap 928 masyarakat miskin kota di Indonesia.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Perkotaan, Adaptasi, Media, Komunikasi

Abstract

Government, international agencies, civic society, and media organizations in Indonesia have communicated climate change to people. The examples are communication campaigns focusing on "green" activities, such as bike to work, car-free days, and energy-efficient buildings. One simple question arises in the practice: could these types of communication reach and provide benefits for the most vulnerable group? This paper offers an overview of urban poor audience needs of information, particularly on what media they use, who they talk to and trust, and how they would like information delivered to them. As an exercise in crafting messages, women in urban poor will be put as the priority audience. This group falls into the struggling segment (41%). They are experiencing the most impact and cannot take much action. The struggling is willing to make changes, but lack of information and support prevents them from taking action. By understanding this sort of information, it will support delivering effective climate change adaptation messages. The methods included in this research are in-depth interviews, focus group discussion, and survey to 928 urban poor in Indonesia.

Keywords: Adaptation, Climate Change, Communications, Media

INTRODUCTION

The expected consequences of climate change are varied. Consequences that mostly recognized are

extreme weather events, such as heat waves, drought, flooding, slow rise in sea level, melting glaciers, and polar icecaps require adaptation measures in many sectors of society (International Panel on Climate

¹ Paper has been presented in Seminar Ilmiah Kependudukan,- Kependudukan Untuk Pembangunan Pasca 2015 at 26 November 2014. This paper used data and framework of the Climate Asia report. Climate Asia's Indonesia report was compiled and written by Tan Copsey, Syarifah Dalimunthe, Leonie Hoijsink, and Naomi Stoll. For more information and data usage do visit Climate Asia data portal: www.bbc.co.uk/climateasia

Change, 2007). It is crucial to ensure that the adaptation measures themselves are sustainable so as not to be part of the problem they are supposed to solve. Since adaptation to global climate change aims at reducing vulnerability and strengthening resilience, a goal-oriented adaptation communication becomes urgent (Stern, 2007). Therefore, issue of climate change that is communicated to target audience is extremely important. On the other hand, information and communications about the causes and impact of climate change, as well as adaptation and mitigation action, have been generated largely from western science. This information must resonate with local ways in understanding the world if communities are to 'own' the adaptation process (Ford, Knight, & Pearce, 2013).

Communication approaches need to empower and encourage communities to draw upon their existing adaptive capabilities. This paper takes out some findings from Climate Asia's most interesting information on crafting messages to urban poor audience, which faces changes in climate, in order to make them taking action. Climate Asia is the world's largest study of people's everyday experience of climate change in seven Asian countries—Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, and Vietnam. The project surveyed 33,500 people across the seven countries, including 4,985 households in Indonesia. The questions behind this study are: how do people in Indonesia live with climate change now? How will its impacts shape their future, and how will they, in turn, shape their environment? What are the most effective ways to support people to adapt to climate change, and how best the media, governments, organizations can and businesses communicate with urban poor in Indonesia?

Climate Change And Urban Poor Vulnerability

Urban poor are particularly vulnerable to climate change (Huq & Ayers, 2007). They are living on the edge physically, economically, and politically in coastal cities, on riverbanks, in hazard-prone areas, without rights to their land, with little savings, without identity, or a right to their cities. They represent the communities that will be hit hardest by climate change, placing them on the front lines of the scramble to adapt and mitigate its impacts. The debate over climate change indicates that extreme events will remain a serious threat to urban areas. In addition to the place where urban poor located, concentrations of people and economic assets further contribute to the high vulnerability of urban poor to disaster (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),

2001). The vulnerability of the poor springs from informal settlements, where they live in. Transience, or at least the anticipation of transience, is imbedded in the informal settlements. The vulnerability of slum dwellers to disaster risk is obvious. The slums usually develop in locations that are highly exposed to hazard risk. Urban poor resided in a slum is often unable to invest standard housing or to build-up financial reserves (Adger, 2003) (Bankoff, 2003).

In general people see climate change affects all people within a community, however women often have bear the impact in places where climate change being felt. This is the consequences of woman leading role in their families and communities. In the poorest part of urban, women had to work harder and longer. During the emergencies women also play as care providers and caregivers in their families. By recognizing the situation they are facing and tailored information they need we can achieve adap faster and enhance the impact of our actions.

Climate Change In The Media

Although global climate change awareness continues to rise, in most nations' news, coverage of climate change is miniscule compared with that of crime, politics, celebrities, the economy, or sports. Rating is the top priority of media maker and covering climate change adaptation and mitigation perceived contribute less to company benefits. The news media often frame climate change adaptation and mitigation as a dynamic and contested issue within intersecting realms of policy, science, and the public. Although science has confirmed that human activities are heavily implicated in climate change, the global phenomenon has been increasingly framed as catastrophic as though it must be considered dreaded and irreversible to warrant public attention. Social scares that accelerate political demands can spark broad social change (Shanahan, 2007).

In Indonesia national newspapers such as Kompas, The Jakarta Post, and The Jakarta Globe regularly publish articles on climate change. This media largely read by upper- middle class society with low number of reader of urban poor; particularly the women. The Government of Indonesia, through DNPI, BMKG, and its ministry, is also starting to provide climate change related communication more widely, with a particular focus on information about extreme weather events. During the focus group, members had trouble making sense of information about climate change. A number of experts and opinion-formers identified barriers to widen the understanding of the issue,

including the use of jargon, scientific language, and information that was not relevant to people's daily lives.

“Media in Indonesia is dominated by television. More than 90% of the population watches television. Most of the TV programme is based on trend issues which mostly related to political and economic issues. Environmental issues (such as forest fire, climate issue, and farmers' problems) are still considered as non-trend topics. It is not a sexy issue in the eyes of the 'rating'. A climate change issue sometimes appears in the news programme.” **Media expert, Jakarta**

Understanding people's perceptions is crucial in order to craft communication that motivates people to take action to improve their lives. It is crucial to understand their perception of changes in climate, how these changes affect their lives and what they are doing to respond to them. Perceptions are shaped by a range of factors including exposure to media, communication with peers, personal beliefs and values, and education levels.

This research had used a mixed method approach, including qualitative and quantitative methods, to understand people's perceptions of changes in climate and the environment as well as the impacts of these changes in their lives. The findings would inform adequate communication to support people's needs in responding to these changes. Survey methods were used in this research. A total of 107 sub districts were chosen across Indonesia. Within each sub-district, up to 50 households were randomly selected following the right-hand rule of field movement and five households were skipped after every successful interview.

Qualitative research included in-depth interviews with experts and opinion formers, audience focus groups across cities in Indonesia. Added by community assessments activity in Jakarta and Surakarta. The in-depth interviews were conducted with key experts and opinion-formers from national and local government, the media, the private sector, civil society, science, and academia. Focus group participants were members of the public. At each location, focus group participants were selected according to age, gender,

occupation, and social class to capture a diversity of views within the population. Initial insights from some of this research and the communication development process, which included workshops and an evaluation of existing initiatives, shaped the approach to quantitative research. Referring to Maxwell (2006) the analysis of qualitative research notes begins in the field, at the time of observation, interviewing, or both, as the researcher identifies problems and concepts that appear likely to help in understanding the situation. Researcher required to write frequent notes in according to identify important statement and propose way of coding data. Within this stage researcher was listing the concepts reflected in the notes and diagramming the relationships among concepts. Following the analysis, computer-assisted qualitative data analysis – Atlas.ti was employed.

This paper used 928 respondents that were observed as urban poor out of 4,985 Indonesia's general respondents, which were surveyed by Climate Asia. The 928 respondents categorized as urban poor based on their place of living (city) and their daily income (less than 2 USD). People followed a stratified random sampling approach. First, the country's population was separated by province. In each province, regencies were randomly chosen. Within each regencies, a number of sub-districts were chosen from urban and rural areas following the probability proportionate to size (PPS) method.

Table 1. Sample Distribution

Research area	Province	Number of respondent
Northern Sumatera	North Sumatera	86
	West Sumatera	68
	NAD	32
Southern Sumatera	Riau	49
	South Sumatera	29
	Lampung	31
Western Java	West Java	73
	DKI Jakarta	146
	Central Java*	64
	Banten	36
Eastern Java	East Java	32
	Central Java*	21
Eastern Island	Bali	41
	East Nusa Tenggara	29
	West Nusa Tenggara	26
Kalimantan	West Kalimantan	43
	East Kalimantan	38
Sulawesi	South Sulawesi	25
	South East Sulawesi	25
	West Sulawesi	34
Total respondent		928

A total of 107 sub districts were chosen across Indonesia. Within each sub-district, households were randomly selected following the right-hand rule of field movement and five households were skipped after every successful interview. Composition of research areas and number of respondent as follows:

THE STATE OF URBAN POOR

Patterns of development across Indonesia have created a transformational change. Many people experience the steady economic growth. The percentage of the population living in poverty has decreased from 18% in 2006 to 12% in 2012 (UN

Data, 2013). A broad number of population described that infrastructure has improved and access to education is getting better. However, the big city such as Jakarta, Surabaya and Medan still remained as the main attraction to earn a living. This created slums and a growing number of urban poor. The urban poor were likely to say that life had not improved (58%), compared to the comfortable (42%) and well-off group (45%). The basics of life, particularly the availability of food (27%), health (21%), and money to buy essential items (13%) are self-concerned (Figure 1). They felt the food price was impossibly expensive and 79% had mentioned inflation was making their lives harder.

Urban poor worry on not having enough food and their health

Q: What is your biggest worry?

Base :928

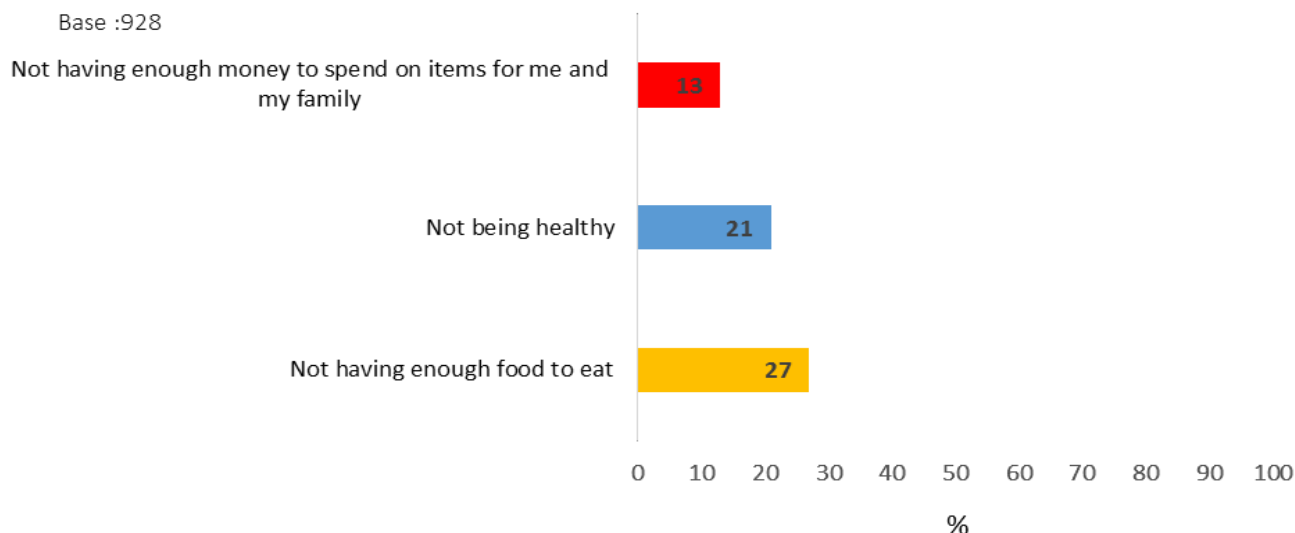


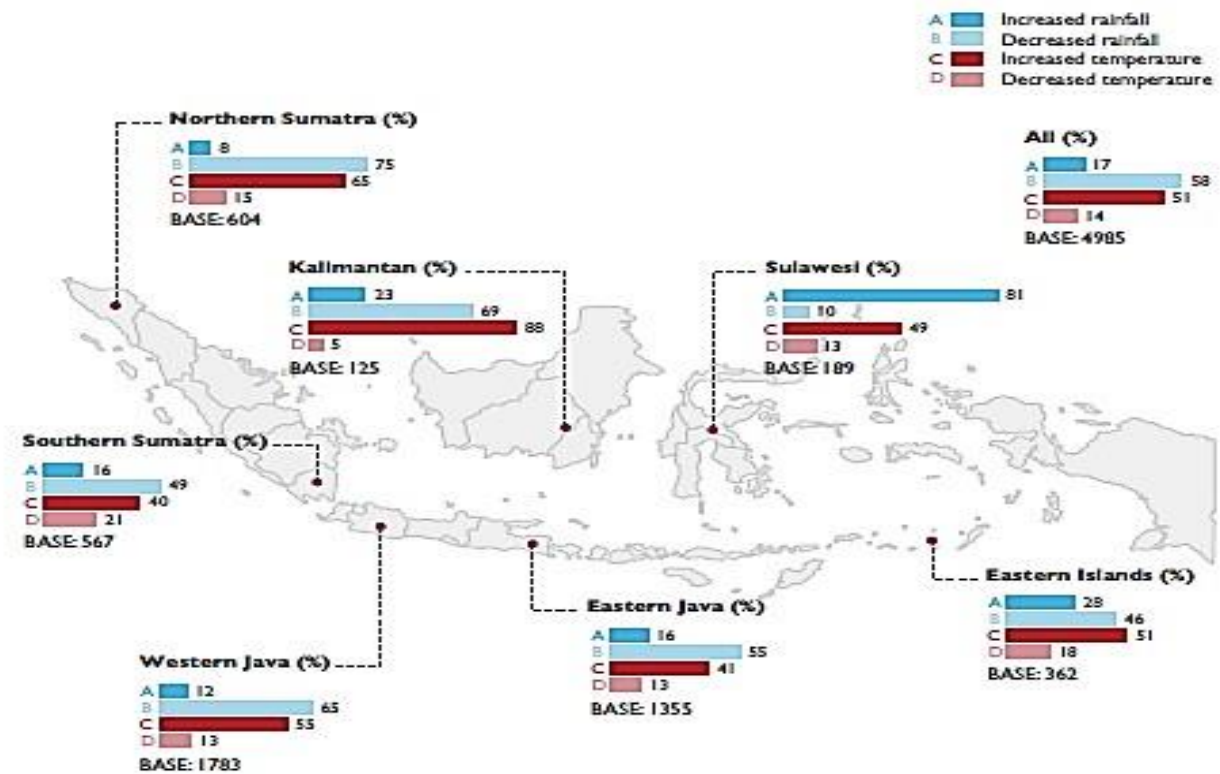
Figure 1. Urban poor biggest worry

Findings emphasized the importance of religion in people's lives (53%) and involvement in their community is one of their values (27%). Although living far from their hometown, urban poor was likely to join in communal activities, and religious leaders played an important role in communities. People were likely to have the current information and learn new things (12%). In the other hand, practicing traditional value was diminishing (4.2%).

CHANGES IN RESOURCES, ENVIRONMENT AND CLIMATE THAT URBAN POOR PERCEIVE

The Intergovernmental Panel on Climate Change suggested that the region has experienced an increase

of 0.1–0.3°C per decade between 1951 and 2000 and has projected a temperature rise of 2.5°C by 2100 for South East Asia. A recent report by the World Bank noted that Indonesia is projected to see an increase in temperature extremes and that Jakarta is projected to become 5–15% drier by 2080 between June and August. Precipitation patterns have been observed to change over Indonesia. Broadly speaking there has been a decline in annual rainfall in the south and an increase in the north, although there have been local variations within this trend. Across the country, people had perceived changes in climate over the last 10 years. Perceptions of change were varied by region across this large and geographically diverse country (Figure 2).



Q: Over the last 10 years, do you think the following have increased, stayed the same or decreased?

Figure 2. Perceptions of change in climate

To the urban poor, the emerging broad trends were increasing temperature (45%), declining annual rainfall (57%), unpredictable season for the last 10 years (55%), increasing extreme weather events (34%). The lack of predictability affected preparedness among the urban poor. For example a woman in urban Riau described how human activities, such as deforestation, were impacting her neighborhood. She noticed floods are more frequent and her house that is situated on the riverbank is frequently inundated by water from Kampar River. She never saw it when she was a child. What she knows now, the number of vegetation that prevents the flood is declining. Her counterpart from Jakarta saw the development that pushing the urban poor to occupy green space and create an increase in temperature as causes of climate change.

People living in the urban slum area felt that they had experienced a decline in water availability. Over a quarter of them mentioned water availability decreased a lot. Despite infrastructure growth in the city, many people's personal experience did not match the growth in larger scale. A community assessment head of the community said the price of water is too expensive and their local water source will not able to serve the community. Another insight from the

"In the past people slept under a blanket, now they use fans and the people that can afford AC use AC. In the past people would wear hats, now they prefer wearing cloth so there's a little bit of a breeze."

(Woman, Riau, Urban, age 35–44)

ground, a man in Jakarta said he will take a bath and do his laundry at the same time to cope with the decreasing amount of water.

Large changes in the environment had been mentioned. The overall decreasing number of tree and vegetation in their neighborhood was a serious concern (70% of people said the number of vegetation had decreased), as the number of pest including insects that carried disease had increased (31%).

IMPACT AND RESPONSES

People felt changes in climate, for instance the increased temperatures and extreme weather, and the availability of key resources, for instance availability of water was having an impact on their lives. During the survey, people found it difficult to distinguish between impacts associated with the availability of key resources food, water, energy from those

associated with changes in climate. Over a fifth (23%) of urban poor felt that they were experiencing a high level of impact now from changes in climate and availability of key resource, such as water. This figure is likely to double in the future (Figure 3). They seemed concerned about the situation in 10–20 years from now. Their concern was likely linked to the

exposure of communication about climate change, which they perceived as a threatening information and emphasizing the dangerous changes that may affect people’s lives in the future. As a highlight, urban poor were unsure about how to deal with changing in climate impact to their health.

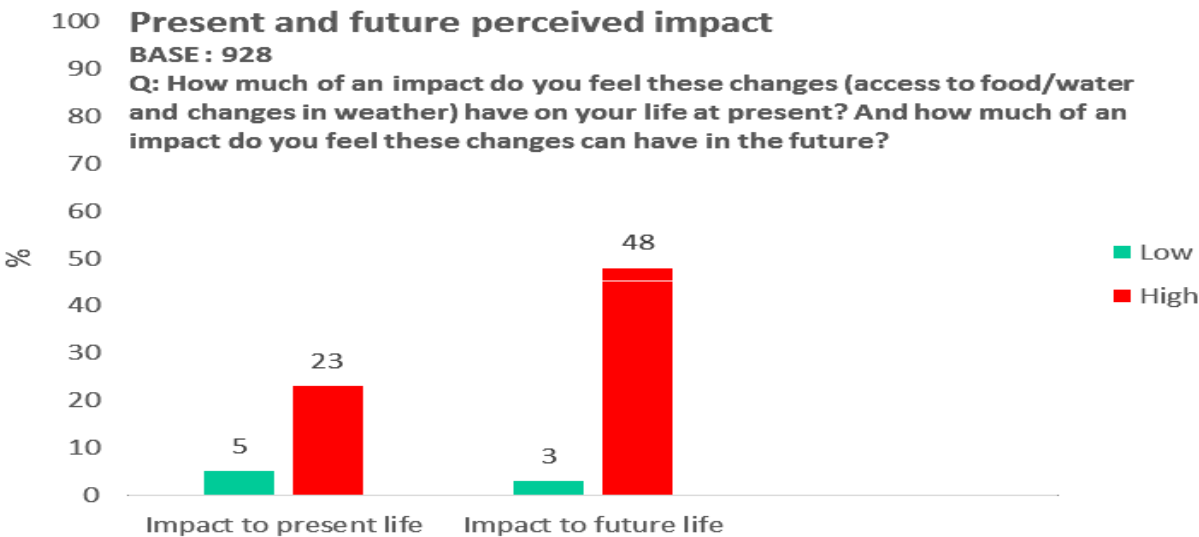


Figure 2. Present and future perceived impact

63% people felt that the changes they were experiencing were having an impact on their ability to earn money. Urban poor was less likely to have a steady job and they had to supplement their income through other work. Many people described making changes to their livelihood out of necessity. However, changes in climate were not the main reason for these changes. Instead, they provided additional stress, which coupled with pressures on less predictable weather and more extreme weather occurrence, which

made people’s lives harder. Some changes provided new opportunities. For example, in Jakarta, a longer rainy season meant an extended period of work for those who provided an “umbrella service” (*ojek payung*). Almost three quarters of people (74%) felt that the changes were affecting their current lifestyle. A campaign to adapting to changes in resources, such as electricity and water as the impact of climate change force them to take action, such as changing diet and using electricity more efficiently (Table 2).

Table 2. Urban poor current response to specific change in lifestyle

Current response to specific change in lifestyle	%
Changing diet	20
Using electricity more efficiently (e.g. Using energy saving light bulbs or turn)	18
Recycling water re-using waste water	15
Storing saving water (e.g. collecting rainwater)	12
Using less alternative fuel for cooking (e.g. biogas)	8
Finding a new water supply (e.g. digging wells, installing hand pumps, tube well	6
BASE :928	

Feeling Under-Prepared Facing Extreme Weather Event

When noting the impacts of extreme weather, the financial cost of floods and storms were often mentioned. Damaged houses had to be repaired, and furniture that had been ruined had to be replaced. Sometimes, wages were also affected, as people were unable to get into work as a result of the flooding.

Almost half of the people felt at risk (48%), but only 31% felt prepared. Knowledge of how to respond to

such events was very low, and relatively few people were taking the simple steps necessary to prepare for extreme weather (Figure 4). The impact of extreme weather was both mitigated and exacerbated by infrastructural development and improvement. However, the urban poor suffered the negative impact by the development. People in the Marunda slum in the city were particularly afraid because a large drainage channel had been built next to their homes. This channel, while having a positive impact for many other people in Jakarta, had spilled over during heavy rain and flooded the area.

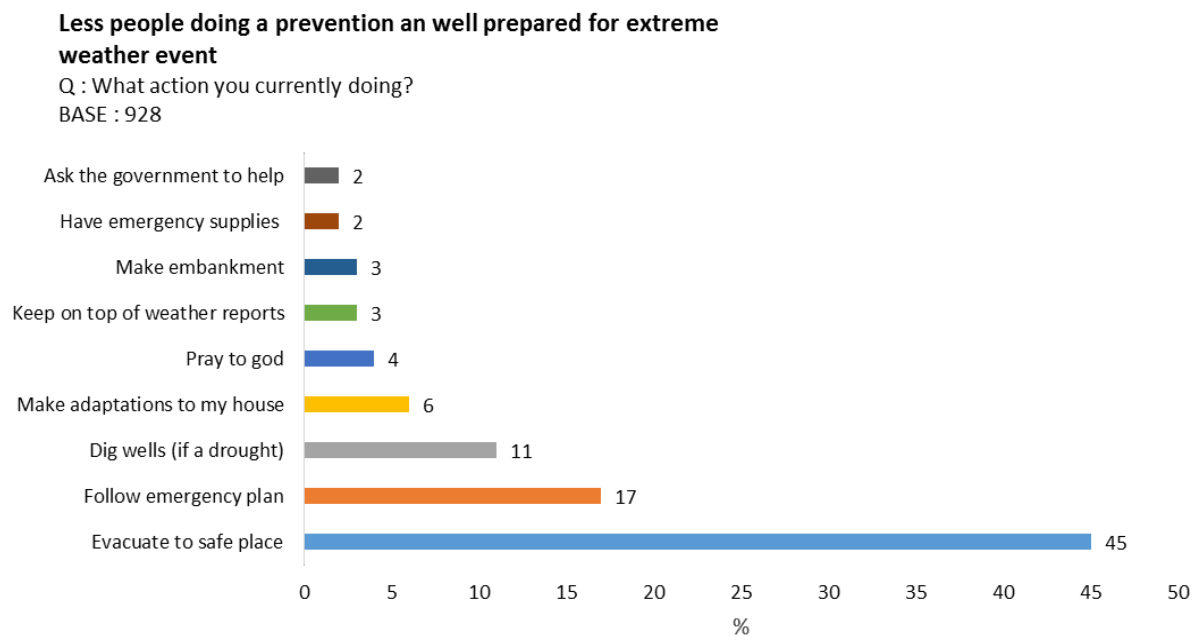


Figure 3. Less people doing a prevention and well prepared for extreme weather event

Enablers And Barriers To Action: Health And Children Future Are The Key

To enable crafting effective messages, it is important to identify key factors that enable or prevent action in response to changes in climate and availability of key resources. Understanding people's stated barriers and motivations and of factors that are associated with higher rates of response needed to be analyzed.

Health (83% strongly agreed) was not only a major concern; it was also a strong motivation for taking

action. Actions that had tangible health benefits, for instance reducing the number of mosquitoes in the area by maintaining a cleaner neighborhood or cleaning the river, were popular. Peer pressure also motivated people to take action. People would feel guilty if they were not involving themselves in taking care of their environment (74% strongly agreed). A desire to provide a better future for their children (74% strongly agreed) would significantly motivate women for taking action.

Motivators

Q: For each statement I read out, please say whether you agree or disagree with it as a reason for why you would respond.
BASE :928

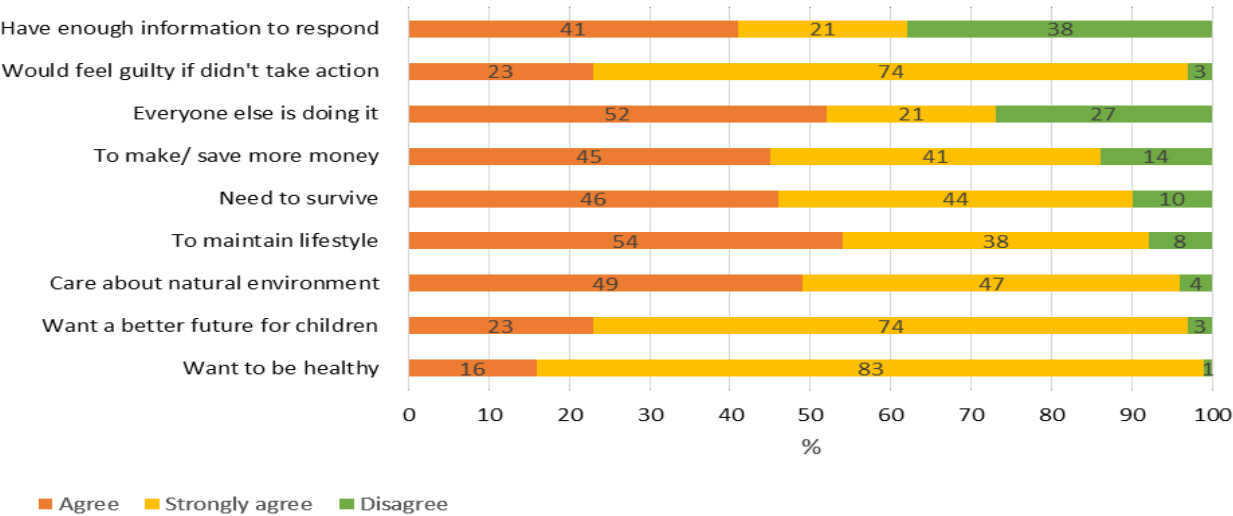


Figure 4. Motivation to take action

A lack of government support was seen to be the largest barrier to respond to changes in climate and availability of resources. Urban poor surveyed felt that the government regularly listened to their needs (49% agreed). However, people surveyed had higher confidence in their local neighborhood and agree working together as a community would solve their problem (82% agreed).

Not knowing how to respond, not having access to information, and not considering that these issues

present a problem now were also barriers to action for a third of the population. Lacking the resources to respond was a barrier cited by a large majority of people. Some people saw taking action as expensive and unachievable. They felt they did not have enough resources to respond (46%). More importantly, the need of government support was highly mentioned by the urban poor as their barrier. People see their community likely needed a guidance from government to support them taking action.

Barriers to response

Q : For each statement I read out, please say whether you agree or disagree with it as a reason for why you would not respond.
BASE:929

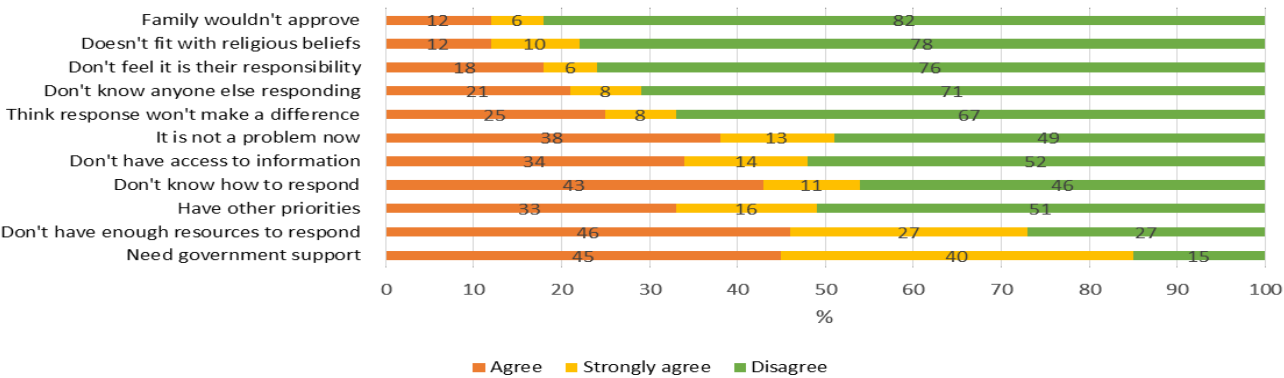


Figure 5. Barriers to response

COMMUNICATION TO ENABLE ACTION NOW AND IN THE FUTURE

Communication landscape

Almost 73% of urban poor reported lack of information about climate change impacts. The most vulnerable group was the most prone to the impact of climate change and having the least of the knowledge. This was the opposite where 57% people in the city (1m+) having the most information related to climate change. All the major information on climate changes currently were received through the TV programme (83%), followed by TV ads (10%), community meetings (10%) and through the radio programme (2%). They also likely received information from the religious institutions (48%). FGD participants mentioned that they first heard about the climate change through the TV news programme. And after that, more often they heard the information from the extension volunteers through *sosialisasi* program. Respondents described that climate change information from TV news was about whether the rotation of rainy and dry season was getting harder to predict and also helping in increasing new diseases and pests.

Through the programme, they played over and over again Ebiet G. Ade's *Rumput Yang Bergoyang*: Nature gets angry at human behavior causing landslides and tsunami. However, there were some PSA from TVRI despite low share viewers. Other ministries embedded their climate change cause in programmes related to travel and tourism places or challenging locations, such as *Jejak Petualang*, or variety show, such as *Bumi Manusia* (The Human Earth) at TVOne.

*"Information overload has created anxiousness, confusion, and concern among the grassroots community, as they are only concerned about their access to natural resources, especially in their areas." Media expert,
Jakarta*

Television is a dominant mass media in Indonesia. While radio listener is decreasing, people switch their preferences to new media, such as mobile phone and internet. Respondents preferred to receive information about climate change through TV and respected community members.

Preferred information source in the future

Q : If you were to get information about changes in water, food, energy supplies, how would you like to be provided with this information

BASE :928

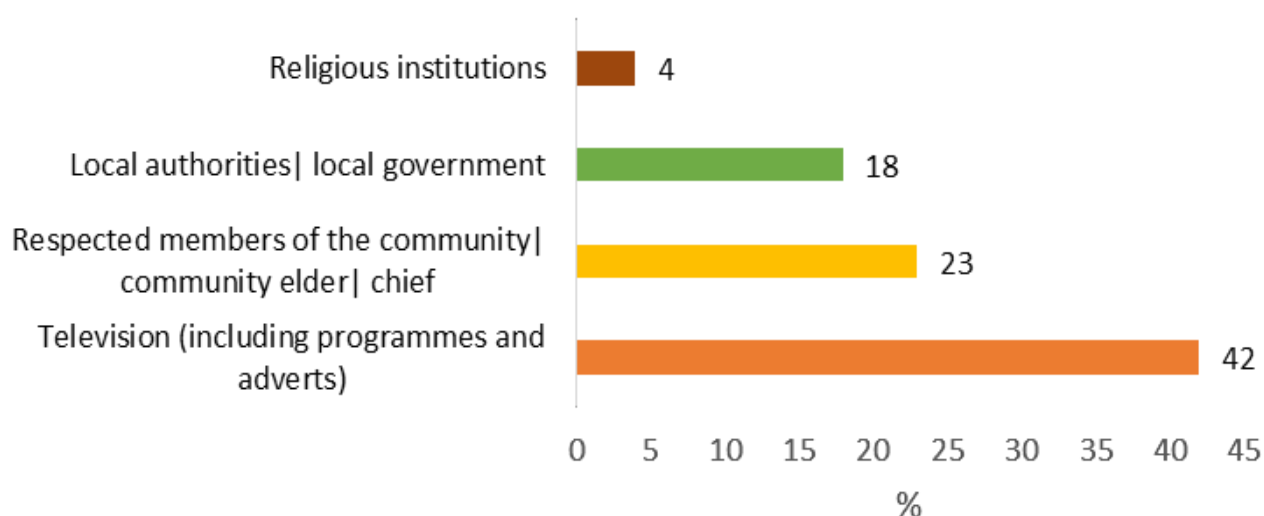


Figure 6. Urban poor preferred information sources

People's information need varied from information about the cause of climate change (72%), the future impact to their life (69%), and stressed the importance of increasing their capability to adapt (65%). People were less likely to learn from other experience (73%), but needed more information to educate children (61%). Information delivered through news (82%) and reality shows (68%) were the most preferred format. Although mass media were the main preference, face-to-face communication was still desirable in some cases since people could assure the information was correct as it came from their respected member of community or expert.

What media can do

Communication can help individuals by building awareness, motivation, self-belief, knowledge, and skills to enable them to take action to secure food, water and shelter, improve economic opportunities and security, reduce the risk of disasters, and cope with crises. It can also support communities to discuss common issues and work together. At the national level, mass media, particularly television, can enable and support individual people to respond to changes in climate. To do so, selected messages from Climate Asia's Indonesia report has brought up bridges to communicate to urban.

- Engage people with the issue by framing communication around people's values and motivations for action. There is an opportunity to increase engagement with climate change and encourage action now by framing communication around the things people value. For instance, strong desires to protect health and the environment, as well as provide sustainability for future generations.
- Empower people to make choices for themselves. Empowering the urban poor will reduce their reliance on government to take action.
- Build knowledge and inspire innovation. Urban poor's keenness for information about what they can do to respond to climate change. Government and civil society are already helping to educate people and build knowledge.

Using segmentation towards effective action

In order to understand people's needs and identify opportunities to communicate with them effectively,

segmentation was made. Using cluster analysis, each segment varied with the factors that enable and prevent a response. As such, each had different communication needs and could be supported in different ways. These segments were surviving, struggling, adapting, willing, and unaffected.

Urban poor in Indonesia fell into struggling (41%) segment. It was completely different compared to the majority of the population. Indonesian were willing (55%), and the willing are more affluent. They were aware and felt that they understood climate change. More than any other segment, they were expecting high levels of impact in the future. The struggling was a group experiencing the impact of changes in climate but facing barriers to take action. Struggling group is the group that trying to take action, but finding it very difficult. There are 96% said their communities worked together to solve issues. Around 89% felt they lacked access to information and 89% would take action if it made or saved them money.

The struggling were enduring the most impact of any segment, but could not take much action. However, unlike the surviving, the struggling was willing to make changes. Lack of information and support prevented them from taking action. Despite strong community ties, they did not discuss issues that have something to do with food, water, energy, and climate with their peers very much.

When supporting the struggling group, the aims for communication need to tailor as follow:

- Promote discussion to help people make complex decisions. The struggling value fitting in with people around them and their communities. Encouraging discussion of potential options for response is likely to lead to communities making decisions about how to make the most of limited resources.
- Take collective action. Communication could be built upon the high level of community cooperation by encouraging collective action.
- Highlight the financial benefits of adapting to changes. The struggling are more likely to act if there is a chance that the action will make or save them money.
- Build networks. People feel connected to the community. This ethos can be harnessed by facilitating dialogue between communities so that ideas and issues can be shared and discussed.

Table 3. Distribution of urban poor women across five segments

	Surviving	Struggling	Adapting	Willing	Unaffected
All (BASE: 928)	15%	41%	19%	14%	11%
Urban poor women (BASE :450)	22%	34%	26%	14%	4%

EXPENDING SEGMENTATION: WOMEN IN URBAN POOR AS PRIORITY AUDIENCE

The segments above would be used in exercise to help prioritize group of people that could be targeted through media and face-to-face communication. In this paper, women from the urban poor community would be the priority audience.

Who are they?

Women in urban poor were a housewife, petty trader/shopkeeper, and junior office worker. They lived with more than 4 family members in the household. Their biggest worry was their children's future.

Why choose them?

Women in urban poor were identified by all focus group participants as a vulnerable group. Experts and opinion-formers stressed the vulnerability of this group as they were likely less involved in taking decision in their residential area. Only small number of them was taking action despite life in the edge of climate change. Over half of them (52%) did not have access to information. When it comes to adapting, women found themselves self-cynical (55%). They felt there would be no chance for them to improving their way of conforming to changes in climate.

Information sources

TV was the most used media by women in urban poor, 94% watched TV daily. Unlike the general urban poor, TV was also seen as the trusted source of information (94%). Number of women trusted other source of information regarding changes in environment was very low. A high number them distrusted the government (81%) and even religious institution (92%). Women in urban poor were less likely to discuss the impact of changes in climate to their key resource. The frequency of discussion was very low, less than quarter of women in urban poor

(23%) discussed it with their family or friends.

At the local level:

Relating climate change adaptation into money-making activity would motivate women to take action. A women group monthly gathering facilitate by opinion former or expert would enable woman in urban poor community talked to their peers and sharing their issue at the same time.

CONCLUSION

Communication with this audience should seek to trigger discussion among them and the community member. Assist women in urban poor to prepare extreme weather events, reduce their cynicism, and build on their self-efficacy. A variety TV show and talk show that provided room for open discussion on future impact, alternative livelihood, and educates their children would resonate strongly. The program urged the sense of belonging to this urgent issue. Not only bringing serious discussion, an entertaining program was required.

REFERENCES

- Adger, W. 2003. Social capital, collective action and adaptation to climate change. *Econ Geogr*, 387-404.
- Bankoff, G. 2003. *Cultures of disaster, society and natural hazard in the Philipines*. London: Routledge Curzon.
- Ford, J., Knight, M., & Pearce, T. 2013. Assessing the usability of climate change research for decision making : a case study of the Canadian International Polar . *Global Environmental Change*, 1317-1326.
- Huq, Saleemul & Ayers, Jessica. 2007. *Critical list: the 100 nations most vulnerable to climate change*. Sustainable Development Opinion. International Institute for Environment and Development, London.

- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
2001. *Climate Change 2001 : impacts, adaptation and vulnerability*. Cambridge: Cambridge University Press
- International Panel on Climate Change.
2007.
Impacts, adaptation and vulnerability : Working Group II contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC (Climate Change 2007). Cambridge: Cambridge University Press.
- Maxwell, J. A. 2006. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach* (2nd ed.). Thousand Islands: Sage.
- Shanahan, M. 2007. *Talking about a revolution : climate change and the media*. London: International Institute for Environment and Development.
- Stern, N. 2007. *The economics of climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- UN Data. 2013. *Poverty headcount ratio in national poverty line*. Retrieved from <http://data.un.org>

PANDUAN PENULISAN JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Kependudukan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan di media cetak lain maupun elektronik.
2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
4. Naskah ditulis dengan menggunakan model huruf Times New Roman, font 12, margin atas 4 cm, margin bawah, 3 cm, margin kanan 3 cm, dan margin kiri 4 cm, pada kertas berukuran A4 minimal 5000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Setiap lembar tulisan diberi halaman.
5. Isi naskah terdiri dari;
 - a. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata.
 - b. Identitas Penulis yang diletakkan di bawah judul, meliputi nama dan alamat lembaga penulis serta alamat email
 - c. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 100-150. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
 - d. Pendahuluan yang berisi tentang justifikasi pentingnya penulisan artikel, maksud/tujuan menulis artikel, sumber data yang dipakai, dan pembabakan penulisan.
 - e. Tubuh/inti artikel berisi tentang isi tulisan, pada umumnya berisi tentang kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, dan pendirian penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa subbagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
 - f. Kesimpulan berisi temuan penting dari apa yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.
 - g. Tampilan tabel, gambar atau grafik harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan diatas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan dibawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik.
 - h. Acuan Pustaka diupayakan menggunakan acuan terkini (lima tahun terakhir)
- i. Penulisan daftar Pustaka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - Kutipan dalam teks: nama belakang pengarang, tahun karangan dan nomor halaman yang dikutip
Contoh: (Jones, 2004:15), atau Seperti yang dikemukakan oleh Jones (2004:15).
 - Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. *Judul buku*. kota penerbitan: penerbit.
Contoh: Horowitz, Donald. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley: University of California.
 - Kutipan dari artikel dalam buku bunga rampai: nama belakang, nama depan pengarang, tahun. "judul artikel" dalam nama editor (Ed.), Judul Buku. nama kota: nama penerbit. Halaman artikel.
Contoh: Hugo, Graeme. 2004. "International Migration in Southeast Asia since World War II", dalam A. Ananta dan E.N.Arifin (Eds.), *International Migration in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hal: 28—70.
 - Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. "Judul artikel", Nama Jurnal, Vol (nomor Jurnal): halaman.
Contoh: Hull, Terence H. 2003. "Demographic Perspectives on the Future of Indonesian Family", *Journal of Population Research*, 20 (1):51—65.
 - Kutipan dari *website*: dituliskan lengkap alamat *website*, tahun dan alamat URL dan html sesuai alamatnya. Tanggal *download*.
Contoh: World Bank. 1998. <http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html>. Washington DC. Tanggal 25 Maret.
 - Catatan kaki (*footnote*) hanya berisi penjelasan tentang teks, dan diketik di bagian bawah dari lembaran teks yang dijelaskan dan diberi nomor.
6. Naskah dikirim melalui email: jki.ppklipi@yahoo.com dan jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id
7. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan melalui e-mail.
8. Redaksi memiliki kewenangan untuk merubah format penulisan dan judul tulisan sesuai dengan petunjuk penulisan, serta mengatur waktu penerbitan.

KEPENDUDUKAN INDONESIA

Women Labor Migration in Asia: Mother Migration and Its Impacts on Left-Behind

Meirina Ayumi Malamassam

Mengurai Jaringan Migrasi: Kajian Komunitas Petani Migran Bugis di Sulawesi

Elok Mulyoutami, Ekawati Sri Wahyuni, Lala M Kolopaking

Kerentanan Ekologi dan Strategi Penghidupan Pertanian Masyarakat Desa Persawahan Tadah Hujan di Pantura Indramayu

Ali Yansyah Abdurrahim, Arya Hadi Dharmawan, Satyawan Sunito, I Made Sudiana

Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah

Deshinta Vibriyanti

Relevansi Pendidikan Kejuruan Terhadap Pasar Kerja di Kota Salatiga

Ngadi

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 9	No. 1	1-72	Jakarta, Juni 2014	ISSN 1907-2902
----------------------------------	--------	-------	------	-----------------------	-------------------

ISSN 1907-2902



9 771907 290214